



BADAN
PANGAN
NASIONAL

PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN *(Food Security and Vulnerability Atlas-FSVA)* **KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT** **TAHUN 2023**



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

Jalan Pasir Panjang – Kumpai Batu No. 09 Pangkalan Bun Kalimantan Tengah 74117
e-mail: dkp.kobar@gmail.com. Website : dkp.kotawaringinbaratkab.go.id

TIM PENYUSUNAN

PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN
(FOOD SECURITY AND VULNERABILITY ATLAS – FSVA)
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2023

Penanggung Jawab : Ir. HEPY, M.Si

Ketua : Ir. EDY HERIANSYAH

Sekretaris : ADI SUSILO, SP., MM

Anggota : PIET DONO, SE

Anggota : WIRO BUDI PONCO
PUTRANTO

Anggota : MUJIBURROHMAN, S.Kom

Anggota : ROSIYANA, S.Gz.,M.K.M

Anggota : BAYU JAYA KUSUMA, SP

Anggota : RADITYO, SP

Anggota : NURUL HUDA, SP

KATA PENGANTAR

Peta Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) menjadi salah satu instrumen dalam mengelola krisis pangan dan gizi, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Informasi tentang ketahanan dan kerentanan pangan sangat diperlukan sebagai evaluasi program yang telah dilaksanakan sekaligus menjadi dasar bagi pemangku kebijakan dalam merencanakan kebijakan dan program. Ketersediaan informasi dan data yang tepat akan memudahkan dalam menetapkan prioritas intervensi program.

Dalam rangka menyediakan informasi ketahanan pangan yang akurat dan komprehensif, maka disusunlah **Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)** sebagai salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk monitoring ketahanan pangan di Kabupaten Kotawaringin Barat. Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 merupakan hasil kerja Tim FSVA Kabupaten Kotawaringin Barat, dan pendanaannya dibebankan pada Anggaran (DIPA) Satker Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023.

Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) Kabupaten Kotawaringin Barat ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pengambil keputusan untuk secara tepat dalam mengidentifikasi daerah yang lebih rentan, dimana investasi dari berbagai sektor seperti layanan jasa, pembangunan manusia dan infrastruktur yang berkaitan dengan ketahanan pangan dapat memberikan dampak yang lebih terhadap penghidupan, ketahanan pangan dan gizi masyarakat. Dalam hal ini sangat penting artinya dalam kaitannya dengan perencanaan pembangunan khususnya yang menyangkut masalah pangan dan gizi serta diversifikasi pangan.

Tersusunnya Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/ Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 ini tidak terlepas dari peran aktif semua pihak yang dengan penuh rasa tanggung jawab mulai dari pengumpulan, mengolah dan menganalisa data yang diperlukan. Saran dan kritik membangun dari berbagai pihak untuk perbaikan dan penyempurnaan dimasa mendatang sangat kami harapkan.

Pangkalan Bun, Januari 2024

Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Kotawaringin Barat



Ir. HEPY, M.Si

NIP. 19641121 199303 1 004

RINGKASAN EKSEKUTIF

1. Ketersediaan informasi ketahanan pangan yang akurat, komprehensif, dan tertata dengan baik sangat penting untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan kerawanan pangan dan gizi, karena dapat memberikan arah dan rekomendasi kepada pembuat keputusan dalam penyusunan program, kebijakan, serta pelaksanaan intervensi di tingkat pusat dan daerah. Penyediaan informasi diamanahkan dalam UU No 18/ 2012 tentang Pangan dan PP No 17/2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi yang mengamatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi.
2. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA*) merupakan peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis dari hasil analisa data indikator kerentanan terhadap kerawanan pangan. Informasi dalam FSVA menjelaskan lokasi wilayah rentan terhadap kerawanan pangan dan indikator utama daerah tersebut rentan terhadap kerawanan pangan.
3. FSVA Kabupaten merupakan peta yang menggambarkan situasi ketahanan dan kerentanan pangan wilayah desa. Indikator yang digunakan dalam penyusunan FSVA merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Pemilihan indikator didasarkan pada: (i) keterwakilan 3 pilar ketahanan pangan (ii) tingkat sensitifitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; dan (iii) ketersediaan data tersedia secara rutin untuk periode tertentu yang mencakup seluruh wilayah desa. Enam indikator digunakan dalam penyusunan FSVA Kabupaten.
4. Indikator pada aspek ketersediaan pangan adalah (1) Rasio luas lahan baku sawah terhadap luas lahan total; (2) Rasio jumlah sarana dan prasarana ekonomi terhadap jumlah rumah tangga. Indikator pada akses pangan adalah (1) Rasio penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap total jumlah penduduk; (2) Desa dengan akses penghubung kurang memadai. Indikator pada aspek pemanfaatan pangan adalah: (1) Rasio rumah tangga tanpa akses air bersih; (2) Rasio tenaga kesehatan terhadap penduduk.
5. Desa/kelurahan diklasifikasikan dalam 6 kelompok ketahanan pangan dan gizi berdasarkan pada tingkat keparahan dan penyebab dari situasi ketahanan pangan dan gizi. Desa/kelurahan di Prioritas 1, 2 dan 3 merupakan wilayah rentan pangan dengan klasifikasi Prioritas 1 tingkat rentan pangan tinggi, Prioritas 2 rentan pangan sedang, dan prioritas 3 rentan pangan rendah. Desa/kelurahan di Prioritas 4, 5, dan 6 merupakan wilayah tahan pangan dengan klasifikasi prioritas 4 tahan pangan rendah, prioritas 5 tahan pangan sedang, sedangkan prioritas 6 yaitu tahan pangan tinggi.
6. Hasil analisis Komposit FSVA 2023 menunjukkan bahwa desa rentan pangan Prioritas 1-3 sebanyak 1 desa dari 94 desa/kelurahan yang terdiri dari 1 desa (1,06%) Prioritas 1. Desa prioritas 1 desa Sungai Cabang di kecamatan Kumai.
7. Karakteristik desa rentan pangan ditandai dengan :
 - a. rendahnya rasio luas baku lahan sawah terhadap luas wilayah desa,
 - b. tingginya rasio rumah tangga miskin,
 - c. tingginya rasio rumah tangga tanpa akses air bersih,
 - d. rendahnya rasio tenaga kesehatan perjumlah penduduk terhadap kepadatan penduduk, dan

- e. rendahnya rasio sarana dan prasarana ekonomi terhadap jumlah rumah tangga.
8. Program-program peningkatan ketahanan pangan dan menangani kerentanan pangan desa diarahkan pada kegiatan:
- a. Pengembangan lahan sawah, optimalisasi penggunaan lahan, mengimbangi alih fungsi lahan, pengembangan dan rehabilitasi Jaringan Irigasi, peningkatan produktivitas, pengolahan/perbaikan tanah, Memperkuat pengawasan peningkatan produktivitas pertanian, Penguatan kelembagaan petani, dan Pengurangan dampak iklim dan Organisme Pengganggu Tumbuhan.
 - b. Penanganan kemiskinan melalui penyediaan lapangan kerja, padat karya, redistribusi lahan; pembangunan infrastruktur dasar (jalan, listrik, rumah sakit), dan pemberian bantuan sosial; serta pembangunan usaha produktif/UMKM/padat karya untuk menggerakkan ekonomi wilayah.
 - c. Peningkatan akses air bersih melalui penyediaan fasilitas dan layanan air bersih; sosialisasi, penyuluhan dan pembangunan fasilitas air bersih.
 - d. Penyediaan tenaga kesehatan dan fasilitas tenaga Kesehatan.
 - e. Pengembangan dan pembangunan sarana perekonomian berupa fasilitas pasar dan pertokoan di tingkat desa/kelurahan, serta penyediaan fasilitas pasokan bahan pangan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR GRAFIK	viii
DAFTAR PETA	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
LEMBAR PENGESAHAN	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. KERANGKA KONSEP KETAHANAN PANGAN DAN GIZI	2
1.3. METODOLOGI	5
BAB 2 KETERSEDIAAN PANGAN	8
2.1. LAHAN PERTANIAN	8
2.2. PRODUKSI	9
2.3. SARANA DAN PRASARANA EKONOMI	13
2.4. STRATEGI PEMENUHAN KETERSEDIAAN PANGAN	15
BAB 3 AKSES TERHADAP PANGAN	17
3.1. PENDUDUK DENGAN TINGKAT KESEJAHTERAAN TERENDAH	17
3.2. AKSES TRANSPORTASI	19
3.3. STRATEGI PENINGKATAN AKSES PANGAN	20
BAB 4 PEMANFAATAN PANGAN	22
4.1. AKSES AIR BERSIH	22
4.2. RASIO TENAGA KESEHATAN	24
4.3. DAMPAK (OUTCOME) DARI STATUS KESEHATAN	25
4.4. STRATEGI PENINGKATAN PEMANFAATAN PANGAN	27
BAB 5 KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KOMPOSIT	30
5.1. KONDISI KETAHANAN PANGAN	30
5.2. FAKTOR PENYEBAB KERENTANAN PANGAN	33
BAB 6 REKOMENDASI KEBIJAKAN	35
DAFTAR PUSTAKA	37
LAMPIRAN	38

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Indikator FSVA Kabupaten 2022	5
Tabel 1.2	Bobot Indikator Individu	7
Tabel 2.1	Sebaran rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk berdasarkan prioritas	8
Tabel 2.2	Produksi Serealia Pokok dan Umbi-umbian 2018-2022 (Ton)	10
Tabel 2.3	Produksi Total Serealia per Tahun dan Laju Pertumbuhan Produksi (2018-2022)	10
Tabel 2.4	Produksi Padi 2018 - 2022 (Ton)	11
Tabel 2.5	Produksi Jagung 2018 - 2022 (Ton)	12
Tabel 2.6	Produksi Ubi Kayu 2018 - 2022 (Ton)	12
Tabel 2.7	Produksi Ubi Jalar 2018 - 2022 (Ton)	13
Tabel 2.8	Sebaran rasio sarana prasarana pangan berdasarkan skala prioritas terhadap jumlah Rumah Tangga	14
Tabel 3.1	Persentase Populasi di Bawah Garis Kemiskinan Kabupaten Kotawaringin Barat	17
Tabel 3.2	Sebaran jumlah kelurahan/desa dengan tingkat kesejahteraan terendah berdasarkan skala prioritas per kecamatan	17
Tabel 3.3	Sebaran desa dengan tingkat kesejahteraan terendah berdasarkan skala prioritas	18
Tabel 3.4	Sebaran desa dengan kategori akses transportasi berdasarkan skala prioritas	19
Tabel 4.1	Sebaran desa berdasarkan rumah tangga tanpa akses air bersih berdasarkan skala prioritas	22
Tabel 4.2	Sebaran rasio tenaga Kesehatan di desa berdasarkan skala prioritas	24
Tabel 4.3	Penderita Gizi Buruk 2018-2022	25
Tabel 4.4	Jumlah Kematian Balita dan Ibu Saat Melahirkan per Kecamatan	26
Tabel 5.1	Sebaran Jumlah dan Persentase Desa berdasarkan Prioritas	30
Tabel 5.2	Sebaran Kelurahan/Desa Dengan Berdasarkan Skala Prioritas per Kecamatan	31
Tabel 5.3	Faktor yang mempengaruhi di daerah rentan pangan berdasarkan bobot	34
Tabel 5.4.	Rata-Rata Skor dan indeks Indikator Ketahanan dan Kerentanan Pangan Pada Desa Rentan Pangan (Prioritas 1 - 3)	34
Tabel 5.5.	Rata-Rata Skor dan indeks Indikator Ketahanan dan Kerentanan Pangan Pada Desa tahan pangan (Prioritas 4 - 6)	34

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi	3
Gambar 6.1	Kerangka Intervensi untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan	35

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Sebaran rasio luas baku lahan sawah terhadap total lahan berdasarkan prioritas	9
Grafik 2.2	Produksi Serealiala Pokok dan Umbi-umbian 2018-2022 (Ton)	10
Grafik 2.3	Produksi Total Serealiala per Tahun dan Laju Pertumbuhan Produksi (2018-2022)	11
Grafik 2.4	Produksi Padi 2018-2022 (Ton)	11
Grafik 2.5	Produksi Jagung 2018-2022 (Ton)	12
Grafik 2.6	Produksi Ubi Kayu 2018-2022 (Ton)	13
Grafik 2.7	Produksi Ubi Jalar 2018-2022 (Ton)	13
Grafik 2.8	Sebaran rasio sarana prasarana ekonomi terhadap jumlah rumah tangga berdasarkan prioritas	15
Grafik 3.1	Sebaran Rasio desa dengan tingkat kesejahteraan terendah berdasarkan skala prioritas	18
Grafik 4.1	Sebaran desa berdasarkan rumah tangga tanpa akses air bersih berdasarkan skala prioritas	23
Grafik 4.2	Sebaran rasio tenaga kesehatan di desa berdasarkan skala prioritas	25
Grafik 4.3	Penderita Gizi Buruk	26
Grafik 4.4	Jumlah Kematian Balita dan Ibu Saat Melahirkan per Kecamatan	26
Grafik 5.1	Sebaran Jumlah Persentase Desa Prioritas Komposit Per Kecamatan tahun 2023	30

DAFTAR PETA

Peta 2.1	Sebaran rasio luas baku lahan sawah terhadap total lahan berdasarkan prioritas	9
Peta 2.8	Sebaran rasio sarana prasarana ekonomi terhadap jumlah rumah tangga berdasarkan prioritas	14
Peta 3.1	Sebaran desa dengan tingkat kesejahteraan terendah berdasarkan skala prioritas	17
Peta 3.2	Sebaran desa dengan kategori akses transportasi berdasarkan skala prioritas	18
Peta 4.1	Sebaran desa berdasarkan rumah tangga tanpa akses air bersih berdasarkan skala prioritas	25
Peta 4.2	Sebaran rasio tenaga kesehatan di desa berdasarkan skala prioritas	27
Peta 5.1	Sebaran Jumlah Desa berdasarkan Prioritas Komposit.....	29

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Sebaran Prioritas Desa Berdasarkan Indikator Aspek Ketersediaan Pangan Rasio Luas Lahan Pertanian Terhadap Jumlah Penduduk	39
Lampiran 2.	Sebaran Prioritas Desa Berdasarkan Indikator Aspek Ketersediaan Pangan Rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga.....	41
Lampiran 3.	Sebaran Prioritas Desa Berdasarkan Indikator Aspek Akses terhadap Pangan Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk	43
Lampiran 4.	Sebaran Prioritas Desa Berdasarkan Indikator Aspek Akses terhadap Pangan Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat, air atau udara	45
Lampiran 5.	Sebaran Prioritas Desa Berdasarkan Indikator Aspek Pemanfaatan Pangan Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga	47
Lampiran 6.	Sebaran Prioritas Desa Berdasarkan Indikator Aspek Pemanfaatan Pangan Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk.....	49
Lampiran 7.	Sebaran Desa berdasarkan Prioritas Komposit	51
Lampiran 8.	Sebaran rasio luas baku lahan sawah terhadap total lahan berdasarkan prioritas per desa	53
Lampiran 9.	Sebaran rasio sarana prasarana ekonomi terhadap jumlah rumah tangga berdasarkan prioritas per desa	54
Lampiran 10.	Sebaran desa dengan tingkat kesejahteraan terendah berdasarkan skala prioritas per desa	55
Lampiran 11.	Sebaran desa dengan kategori/Kriteria akses transportasi per desa.....	56
Lampiran 12.	Sebaran desa berdasarkan rumah tangga tanpa akses air bersih berdasarkan skala prioritas per desa	57
Lampiran 13.	Sebaran rasio tenaga kesehatan di desa berdasarkan skala prioritas per desa	58
Lampiran 14.	Peta per desa Komposit Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas-FSVA) Kabupaten Kotawaringin Barat 2023	59

LEMBAR PENGESAHAN

**PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN
(FOOD SECURITY AND VULNERABILITY ATLAS – FSVA)
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN 2023**

DIBUAT OLEH :	DISETUJUI OLEH :
 Ir. EDY HERIANSYAH	 Ir. HEPY, M.Si
Ketua Tim FSVA Kabupaten Kotawaringin Barat	Penanggung Jawab Tim FSVA Kabupaten Kotawaringin Barat

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari 6 kecamatan dan 13 kelurahan 81 desa dengan total penduduk sebesar 274.935 jiwa (BPS). Secara geografis terletak di bagian Selatan garis khatulistiwa, memanjang dari utara ke selatan di antara 110° 25'- 112° 50' Bujur Timur dan memanjang dari barat ke timur di antara 1° 19'- 3° 36' Lintang Utara/Selatan. Kabupaten Kotawaringin Barat di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Lamandau, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Seruyan dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sukamara yang memiliki wilayah daratan seluas 10.759 km² atau 1.075.900 ha. Secara klimatologis, Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki pola tipe curah hujan tipe A, yaitu daerah basah memiliki curah hujan lebih dari 515,7 mm per tahun dan daerah kering memiliki curah hujan kurang dari 175,2 mm per tahun. (*Kotawaringin Barat Dalam Angka 2023, BPS*).

Perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat tergantung pada sektor Industri Pengolahan yang masih mempunyai peranan tinggi terhadap PDRB atas dasar harga berlaku. Akan tetapi sektor ini tahun 2022 penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, di mana tahun 2021 perannya turun dari 27,04% menjadi 27,01%. Penurunan ini disebabkan semua sub sektor yang ada dalam sektor Pertambangan, Pengadaan Listrik, Pengadaan Air, Penyediaan Akomodasi, Informasi, Jasa Keuangan, Real Estat, Jasa Perusahaan, Administrasi Pemerintahan, Jasa Pendidikan, dan Kesehatan mengalami Penurunan peranan. Selain itu sektor yang mengalami penurunan tahun 2022 adalah sektor Pertambangan, yaitu dari 1,12% menjadi 1,07%; sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dari 1,14% menjadi 1,11%; sektor Informasi dan Komunikasi dari 0,89% menjadi 0,86%; sektor Jasa Keuangan dan Asuransi dari 5,02% menjadi 4,86%; sektor Real Estat dari 1,76% menjadi 1,75%; sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dari 3,29% menjadi 3,26%; dan sektor Jasa Pendidikan dari 2,59% menjadi 2,41%. Sementara sektor lainnya mengalami peningkatan. Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan menunjukkan peranan sebesar 26,53%, sektor Konstruksi sebesar 8,35%, sektor Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 13,17%, sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 7,29%, dan sektor Jasa Lainnya sebesar 0,64%. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih sangat banyak hal yang harus dilakukan oleh pemerintah dan para pemegang kepentingan (stakeholder) dalam melakukan pembangunan. (*Kotawaringin Barat Dalam Angka 2023, BPS*).

Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 114 dan Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi Pasal 75 mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi, yang dapat digunakan untuk perencanaan, pemantauan dan evaluasi, stabilisasi pasokan dan harga pangan serta sebagai sistem peringatan dini terhadap masalah pangan dan kerawanan pangan dan gizi.

Informasi tentang ketahanan dan kerentanan pangan penting untuk memberikan informasi kepada para pembuat keputusan dalam pembuatan program dan kebijakan, baik di tingkat pusat maupun tingkat lokal, untuk lebih memprioritaskan intervensi dan program berdasarkan kebutuhan dan potensi dampak kerawanan pangan yang tinggi. Informasi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai salah satu instrumen untuk mengelola krisis pangan dalam rangka

upaya perlindungan/penghindaran dari krisis pangan dan gizi baik jangka pendek, menengah maupun panjang.

Dalam rangka menyediakan informasi ketahanan pangan yang akurat dan komprehensif, disusunlah Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/*Food Security and Vulnerability Atlas-FSVA* sebagai instrumen untuk monitoring ketahanan pangan wilayah. Di tingkat nasional FSVA disusun sejak tahun 2002 bekerja sama dengan *World Food Programme (WFP)*. Kerjasama tersebut telah menghasilkan Peta Kerawanan Pangan (*Food Insecurity Atlas - FIA*) pada tahun 2005. Pada tahun 2009, 2015, 2018 disusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA*).

Sebagai tindak lanjut penyusunan FSVA Nasional disusun pula FSVA Provinsi dengan analisis sampai tingkat kecamatan dan FSVA Kabupaten dengan analisis sampai tingkat desa. Dengan demikian, permasalahan pangan dapat dideteksi secara cepat sampai level yang paling bawah. FSVA kabupaten telah disusun sejak tahun 2012 dan dimutakhirkan pada tahun 2016. Untuk mengakomodir perkembangan situasi ketahanan pangan dan pemekaran wilayah desa, maka dilakukan pemutakhiran FSVA Kabupaten pada tahun 2019.

Seperti halnya FSVA Nasional dan Provinsi, FSVA Kabupaten menyediakan sarana bagi para pengambil keputusan untuk secara cepat dalam mengidentifikasi daerah yang lebih rentan, dimana investasi dari berbagai sektor seperti pelayanan jasa, pembangunan manusia dan infrastruktur yang berkaitan dengan ketahanan pangan dapat memberikan dampak yang lebih baik terhadap penghidupan, ketahanan pangan dan gizi masyarakat pada tingkat desa.

Pengembangan FSVA tingkat desa merupakan hal yang sangat penting, dimana kondisi ekologi dan kepulauan yang membentang dari timur ke barat, kondisi iklim yang dinamis dan keragaman sumber penghidupan masyarakat menunjukkan adanya perbedaan situasi ketahanan pangan dan gizi di masing-masing wilayah. FSVA Kabupaten akan menjadi alat yang sangat penting dalam perencanaan dan pengambilan keputusan untuk mengurangi kesenjangan ketahanan pangan.

1.2. KERANGKA KONSEP KETAHANAN PANGAN DAN GIZI

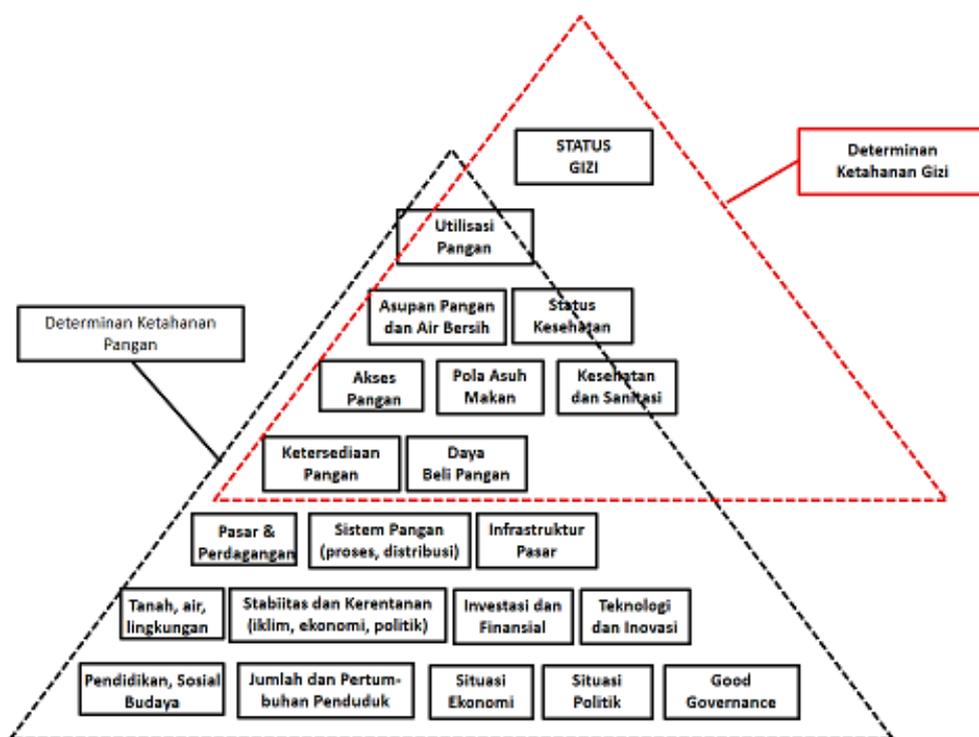
Peran pangan bukan hanya penting untuk memenuhi kebutuhan fisik dasar dan mencegah kelaparan, namun lebih jauh dari itu peran pangan dengan kandungan gizi di dalamnya bagi kecerdasan bangsa dan peningkatan kualitas hidup manusia untuk menghasilkan manusia yang sehat, cerdas, aktif dan produktif seperti disebutkan dalam definisi ketahanan pangan. Kecukupan pemenuhan pangan dalam jumlah dan mutunya berkorelasi dengan produktivitas kerja dan pertumbuhan otak serta kecerdasan dan pada akhirnya berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam undang-undang didefinisikan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Menimbang pentingnya ketahanan pangan dalam pembangunan nasional, Bab III Undang-undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 mengamanatkan bahwa Pemerintah harus melakukan perencanaan penyelenggaraan pangan. Pada pasal 6, penyelenggaraan pangan diarahkan untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan.

Definisi ketahanan pangan (*food security*) yang dianut oleh Food and Agricultural Organisation (FAO) dan dirujuk oleh UU Pangan saat ini mengacu pada konsep awal *food security*

yang dihasilkan oleh World Food Summit tahun 1996. Merujuk pada konsep tentang pentingnya nutrition security yang diajukan oleh Unicef pada awal tahun 1990an yang menambahkan aspek penyakit infeksi sebagai penyebab masalah gizi disamping ketahanan pangan rumah tangga, maka International Food Policy Research Institute (IFPRI) menyebut konsep ketahanan pangan FAO tersebut sebagai Food and Nutrition Security. Pada tahun 2012 FAO1 mengajukan definisi food security menjadi food and nutrition security untuk menyempurnakan konsep dan definisi sebelumnya.

Upaya FAO ini sejalan dengan upaya Standing Committee on Nutrition (SCN), suatu lembaga non struktural yang juga berada di bawah United Nations (PBB) yang pada tahun 20132 juga merekomendasikan penyempurnaan definisi ketahanan pangan (food security) menjadi ketahanan pangan dan gizi (food and nutrition security). Dalam pemahaman baru ini, perwujudan ketahanan pangan tidak hanya berorientasi pada upaya penyediaan pangan dalam jumlah yang cukup bagi setiap individu, namun juga harus disertai upaya untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan pangan bagi terciptanya status gizi yang baik bagi setiap individu. Dalam konteks ini optimalisasi utilisasi pangan tidak cukup hanya dari kualitas pangan yang dikonsumsi, namun juga harus didukung oleh terhindarnya setiap individu dari penyakit infeksi yang dapat mengganggu tumbuh kembang dan kesehatan melalui kecukupan air bersih dan kondisi sanitasi lingkungan dan higiene yang baik. Kerangka pikir ketahanan pangan dan gizi ini dituangkan dalam Gambar 1.1.



Gambar 1.1. Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi
(Sumber: FAO dan UNSCN)

Analisis dan pemetaan FSVA dilakukan berdasarkan pada pemahaman mengenai **ketahanan pangan dan gizi** seperti yang tercantum dalam Kerangka Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi (Gambar 1.1). Kerangka konseptual tersebut dibangun berdasarkan tiga pilar

1 Disampaikan pada Committee on World Food Security, 36th sessions of 15-22 October 2012, Rome-Italia
2 Disampaikan pada UNSCN Meeting of the Minds and Nutrition Impact of Food System, 25-28 March di New York

ketahanan pangan, yaitu: ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan, serta mengintegrasikan gizi dan kerentanan di dalam keseluruhan pilar tersebut.

Ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri, cadangan pangan, serta pemasukan pangan (termasuk didalamnya impor dan bantuan pangan) apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Ketersediaan pangan dapat dihitung pada tingkat nasional, regional, kecamatan dan tingkat masyarakat.

Akses pangan adalah **kemampuan rumah tangga untuk memperoleh** cukup pangan yang bergizi, melalui satu atau kombinasi dari berbagai sumber seperti: produksi dan persediaan sendiri, pembelian, barter, hadiah, pinjaman dan bantuan pangan. Pangan mungkin tersedia di suatu daerah tetapi tidak dapat diakses oleh rumah tangga tertentu jika mereka tidak mampu secara fisik, ekonomi atau sosial, mengakses jumlah dan keragaman makanan yang cukup.

Pemanfaatan pangan merujuk pada **penggunaan pangan oleh rumah tangga dan kemampuan individu** untuk menyerap dan memetabolisme zat gizi. Pemanfaatan pangan juga meliputi cara penyimpanan, pengolahan dan penyiapan makanan, keamanan air untuk minum dan memasak, kondisi kebersihan, kebiasaan pemberian makan (terutama bagi individu dengan kebutuhan makanan khusus), distribusi makanan dalam rumah tangga sesuai dengan kebutuhan individu (pertumbuhan, kehamilan dan menyusui), dan status kesehatan setiap anggota rumah tangga. Mengingat peran yang besar dari seorang ibu dalam meningkatkan profil gizi keluarga, terutama untuk bayi dan anak-anak, pendidikan ibu sering digunakan sebagai salah satu proxy untuk mengukur pemanfaatan pangan rumah tangga.

Dampak gizi dan kesehatan merujuk pada status gizi individu, termasuk defisiensi mikronutrien, pencapaian morbiditas dan mortalitas. Faktor-faktor yang berhubungan dengan pangan, serta praktek-praktek perawatan umum, memiliki kontribusi terhadap dampak keadaan gizi pada kesehatan masyarakat dan penanganan penyakit yang lebih luas.

Kerentanan dalam peta ini selanjutnya merujuk pada kerentanan terhadap **kerawanan pangan dan gizi**. Tingkat kerentanan individu, rumah tangga atau kelompok masyarakat ditentukan oleh pemahaman terhadap faktor-faktor risiko dan kemampuan untuk mengatasi situasi tertekan.

Kerawanan pangan dapat menjadi kondisi yang kronis atau transien. **Kerawanan pangan kronis** adalah ketidakmampuan jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum dan biasanya berhubungan dengan struktural dan faktor-faktor yang tidak berubah dengan cepat, seperti iklim setempat, jenis tanah, sistem pemerintahan daerah, infrastruktur publik, sistem kepemilikan lahan, distribusi pendapatan dan mata pencaharian, hubungan antar suku, tingkat pendidikan, sosial budaya/adat istiadat dll.

Kerawanan pangan transien adalah ketidakmampuan sementara yang bersifat jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum yang sebagian besar berhubungan dengan faktor dinamis yang dapat berubah dengan cepat/tiba-tiba seperti penyakit menular, bencana alam, pengungsian, perubahan fungsi pasar, tingkat hutang dan migrasi. Perubahan faktor dinamis tersebut umumnya menyebabkan kenaikan harga pangan yang lebih mempengaruhi penduduk miskin dibandingkan penduduk kaya, mengingat sebagian besar dari pendapatan penduduk miskin digunakan untuk membeli makanan. Kerawanan pangan transien yang berulang dapat menyebabkan kerawanan aset rumah tangga, menurunnya ketahanan pangan dan akhirnya dapat menyebabkan kerawanan pangan kronis.

1.3. METODOLOGI

Kerentanan pangan dan gizi adalah masalah multi-dimensional yang memerlukan analisis dari sejumlah parameter. Kompleksitas masalah ketahanan pangan dan gizi dapat dikurangi dengan mengelompokkan indikator *proxy* ke dalam tiga kelompok yang berbeda tetapi saling berhubungan, yaitu ketersediaan pangan, keterjangkauan/akses rumah tangga terhadap pangan dan pemanfaatan pangan secara individu. Pertimbangan gizi, termasuk ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan bergizi tersebar dalam ketiga kelompok tersebut.

Indikator

Kerentanan terhadap kerawanan pangan tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten, memiliki karakteristik masing-masing sehingga tidak semua indikator nasional maupun provinsi dapat digunakan untuk memetakan kerentanan terhadap kerawanan pangan di tingkat kabupaten. Pemilihan indikator FSVA Kabupaten didasarkan pada: (i) hasil review terhadap pemetaan daerah rentan rawan pangan yang telah dilakukan sebelumnya; (ii) tingkat sensitivitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; (iii) keterwakilan pilar ketahanan pangan dan gizi; dan (iv) ketersediaan data pada seluruh desa.

Indikator yang digunakan dalam FSVA Kabupaten terdiri dari 6 (enam) indikator yang mencerminkan tiga aspek ketahanan pangan.

Tabel 1.1. Indikator FSVA Kabupaten 2022

Indikator	Definisi	Sumber Data
A. Aspek Ketersediaan Pangan		
Rasio luas baku lahan sawah terhadap luas wilayah desa	Luas baku lahan sawah dibandingkan luas wilayah desa	BPS; Pusat Data Informasi Kementan, Distan, LP2B 2022.
Rasio jumlah sarana dan prasarana ekonomi terhadap jumlah rumah tangga	Jumlah sarana dan prasarana ekonomi (pasar, minimarket, toko, warung, restoran dll) dibandingkan jumlah rumah tangga desa	Podes BPS 2021; Data Toko Swalayan Di Kec & Pasar Tradisional Kobar 2022, Disperindag UKM
B. Aspek Akses terhadap Pangan		
Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk desa	Jumlah penduduk dengan status kesejahteraan terendah (penduduk dengan tingkat kesejahteraan pada Desil 1) dibandingkan jumlah penduduk desa	Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (SK.71/2018) Jumlah Rumah Tangga Disdukcapil, 2022.
Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat atau air atau udara	Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai dengan kriteria: (1) Desa dengan sarana transportasi darat tidak dapat dilalui sepanjang tahun; (2) Desa dengan sarana transportasi air atau udara namun tidak tersedia angkutan umum	Potensi Desa 2021, BPS

Indikator	Definisi	Sumber Data
C. Aspek Pemanfaatan Pangan		
Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga desa	Jumlah rumah tangga desil 1 s/d 4 dengan sumber air bersih tidak terlindung dibandingkan jumlah rumah tangga desa	Rekapitulasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Dinsos 2022.
Rasio jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk desa	Jumlah tenaga kesehatan terdiri atas: 1) Dokter umum/spesialis; 2) dokter gigi; 3) bidan; 4) tenaga kesehatan lainnya (perawat, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, apoteker/asisten apoteker) dibandingkan jumlah penduduk desa	Dinas Kesehatan, 2022

Metode Analisis

1. Analisis Indikator Individu

Analisis indikator individu dilakukan dengan mengelompokkan indikator individu kedalam beberapa kelas berdasarkan metode sebaran empiris. Sementara itu data kategorik mengikuti standar pengelompokkan yang sudah ditetapkan oleh BPS.

2. Analisis Komposit

Metodologi yang diadopsi untuk analisis komposit adalah dengan menggunakan metode pembobotan. Metode pembobotan digunakan untuk menentukan tingkat kepentingan relatif indikator terhadap masing-masing aspek ketahanan pangan. Metode pembobotan dalam penyusunan FSVA mengacu pada metode yang dikembangkan oleh *The Economist Intelligence Unit* (EIU) dalam penyusunan *Global Food Security Index* (EIU 2016 dan 2017) dan *International Food Policy Research Institute* (IFPRI) dalam penyusunan *Global Hunger Index* (IFPRI 2017). Goodridge (2007) menyatakan jika variabel yang digunakan dalam perhitungan indeks berbeda, maka perlu dilakukan secara tertimbang (pembobotan) untuk membentuk indeks agregat yang disesuaikan dengan tujuannya.

Langkah-langkah perhitungan analisis komposit adalah sebagai berikut:

- Standarisasi nilai indikator dengan menggunakan *z-score* dan *distance to scale* (0 – 100)
- Menghitung skor komposit kabupaten/kota dengan cara menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing nilai indikator yang sudah distandarisasi dengan bobot indikator, dengan rumus:

$$Y(j) = \sum_{n=1}^9 a_i X_{ij} \dots \dots \dots (1)$$

Dimana:

- Y_j : Skor komposit kabupaten/kota ke-j
- a_i : Bobot masing-masing indikator
- X_{ij} : Nilai standarisasi masing-masing indikator pada kabupaten/kota ke-j

Besaran bobot masing-masing indikator dibagi sama besar untuk setiap aspek ketahanan pangan, karena setiap aspek memiliki peran yang sama besar terhadap penentuan

ketahanan pangan wilayah. Bobot untuk setiap indikator mencerminkan signifikansi atau pentingnya indikator tersebut dalam menentukan tingkat ketahanan pangan suatu wilayah.

Tabel 1.2. Bobot Indikator Individu

No	Indikator	Bobot
1.	Rasio luas baku lahan sawah terhadap luas wilayah desa	1/6
2.	Rasio jumlah sarana dan prasarana ekonomi terhadap jumlah rumah tangga	1/6
Sub Total		1/3
3.	Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk desa	1/6
4.	Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai	1/6
Sub Total		1/3
5	Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga desa	1/6
6	Rasio jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk desa	1/6
Sub Total		1/3

- c. Mengelompokkan desa/kelurahan ke dalam 6 kelompok prioritas berdasarkan *cut off point* komposit. Skor komposit yang dihasilkan pada masing-masing wilayah dikelompokkan ke dalam 6 kelompok berdasarkan *cut off point* komposit. *Cut off point* komposit merupakan hasil penjumlahan dari masing-masing perkalian antara bobot indikator individu dengan *cut off point* indikator individu hasil standarisasi *z-score* dan *distance to scale* (0-100).

$$K(j) = \sum_{n=1}^9 a_i C_{ij} \dots\dots\dots (2)$$

Dimana:

- K_j : *cut off point* komposit ke-J
- a_i : Bobot indikator ke-i
- C_{ij} : Nilai standarisasi *cut off point* indikator ke-I kelompok ke-j

Wilayah yang masuk ke dalam kelompok 1 adalah desa/kelurahan yang cenderung memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi daripada desa/kelurahan dengan kelompok di atasnya, sebaliknya wilayah pada kelompok 6 merupakan desa/kelurahan yang memiliki ketahanan pangan paling baik. Penting untuk menegaskan kembali bahwa sebuah desa/kelurahan yang diidentifikasi sebagai relatif lebih tahan pangan (kelompok Prioritas 4-6), tidak berarti semua penduduk di dalamnya juga tahan pangan. Demikian juga, tidak semua penduduk di desa/kelurahan Prioritas 1-3 tergolong rentan pangan.

3. Pemetaan

Hasil analisis indikator individu dan komposit kemudian divisualisasikan dalam bentuk peta. Peta-peta yang dihasilkan menggunakan pola warna seragam dalam gradasi warna merah dan hijau. Gradasi merah menunjukkan variasi tingkat kerentanan pangan tinggi dan gradasi hijau menggambarkan variasi kerentanan pangan rendah. Untuk kedua kelompok warna tersebut, warna yang semakin tua menunjukkan tingkat yang lebih tinggi dari ketahanan atau kerentanan pangan.

BAB 2 KETERSEDIAAN PANGAN

Undang-undang Pangan No. 18 tahun 2012 mendefinisikan ketersediaan pangan sebagai kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan. Sedangkan cadangan pangan nasional adalah persediaan pangan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat. Penyediaan pangan diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi pangan bagi masyarakat, rumah tangga dan perseorangan secara berkelanjutan.

Mayoritas bahan pangan yang diproduksi maupun didatangkan dari luar wilayah harus masuk terlebih dahulu ke pasar sebelum sampai ke rumah tangga. Oleh karena itu, selain kapasitas produksi pangan, keberadaan sarana dan prasarana penyedia pangan seperti pasar akan terkait erat dengan ketersediaan pangan di suatu wilayah.

2.1. LAHAN PERTANIAN

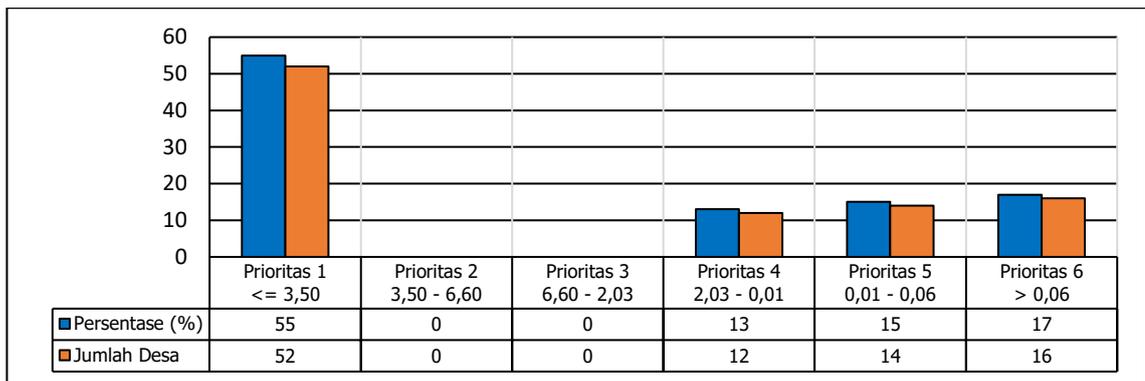
Rasio luas baku lahan sawah terhadap luas wilayah kabupaten adalah perbandingan antara luas baku lahan sawah dengan luas wilayah desa. Rasio lahan sawah terhadap luas wilayah desa digunakan sebagai salah satu indikator dalam aspek ketersediaan pangan karena lahan sawah memiliki korelasi yang positif terhadap tingkat ketersediaan pangan dengan mempengaruhi kapasitas produksi pangan³. Oleh sebab itu, semakin tinggi rasio luas lahan sawah terhadap luas wilayah desa maka diasumsikan ketersediaan pangan juga akan semakin baik, begitu pula sebaliknya.

Dari 13 kelurahan 81 desa di Kabupaten Kotawaringin Barat, 52 desa masuk dalam prioritas 1 (55 %), 0 desa prioritas 2 (0 %) dan 0 desa prioritas 3 (0 %). Kecamatan yang memiliki rasio lahan prioritas 1-3 sebagian besar tersebar di Kecamatan Kotawaringin Lama (10 desa), Kecamatan Arut Selatan (8 desa), Kecamatan Kumai (9 desa), Kecamatan Pangkalan Lada (8 desa), Kecamatan Pangkalan Banteng (11 desa), dan Kecamatan Arut Utara (6 desa) dengan Total keseluruhan sebanyak 52 desa. Hal ini menunjukkan semakin berkurangnya lahan sawah dengan adanya peningkatan jumlah desa yang tidak memiliki lahan sawah dibandingkan pada tahun 2021.

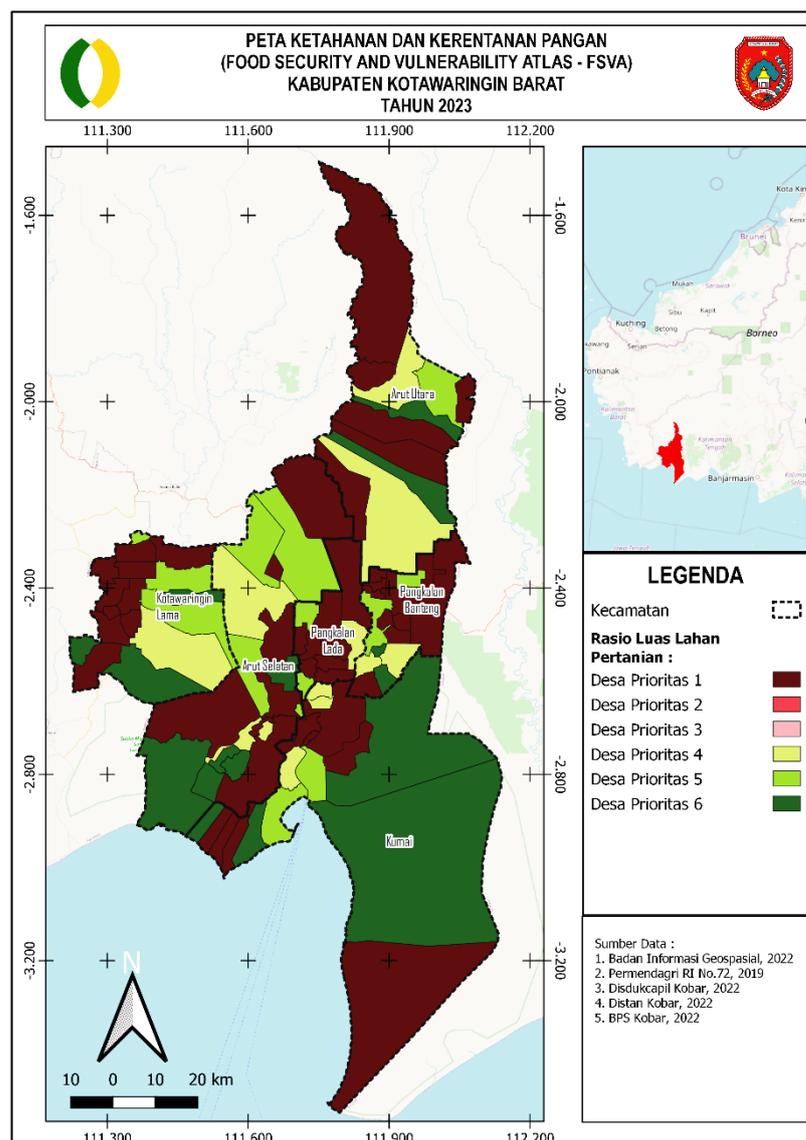
Tabel 2.1. Sebaran rasio luas baku lahan sawah terhadap total lahan berdasarkan prioritas

Prioritas	Rasio lahan sawah	Jumlah Desa	Persentase
1	<= 3,50	52	55%
2	3,50 – 6,60	0	0%
3	6,60 – 2,03	0	0%
4	2,03 – 1,40	12	13%
5	1,40 – 6,71	14	15%
6	> 6,71	16	17%

3 Yudhistira (2013) Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Ketahanan Pangan di Kabupaten Bekasi Jawa Barat. Fakultas Ekonomi dan



Grafik 2.1. Sebaran rasio luas baku lahan sawah terhadap total lahan berdasarkan prioritas



Peta 2.1. Sebaran rasio luas baku lahan sawah terhadap total lahan berdasarkan prioritas

2.2. PRODUKSI

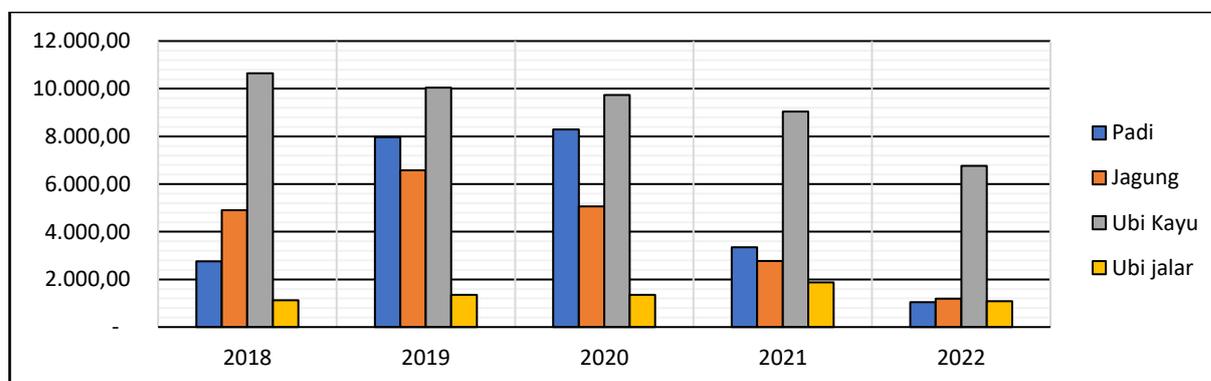
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat telah mempromosikan produksi pertanian dan telah mengadopsi beberapa tindakan perlindungan bagi petani. Pertanian (termasuk peternakan, kehutanan, dan perikanan) telah memberikan kontribusi sebesar 26,53% dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2022 dan memberikan peluang

yang signifikan untuk berkontribusi dalam meningkatkan ketahanan pangan, penanggulangan kemiskinan, dan dinamika pertumbuhan ekonomi. Padi dan jagung merupakan bahan pokok di Kabupaten Kotawaringin Barat yang menyumbang hampir 8.786,79 ton (45%) dari total produksi serealida kabupaten. Berdasarkan Tabel 2.2 dan Gambar 2.1, produksi umbi-umbian di Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami penurunan sejak tahun 2019. Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya luas tanam dan penurunan produktivitas. Produksi padi menurun 62% selama 5 tahun, yaitu dari pencapaian produksi 8.292,32 ton tahun 2020 menjadi 1.042,75 ton pada tahun 2022.

Tabel 2.2. Produksi Serealida Pokok dan Umbi-umbian 2018-2022 (Ton)

Serealida	Produksi (Ton)					Rata-rata 5 tahun
	2018	2019	2020	2021	2022	
Padi	2.757,49	7.975,20	8.292,32	3.349,99	1.042,76	4.683,55
Jagung	4.904,98	6.574,70	5.066,99	2.776,90	1.192,61	4.103,24
Ubi Kayu	10.648,25	10.048,20	9.740,58	9.047,39	6.767,87	9.250,46
Ubi jalar	1.122,72	1.347,30	1.350,61	1.879,83	1.083,15	1.356,72
Jumlah	19.433,44	25.945,40	24.450,50	17.054,11	10.086,39	19.393,97

Sumber: Kabupaten Dalam Angka 2019-2023, BPS & Statistik Pertanian 2018-2022, Dinas Pertanian Kobar



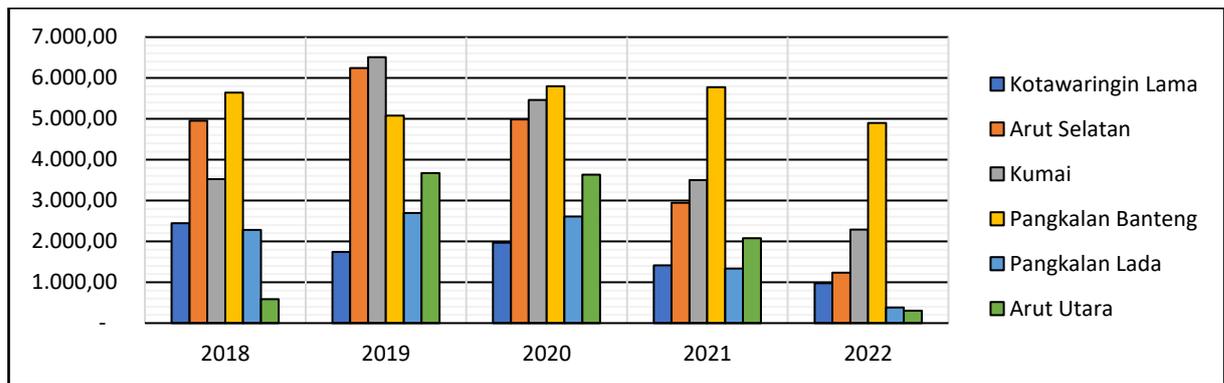
Grafik 2.2. Produksi Serealida Pokok dan Umbi-umbian 2018-2022 (Ton)

Tahun 2022, total produksi serealida dan umbi-umbian mencapai 10.086,39 ton terdiri dari padi 1.042,76 ton, jagung 1.192,61 ton, ubi kayu 6.767,87 ton dan ubi jalar 1.083,15 ton. Total produksi serealida dan laju pertumbuhan produksi tahun 2018-2022 menunjukkan pertumbuhan sebesar -15% sehingga tidak ada peningkatan dari tahun sebelumnya, yaitu dari total produksi tahun 2018 sebesar 19.433,44 ton menjadi 10.086,39 ton pada tahun 2022. Sebaran total produksi serealida selama 5 tahun terbesar terjadi pada tahun 2019, yaitu sebesar 25.945,40 ton dan terkecil pada tahun 200 Produksi serealida pertahun dan laju pertumbuhannya dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Produksi Total Serealida per Tahun dan Laju Pertumbuhan Produksi (2018-2022)

Kecamatan	Produksi Total Serealida (ton)					Laju Pertumbuhan 2018-2022 (%)
	2018	2019	2020	2021	2022	
1. Kotawaringin Lama	2.449,50	1.738,80	1.970,20	1.412,65	975,85	-21%
2. Arut Selatan	4.955,00	6.243,00	4.982,80	2.947,89	1.232,20	-29%
3. Kumai	3.522,70	6.510,70	5.458,50	3.497,07	2.289,82	-10%
4. Pangkalan Banteng	5.642,90	5.082,60	5.797,50	5.777,57	4.896,12	-3%
5. Pangkalan Lada	2.279,70	2.694,90	2.609,80	1.337,16	385,94	-36%
6. Arut Utara	583,70	3.675,50	3.631,60	2.081,77	306,47	-15%
Jumlah	19.433,50	25.945,50	24.450,40	17.054,11	10.086,39	-15%

Sumber: Kabupaten Dalam Angka 2019-2023, BPS & Statistik Pertanian 2018-2022, Dinas Pertanian Kobar



Grafik 2.3. Produksi Total Serealia per Tahun dan Laju Pertumbuhan Produksi (2018-2022)

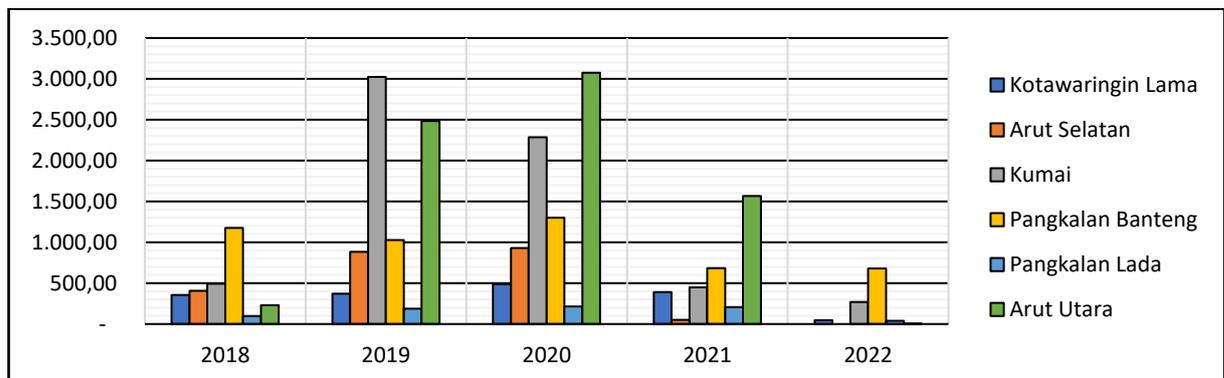
Padi

Produksi padi pada tingkat kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat selama 5 tahun terakhir (2018-2022) telah dianalisis dan disajikan pada Tabel 2.4. Produksi padi mengalami penurunan pada tahun 2022 di rata-rata semua kecamatan. Penurunan Produksi padi tertinggi di kecamatan Arut Selatan, dengan Persentase total turunnya produksi padi di Kabupaten Kotawaringin Barat dari tahun 2018 ke 2022 sebesar 62%.

Tabel 2.4. Produksi Padi 2018 - 2022 (Ton)

Kecamatan	Padi				
	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
1. Kotawaringin Lama	355,12	371,23	488,85	390,94	47,10
2. Arut Selatan	407,65	882,45	928,59	49,13	-
3. Kumai	491,09	3.022,47	2.286,95	448,69	271,19
4. Pangkalan Banteng	1.175,34	1.026,13	1.300,75	684,97	680,48
5. Pangkalan Lada	96,39	188,82	213,40	207,93	40,87
6. Arut Utara	231,91	2.484,15	3.073,79	1.568,33	3,13
Jumlah	2.757,50	7.975,25	8.292,33	3.349,99	1.042,76

Sumber: Kabupaten Dalam Angka 2019-2023, BPS & Statistik Pertanian 2018-2022, Dinas Pertanian Kobar



Grafik 2.4. Sebaran Produksi Padi 2018 - 2022 (Ton) Setiap Kecamatan

Jagung

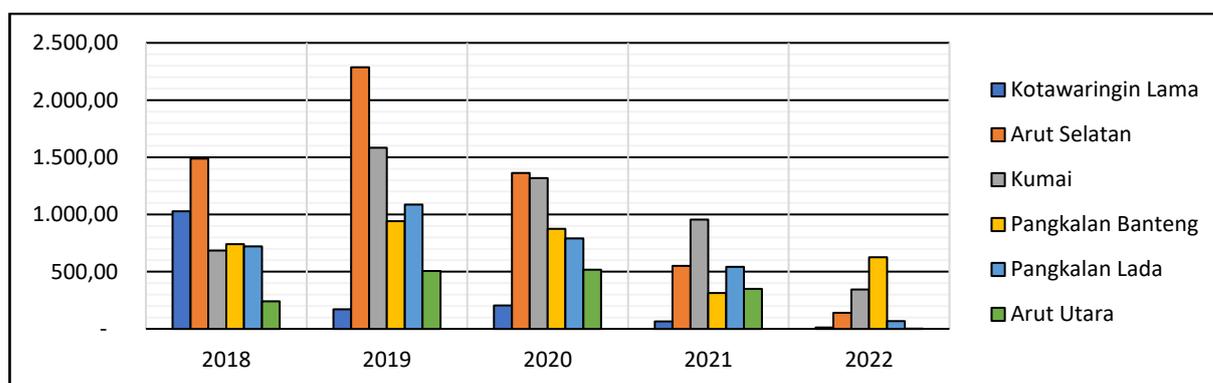
Pada tahun 2022, produksi jagung mencapai 1.192,61 ton. Hal ini menunjukkan terjadi penurunan 76%. Penurunan produksi pada tahun 2022 disebabkan bantuan sarana produksi

pertanaman dan benih kurang dikarenakan lahan eksis pertanaman yang semakin berkurang setiap tahunnya, selain itu juga minat akan petani untuk bertanam jagung berkurang. Sebaran produksi jagung terbesar terjadi pada tahun 2019, yaitu sebesar 6.574,60 ton. Kontribusi terbesar terjadi di Kecamatan Arut Selatan sebesar 2.286,10 ton, menyusul Kecamatan Kumai sebesar 1.582,80 ton dan terendah Kecamatan Kotawaringin Lama sebesar 171,80 ton. Secara rinci produksi jagung tahun 2018-2022 disajikan pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5. Produksi Jagung 2018 - 2022 (Ton)

Kabupaten	Jagung				
	2018	2019	2020	2021	2022
1. Kotawaringin Lama	1.029,25	171,80	204,31	66,21	13,47
2. Arut Selatan	1.488,53	2.286,10	1.361,82	550,62	141,22
3. Kumai	685,46	1.582,80	1.317,72	955,76	343,31
4. Pangkalan Banteng	741,80	940,30	873,72	313,76	626,25
5. Pangkalan Lada	719,99	1.086,70	791,97	541,76	67,86
6. Arut Utara	239,96	506,90	517,44	348,79	0,50
Jumlah	4.904,99	6.574,60	5.066,98	2.776,90	1.192,61

Sumber: Kabupaten Dalam Angka 2019-2023, BPS & Statistik Pertanian 2018-2022, Dinas Pertanian Kobar



Grafik 2.5. Produksi Jagung 2018 - 2022 (Ton)

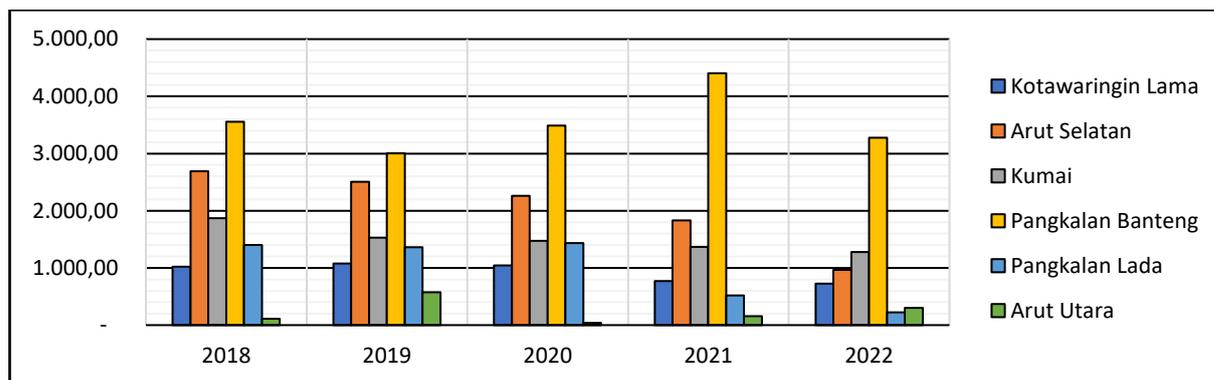
Ubi Kayu

Produksi ubi kayu menurun dari 10.648,25 ton pada tahun 2018 menjadi 6.767,87 ton pada tahun 2022. Daerah yang merupakan sentra produksi ubi kayu terbesar pada tahun 2022 meliputi kecamatan Pangkalan Banteng, Kumai, Arut Selatan dan Kotawaringin Lama Rincian produksi ubi kayu tahun 2018-2022 disajikan pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6. Produksi Ubi Kayu 2018 - 2022 (Ton)

Kecamatan	Ubi Kayu				
	2018	2019	2020	2021	2022
1. Kotawaringin Lama	1.021,73	1.077,00	1.043,86	768,22	723,88
2. Arut Selatan	2.688,30	2.507,80	2.260,77	1.833,41	963,38
3. Kumai	1.869,61	1.528,10	1.475,74	1.364,75	1.280,92
4. Pangkalan Banteng	3.555,98	3.001,90	3.487,96	4.403,05	3.277,64
5. Pangkalan Lada	1.400,80	1.360,10	1.431,88	520,62	220,66
6. Arut Utara	111,83	573,30	40,37	157,35	301,39
Jumlah	10.648,25	10.048,20	9.740,58	9.047,40	6.767,87

Sumber: Kabupaten Dalam Angka 2019-2023, BPS & Statistik Pertanian 2018-2022, Dinas Pertanian Kobar



Grafik 2.6. Produksi Ubi Kayu 2018 - 2022 (Ton)

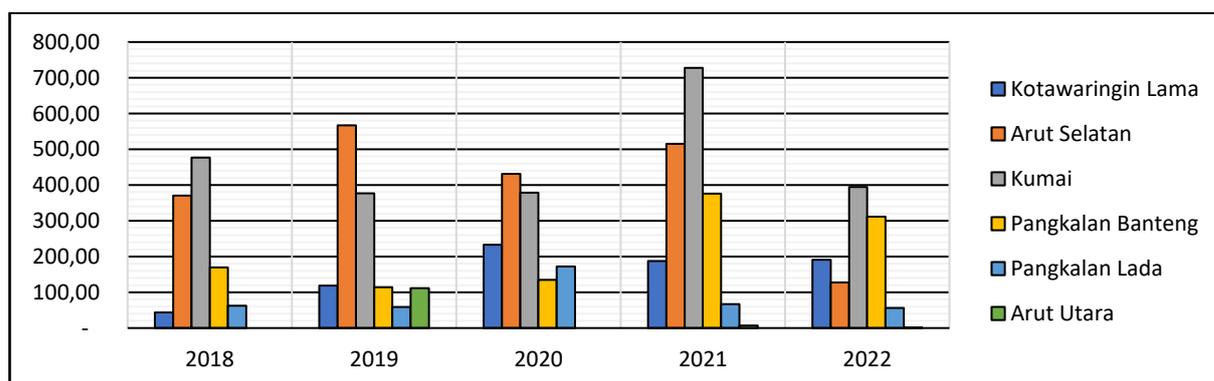
Ubi Jalar

Produksi ubi jalar terbesar selama kurun waktu 5 tahun (2018 - 2022) terjadi pada tahun 2021, yaitu sebesar 1.879,84 ton. Kecamatan Kumai merupakan penyumbang terbesar, yaitu sebesar 727,88 ton, Kecamatan Arut Selatan sebesar 514,73 ton, Kecamatan Pangkalan Banteng sebesar 375,79 ton dan Kecamatan Kotawaringin Lama sebesar 187,28 ton. Rincian produksi ubi jalar tahun 2018 - 2022 disajikan pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7. Produksi Ubi Jalar 2018 - 2022 (Ton)

Kabupaten	Ubi Jalar				
	2018	2019	2020	2021	2022
1. Kotawaringin Lama	43,44	118,80	233,22	187,28	191,40
2. Arut Selatan	370,53	566,60	431,61	514,73	127,60
3. Kumai	476,52	377,20	378,14	727,88	394,40
4. Pangkalan Banteng	169,76	114,30	135,11	375,79	311,75
5. Pangkalan Lada	62,48	59,20	172,53	66,85	56,55
6. Arut Utara	0,00	111,20	0,00	7,31	1,45
Jumlah	1.122,73	1.347,30	1.350,61	1.879,84	1.083,15

Sumber: Kabupaten Dalam Angka 2019-2023, BPS & Statistik Pertanian 2018-2022, Dinas Pertanian Kobar



Grafik 2.7. Produksi Ubi Jalar 2018 - 2022 (Ton)

2.3. SARANA DAN PRASARANA EKONOMI

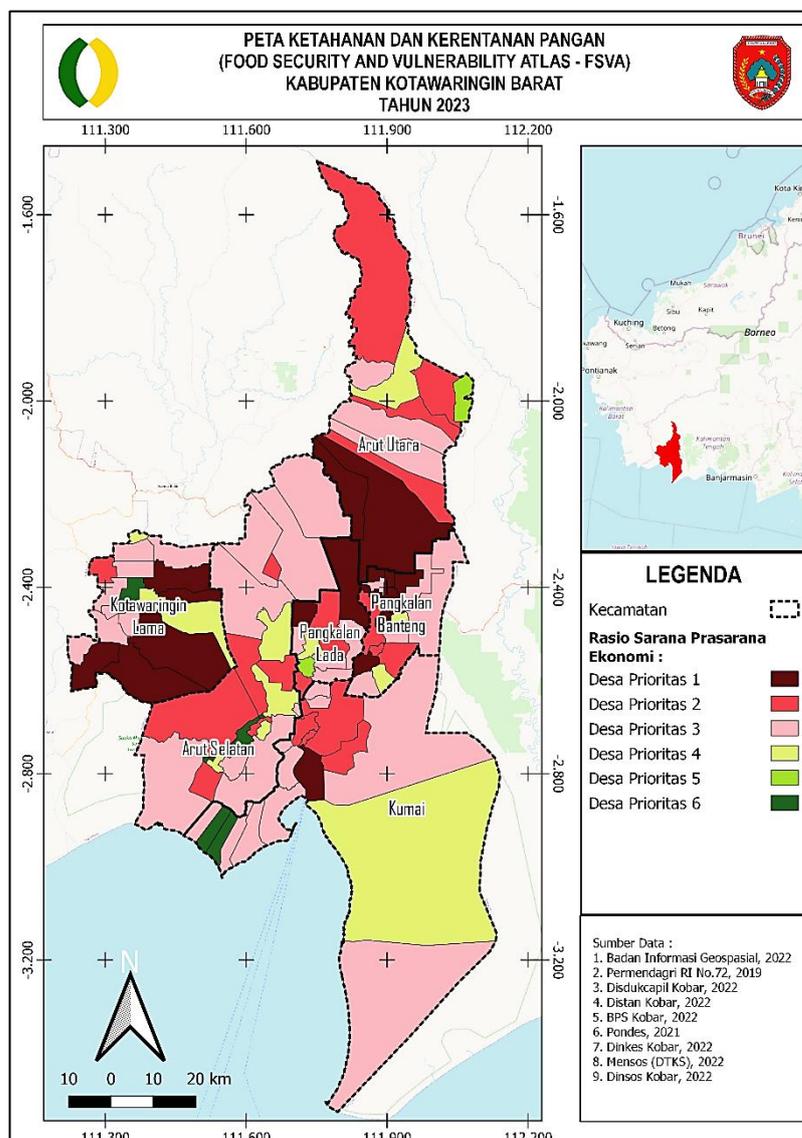
Rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga adalah perbandingan antara jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan (pasar, minimarket, toko, warung, restoran, dll) dengan jumlah rumah tangga di desa. Sarana dan prasarana

penyedia pangan diasumsikan sebagai tempat penyimpanan pangan (stok pangan) yang diperoleh dari petani sebagai produsen pangan maupun dari luar wilayah, yang selanjutnya disediakan bagi masyarakat untuk konsumsi. Oleh karena itu, semakin tinggi rasio sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga di desa maka diasumsikan semakin baik tingkat ketersediaan pangan di desa tersebut.

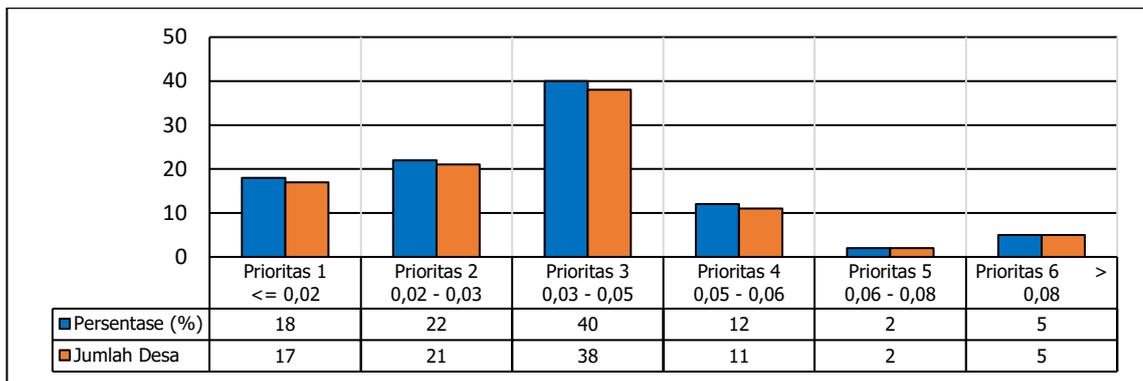
Dari 13 kelurahan 81 desa di Kabupaten Kotawaringin Barat, 17 desa masuk dalam prioritas 1 (18 %), 21 desa prioritas 2 (22 %) dan 38 desa prioritas 3 (40 %).

Tabel 2.8. Sebaran rasio sarana prasarana ekonomi berdasarkan prioritas

Prioritas	Rasio Sarana Ekonomi	Jumlah Desa	Persentase
1	$\leq 0,02$	17	18%
2	$0,02 - 0,03$	21	22%
3	$0,03 - 0,05$	38	40%
4	$0,05 - 0,06$	11	12%
5	$0,06 - 0,08$	2	2%
6	$> 0,08$	5	5%



Peta 2.2. Sebaran rasio sarana prasarana ekonomi terhadap jumlah rumah tangga berdasarkan prioritas



Grafik 2.8. Sebaran rasio sarana prasarana ekonomi terhadap jumlah rumah tangga berdasarkan prioritas

2.4. Strategi Pemenuhan Ketersediaan Pangan

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat dari tahun 2018-2022 mencapai 0,96% per tahun, sementara pertumbuhan produksi padi dan jagung mengalami penurunan yaitu -0,22% dan -0,30%. Rata-rata kepemilikan lahan petani di Kabupaten Kotawaringin Lama adalah sebesar 2 ha. Rasio lahan pertanian dibandingkan lahan total adalah sebesar 1,48449. Sementara itu laju konversi lahan sebesar -0,17%. Rasio sarana ekonomi penyedia pangan pada prioritas 1-3 mencapai 81%. Hal tersebut menjadi tantangan dalam pemenuhan ketersediaan pangan.

Strategi Pemenuhan Ketersediaan Pangan dan Sarana Prasarana Penyedia Pangan

Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 63 tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022, Kebijakan Perekonomian Daerah yaitu Pembangunan ekonomi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024 diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi yang ditunjukkan oleh kemampuan dalam pengelolaan dan penggunaan sumber daya ekonomi, dalam memproduksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi untuk memenuhi pasar dalam negeri dan ekspor. Hasilnya diharapkan mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas yang ditunjukkan dengan keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata.

Pembangunan ekonomi dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu: (1) pengelolaan sumber daya ekonomi, dan (2) peningkatan nilai tambah ekonomi. Kedua pendekatan ini menjadi landasan bagi sinergi dan keterpaduan kebijakan lintas sektor yang mencakup sektor pangan dan pertanian, kemaritiman, perikanan dan kelautan, industri pengolahan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital. Pelaksanaan kedua fokus tersebut didukung dengan perbaikan data untuk menjadi rujukan pemantauan dan evaluasi capaian pembangunan, serta perbaikan kualitas kebijakan.

Kebijakan kabupaten Kotawaringin Barat dalam memenuhi ketersediaan pangan pada RPJPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006-2025 Strategi untuk masing-masing tujuan adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian berupa Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian :

- Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi.
 - Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian.
2. Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian melalui Pengembangan Prasarana Pertanian yaitu,
 - Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B.
 - Pembangunan Prasarana Pertanian : Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian, Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani, Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya.
 3. Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian melalui Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota :
 - Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan.
 - Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan.
 - Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan.
 4. Peningkatan Penyuluhan Pertanian yaitu :
 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
 - Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
 - Pembentukan Badan Usaha Milik Petani.
 5. Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan melalui Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan dengan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
 6. Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan melalui Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
 - Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
 - Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
 - Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya berupa : Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan dan Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan.
 7. Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting berupa Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi.

BAB 3 AKSES TERHADAP PANGAN

Keterjangkauan pangan atau akses terhadap pangan adalah kemampuan rumah tangga untuk memperoleh cukup pangan, baik yang berasal dari produksi sendiri, stok, pembelian, barter, hadiah, pinjaman dan bantuan pangan. Pangan mungkin tersedia di suatu wilayah tetapi tidak dapat diakses oleh rumah tangga tertentu karena terbatasnya: (1) **Akses ekonomi:** kemampuan keuangan untuk membeli pangan yang cukup dan bergizi; (2) **Akses fisik:** keberadaan infrastruktur untuk mencapai sumber pangan; dan/atau (3) **Akses sosial:** modal sosial yang dapat digunakan untuk mendapatkan dukungan informal dalam mengakses pangan, seperti barter, pinjaman atau program jaring pengaman sosial. Dalam penyusunan FSVA Kabupaten, indikator yang digunakan dalam aspek keterjangkauan pangan hanya mewakili akses ekonomi dan fisik saja, yaitu: (1) Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk desa; dan (2) Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadamai melalui darat, air atau udara.

3.1. PENDUDUK DENGAN TINGKAT KESEJAHTERAAN TERENDAH

Berbagai program penanggulangan kemiskinan sudah dijalankan oleh pemerintah termasuk pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Rasio kemiskinan telah berkurang dalam beberapa tahun terakhir, jumlah penduduk miskin Kabupaten Kotawaringin Barat terus mengalami penurunan dari 3,95% (12.290 jiwa) tahun 2021 menjadi 3,93% (12.440 jiwa) tahun 2022.

Tabel 3.1. Persentase Populasi di Bawah Garis Kemiskinan Kabupaten Kotawaringin Barat

Keterangan	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase penduduk miskin	4,27%	4,11%	3,59%	3,95%	3,93%

Sumber: Kabupaten Dalam Angka, BPS

Tabel.3.2. Sebaran jumlah kelurahan/desa dengan tingkat kesejahteraan terendah berdasarkan skala prioritas per kecamatan.

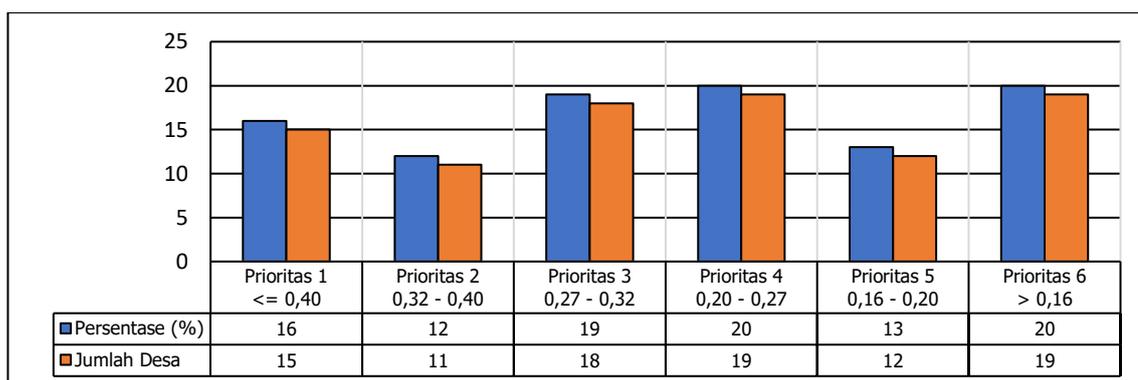
No.	Kecamatan	Prioritas						Jumlah Desa/ Kelurahan
		1	2	3	4	5	6	
1.	Arut Selatan	4	4	3	1	4	4	20
2.	Arut Utara	1	2	2	2	1	3	11
3.	Kotawaringin Lama	2	1	1	4	5	4	17
4.	Kumai	6	2	6	3	-	1	18
5.	Pangkalan Banteng	1	2	2	5	1	6	17
6.	Pangkalan Lada	1	-	4	4	1	1	11
Jumlah		15	11	18	19	12	19	94

Pada tingkat desa berdasarkan data Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin tahun 2022, terdapat 15 desa yang memiliki rasio rumah tangga dengan dengan tingkat kesejahteraan terendah diatas 16% (Prioritas 1). Sebanyak 11 desa (12%) masuk prioritas 2,

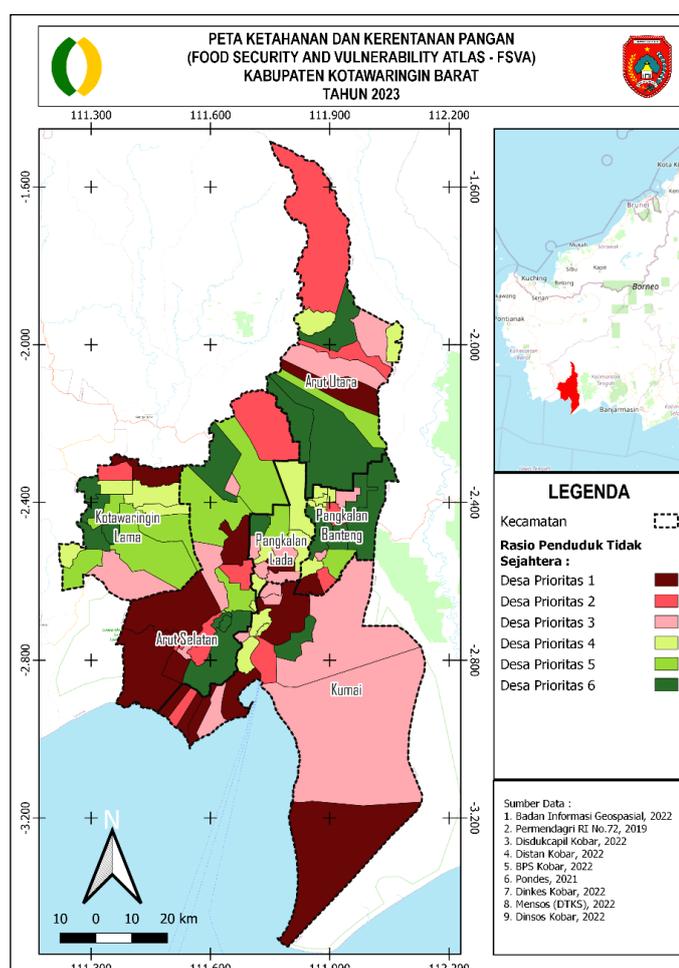
dan 18 desa (19%) masuk Prioritas 3. Oleh karena itu, program-program penanggulangan kemiskinan Kabupaten ke depan masih harus ditingkatkan dan diprioritaskan di 44 desa tersebut.

Tabel 3.3. Sebaran Rasio desa dengan tingkat kesejahteraan terendah berdasarkan skala prioritas

Prioritas	Rasio kesejahteraan terendah	Jumlah Desa	Persentase
1	$\geq 0,40$	15	16%
2	$0,32 < \dots < 0,40$	11	12%
3	$0,27 < \dots < 0,32$	18	19%
4	$0,20 < \dots < 0,27$	19	20%
5	$0,16 < \dots < 0,20$	12	13%
6	$< 0,16$	19	20%



Grafik 3.1. Sebaran Rasio desa dengan tingkat kesejahteraan terendah berdasarkan skala prioritas



Peta 3.1. Sebaran desa dengan tingkat kesejahteraan terendah berdasarkan skala prioritas

3.2. AKSES TRANSPORTASI

Kurangnya akses terhadap infrastruktur menyebabkan kemiskinan, dimana masyarakat yang tinggal di daerah terisolir atau terpencil dengan kondisi geografis yang sulit dan ketersediaan pasar yang buruk kurang memiliki kesempatan ekonomi dan pelayanan jasa yang memadai. Dengan kata lain, kelompok miskin ini masih kurang mendapatkan akses terhadap program pembangunan pemerintah. Investasi pada infrastruktur, khususnya infrastruktur transportasi (jalan, pelabuhan, bandara dan lain-lain), listrik, infrastruktur pertanian (irigasi), fasilitas pendidikan dan kesehatan dapat sepenuhnya mengubah suatu wilayah sehingga menciptakan landasan pertumbuhan ekonomi dan partisipasi yang lebih besar dari masyarakat yang tinggal di daerah terpencil.

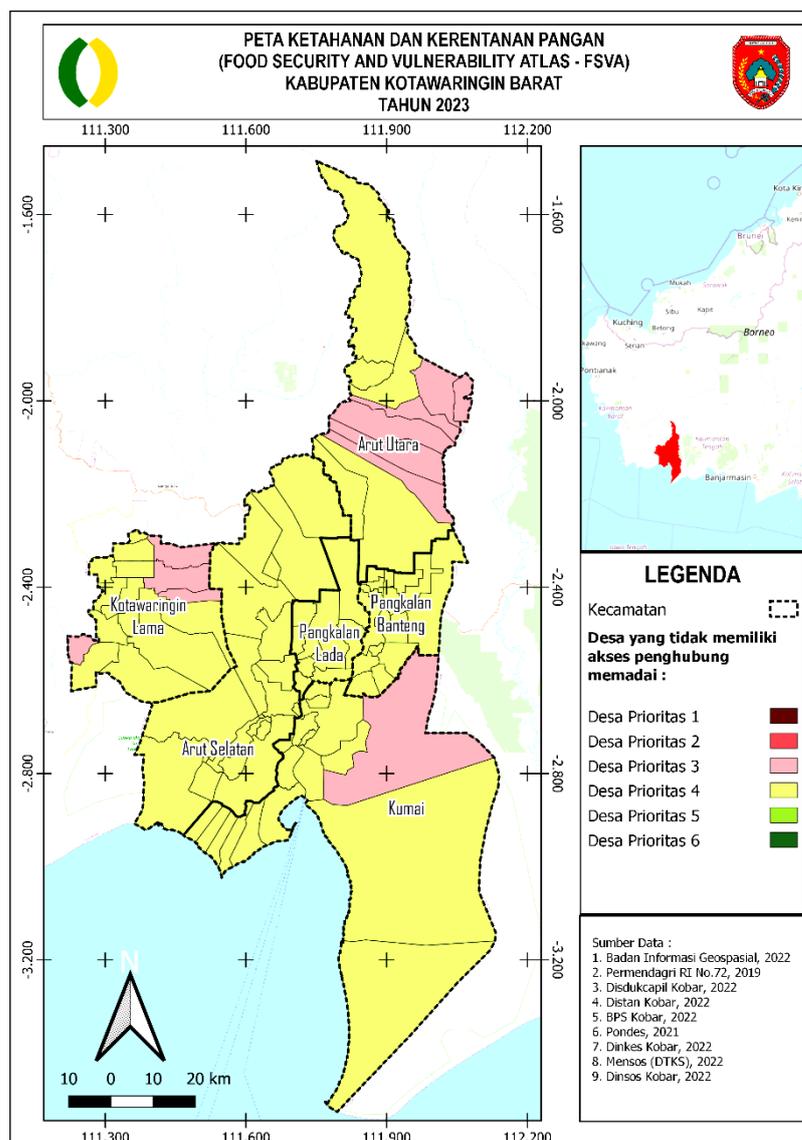
Pada sektor pertanian, faktor yang menyebabkan tingkat pendapatan yang rendah adalah rendahnya harga komoditas pertanian di tingkat petani/produsen (*farm gate price*) di daerah perdesaan dibandingkan dengan harga di perkotaan untuk komoditas dengan kualitas sama (komoditas belum diubah atau diproses). Rendahnya harga komoditas pertanian ditingkat petani merupakan akibat dari tingginya biaya transportasi untuk pemasaran hasil pertanian dari desa surplus. Biaya transportasi akan lebih tinggi pada moda kendaraan bermotor-melewati jalan setapak dan jalan kecil dengan tenaga manusia atau hewan, misalnya pada daerah yang tidak memiliki akses jalan yang memadai. Dalam sebuah kajian cepat mengenai penyebab kemiskinan pada desa terpencil di 5 kabupaten di Indonesia diketahui bahwa tingginya biaya transportasi merupakan penyebab utama terjadinya kemiskinan tersebut. Tingginya harga komoditas pertanian di tingkat petani akan meningkatkan pendapatan yang diterima oleh masyarakat petani. Walaupun demikian, peningkatan pendapatan saja tanpa dibarengi dengan perbaikan akses terhadap pelayanan jasa dan infrastruktur belum cukup untuk menjamin kesejahteraan masyarakat petani.

Keterbelakangan infrastruktur menghalangi laju perkembangan suatu wilayah. Infrastruktur yang lebih baik akan menarik investasi yang lebih besar pada berbagai sektor, yang pada akhirnya dapat menjadi daya dorong bagi kehidupan yang berkelanjutan.

Berdasarkan data PODES (Potensi Desa) 2012, BPS, di Kabupaten Kotawaringin Barat, hampir semua desa memiliki akses penghubung bagi kendaraan roda 4 sepanjang tahun.

Tabel 3.4. Sebaran desa dengan kategori/Kriteria akses transportasi

Prioritas	Kecamatan	Jumlah Desa	Nilai Kategori/Kriteria
1	-	0	(4) tidak dapat dilalui sepanjang tahun
2	-	0	(3) dapat dilalui selama musim kemarau
3	Kotawaringin Lama, Kumai, Arut Utara	11	(2) dapat dilalui sepanjang tahun kecuali saat tertentu (ketika turun hujan, pasang, dll.)
4	Kotawaringin Lama, Arut Selatan, Kumai, Pangkalan Banteng, Pangkalan Lada, Arut Utara	83	(1) dapat dilalui sepanjang tahun
Total	94		



Peta 3.2. Sebaran desa dengan kategori/Kriteria akses transportasi

Jalan merupakan moda transportasi utama di Kabupaten Kotawaringin Barat akan tetapi terdapat beberapa kecamatan di mana moda transportasi air masih menjadi bagian penting dari moda transportasinya. Kondisi geografis hanya memungkinkan menggunakan moda transportasi air. Masyarakat menggunakan perahu motor sebagai moda transportasinya, contohnya di wilayah Kecamatan Arut Selatan, Kumai dan Kotawaringin Lama. Data yang akurat untuk moda transportasi air tidak tersedia, jenis transportasi ini tidak dimasukkan sebagai salah satu indikator akses infrastruktur.

3.3 Strategi Peningkatan Akses Pangan

Strategi Pengurangan Kemiskinan, Peningkatan Akses terhadap Pangan

Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk menanggulangi kemiskinan seperti yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2023 - 2026 diantaranya:

1. Meningkatkan kualitas infrastruktur kabupaten melalui pemenuhan infrastruktur dasar dan penunjang perekonomian pada sektor unggulan.

- a. Berkolaborasi dengan penduduk setempat untuk meningkatkan efisiensi proses pengelolaan infrastruktur ;
 - b. Sinkronisasi proses pelayanan perizinan dengan perangkat atau instansi lain dalam rangka mendekatkan layanan kepada masyarakat ;
 - c. Optimalisasi pendanaan instansi vertikal dan CSR sektor swasta dalam upaya pengentasan kawasan kumuh dan penyediaan infrastruktur ;
 - d. Peninjauan kembali terhadap masterplan pengembangan infrastruktur daerah untuk mengakomodir IKN baru ;
 - e. Pemanfaatan GIS dalam pengelolaan tata ruang dan infrastruktur
2. Menciptakan stabilitas sosial melalui pemberdayaan untuk menekan Tingkat pengangguran dan Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Untuk menekan angka pengangguran maka pemberdayaan untuk menciptakan peluang menciptakan lapangan kerja sektor non formal. Sehingga arah kebijakan untuk menekan angka pengangguran adalah :
- a. Menciptakan wirausahawan muda untuk mengurangi ketergantungan lapangan kerja sektor formal ;
 - b. Meningkatkan skala usaha masyarakat ;
 - c. Optimalisasi sektor UMKM, Pertanian dan industri olahan dalam menciptakan peluang usaha;
 - d. Menyesuaikan kesiapan dan keterampilan pekerja lokal sesuai dengan kebutuhan pasar.

Adapun untuk menekan PMKS serta menjaga stabilitas ketentraman dan ketertiban di daerah, Pemerintah Kotawaringin Barat menetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi bantuan sosial untuk menekan angka PMKS ;
- b. Meningkatkan pemberdayaan terhadap PMKS ;
- c. Meningkatkan kompetensi SDM untuk penanganan PMKS ;
- d. Optimalisasi peran masyarakat dalam penanganan PMKS ;
- e. Keberpihakan pembangunan paMeningkatkan pemahaman akan pentingnya menjaga kondusifitas daerah dengan melibatkan semua golongan ;
- f. Optimalisasi peran Masyarakat khususnya keluarga dalam meningkatkan ketertiban dan ketentraman ;
- g. Meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan tanpa memandang gender ;
- h. Menekan penyebaran paham radikalisme dan terorismeda kelompok difable.

BAB 4 PEMANFAATAN PANGAN

Aspek ketiga dari konsep ketahanan pangan adalah pemanfaatan pangan. Pemanfaatan pangan meliputi: (1) Pemanfaatan pangan yang bisa di akses oleh rumah tangga; dan (2) Kemampuan individu untuk menyerap zat gizi secara efisien oleh tubuh. Pemanfaatan pangan juga meliputi cara penyimpanan, pengolahan, dan penyajian makanan termasuk penggunaan air selama proses pengolahannya serta kondisi budaya atau kebiasaan dalam pemberian makanan terutama kepada individu yang memerlukan jenis pangan khusus sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu (saat masa pertumbuhan, kehamilan, menyusui, dll) atau status kesehatan masing-masing individu.

Dalam penyusunan FSVA Kabupaten, aspek pemanfaatan pangan meliputi indikator sebagai berikut: (1) Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga; dan (2) Rasio jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk.

4.1. AKSES AIR BERSIH

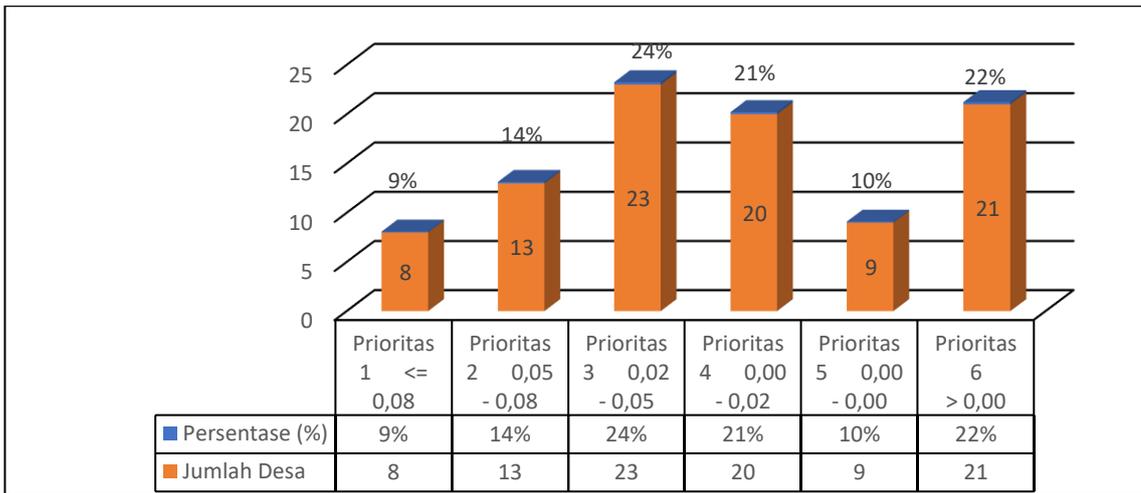
Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga merupakan perbandingan antara jumlah rumah tangga Desil 1-4 dengan sumber air bersih tidak terlindung dengan jumlah rumah tangga di desa. Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak⁴. Sumber air bersih yang tidak terlindungi berpotensi meningkatkan angka kesakitan serta menurunkan kemampuan dalam menyerap makanan yang pada akhirnya akan mempengaruhi status gizi individu.

Tabel 4.1. Sebaran desa berdasarkan rumah tangga tanpa akses air bersih berdasarkan skala prioritas

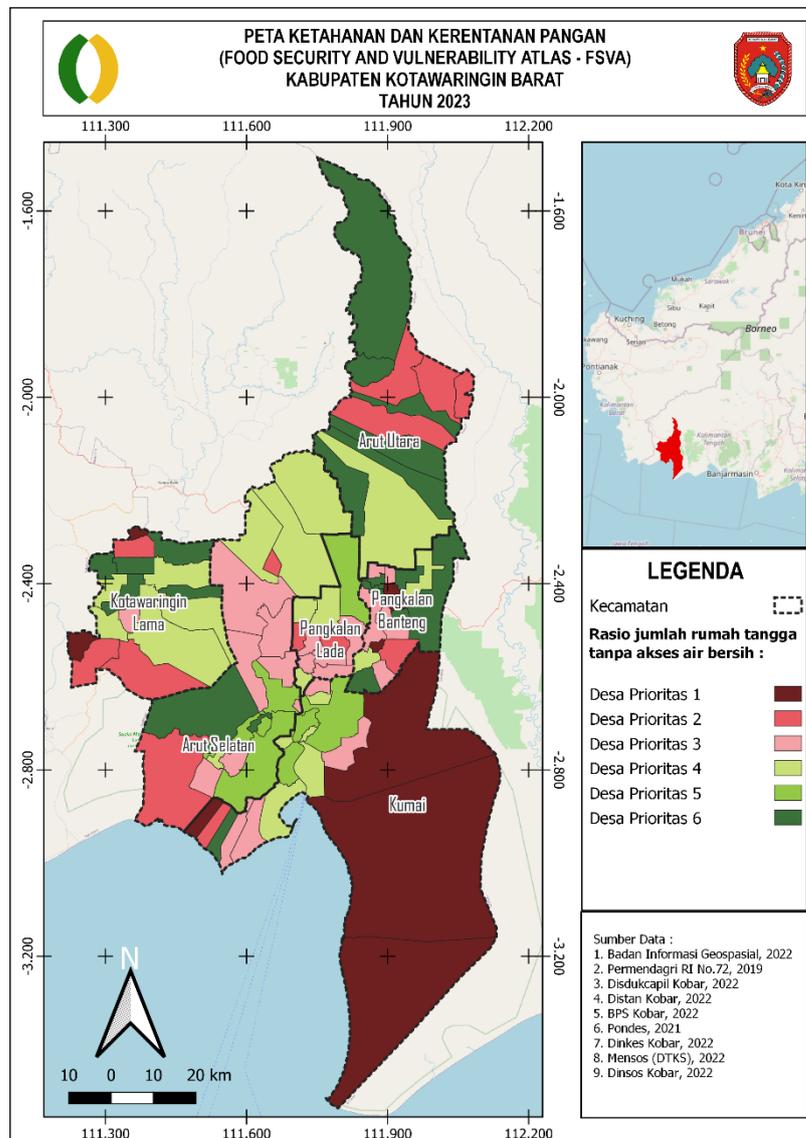
Prioritas	Range akses air bersih	Jumlah Desa	Persentase
1	$\geq 0,08$	8	9%
2	$0,05 < 0,08$	13	14%
3	$0,02 < 0,05$	23	24%
4	$0,00 < 0,02$	20	21%
5	$0,00 < 0,00$	9	10%
6	$< 0,00$	21	22%

Sebagian besar rumah tangga di Kabupaten Kotawaringin barat mengkonsumsi air yang bersumber dari air sungai, sumur tanah, sumur bor dan air PDAM. Berdasarkan data dari Perumda Tirta Arut (PDAM) Kotawaringin Barat sebanyak 29% rumah tangga yang sudah menggunakan air yang bersumber dari PDAM, dan sisanya 71% masih mengandalkan sumur tanah, sumur bor dan air sungai.

⁴ Permenkes 416 Tahun 1990



Grafik 4.1. Sebaran desa berdasarkan rumah tangga tanpa akses air bersih berdasarkan skala prioritas



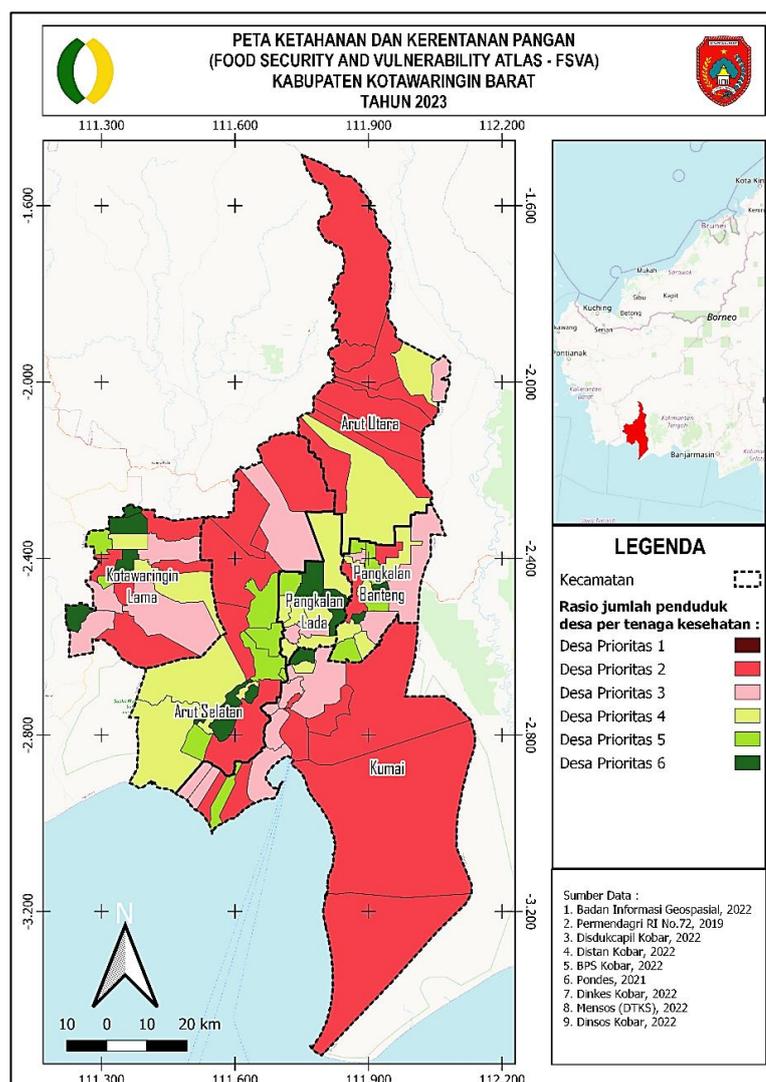
Peta 4.1. Sebaran desa berdasarkan rumah tangga tanpa akses air bersih berdasarkan skala prioritas.

4.2. RASIO TENAGA KESEHATAN

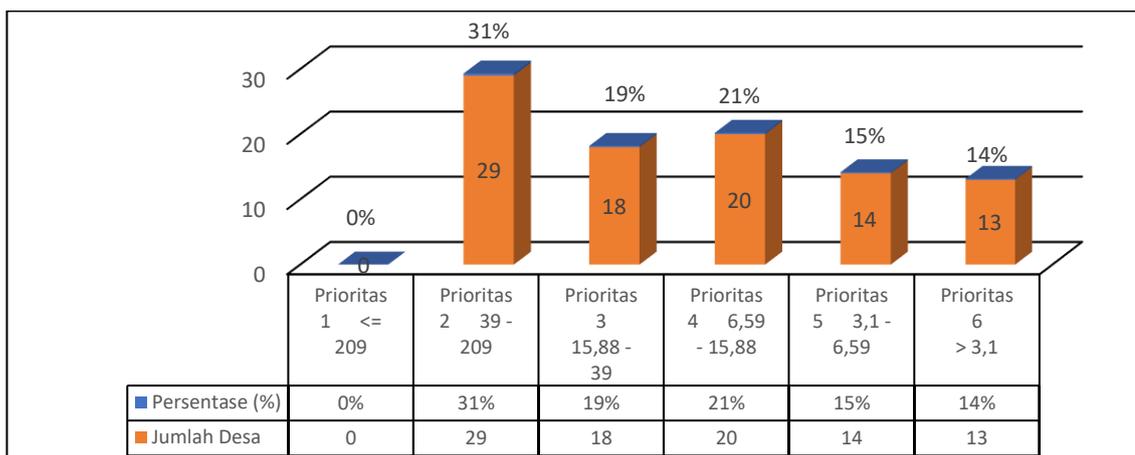
Rasio jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan yang terdiri dari: (1) Dokter umum/spesialis; (2) Dokter gigi; (3) Bidan; dan (4) Tenaga kesehatan lainnya (perawat, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, apoteker/asisten apoteker) dibandingkan dengan kepadatan penduduk. Tenaga kesehatan berperan penting dalam menurunkan angka kesakitan penduduk (morbiditas) dan meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya makanan yang beragam bergizi seimbang dan aman. Rasio jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk menunjukkan kemampuan jumlah tenaga kesehatan yang ada di wilayah desa untuk melayani masyarakat. Jumlah tenaga kesehatan yang memadai akan meningkatkan status pemanfaatan pangan masyarakat.

Tabel 4.2. Sebaran rasio tenaga kesehatan di desa berdasarkan skala prioritas

Prioritas	Range tenaga kesehatan	Jumlah Desa	Persentase
1	\geq 209	0	0%
2	39 - < 209	29	31%
3	15,88 - < 39	18	19%
4	6,59 - < 15,88	20	21%
5	3,1 - < 6,59	14	15%
6	< 3,1	13	14%



Peta 4.2. Sebaran rasio tenaga kesehatan di desa berdasarkan skala prioritas



Grafik 4.2. Sebaran rasio tenaga kesehatan di desa berdasarkan skala prioritas

4.3 DAMPAK (OUTCOME) DARI STATUS KESEHATAN

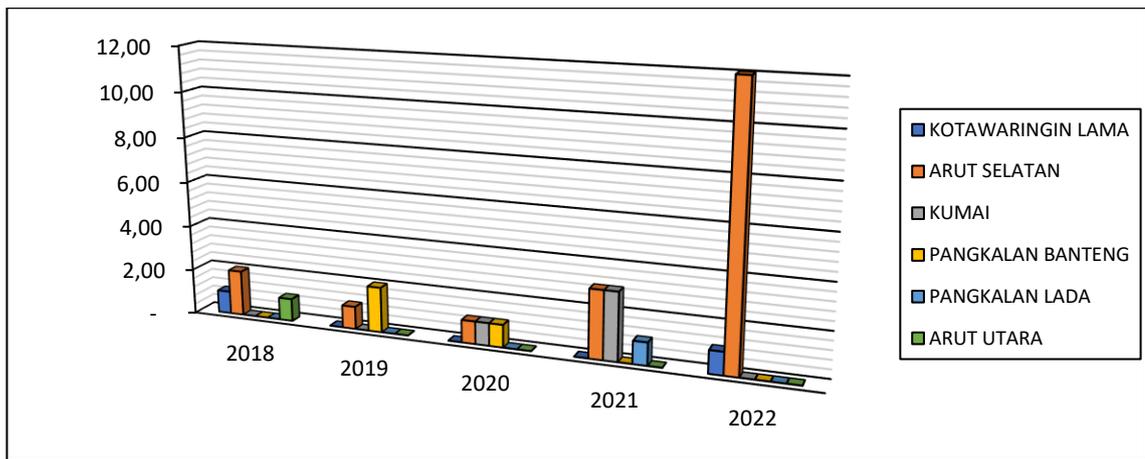
Ketahanan pangan merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi status kesehatan dan gizi masyarakat. Status gizi anak ditentukan oleh asupan makanan dan penyakit yang dideritanya. Status gizi anak balita diukur dengan 3 indikator yaitu:

1. Berat Badan Kurang dan Berat Badan Sangat Kurang yang biasa dikenal dengan underweight (berat badan berdasarkan umur (BB/U) dengan Zscore dari -2 dari median menurut referensi WHO 2005, yang mengacu kepada gabungan dari kurang gizi akut dan kronis);
2. Pendek atau stunting (tinggi badan berdasarkan umur (TB/U) dengan Zscore kurang dari -2 dari median menurut referensi WHO 2005, yang mengacu ke kurang gizi kronis jangka panjang); dan
3. Kurus atau wasting (berat badan berdasarkan tinggi badan (BB/TB) dengan Zscore kurang dari -2 dari median menurut referensi WHO 2005, yang mengacu kepada kurang gizi akut atau baru saja mengalami kekurangan gizi).

Jumlah penderita gizi buruk di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2018-2022 sebanyak 13 balita. Jumlah penderita gizi buruk yang tinggi ditemukan di Kecamatan Arut Selatan (12 balita) dan terendah ditemukan di Kecamatan Kotawaringin Lama (1 balita).

Tabel 4.2. Penderita Gizi Buruk 2018-2022

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Penderita Gizi Buruk				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Kotawaringin Lama	1	-	-	-	1
2.	Arut Selatan	2	1	1	3	12
3.	Kumai	-	-	1	3	-
4.	Pangkalan Banteng	-	2	1	-	-
5.	Pangkalan Lada	-	-	-	1	-
6.	Arut Utara	1	-	-	-	-
	Jumlah	4	3	3	7	13

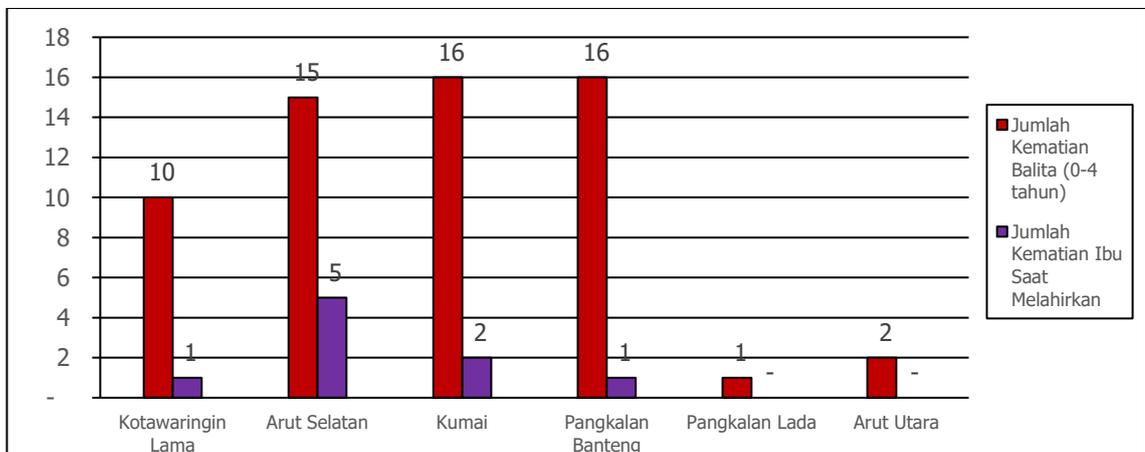


Gambar 4.3. Grafik Penderita Gizi Buruk

Angka kematian balita dan ibu saat melahirkan merupakan dampak dari status kesehatan dan gizi. Angka kematian balita di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah 60 jiwa. Sementara angka kematian ibu saat melahirkan di Kabupaten Kotawaringin Barat 9 jiwa. Angka kematian balita tertinggi terdapat di Kecamatan Kumai (16 jiwa) dan terendah terdapat di Kecamatan Pangkalan Lada (1 jiwa). Angka kematian ibu saat melahirkan tertinggi di Kecamatan Arut Selatan (5 jiwa) dan terendah di Kecamatan Pangkalan Lada (0 jiwa). Untuk lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3. Jumlah Kematian Balita dan Ibu Saat Melahirkan per Kecamatan tahun 2022

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kematian Balita (0-4 tahun) (jiwa)	Jumlah Kematian Ibu Saat Melahirkan (jiwa)	Total
1.	Kotawaringin Lama	10	1	11
2.	Arut Selatan	15	5	20
3.	Kumai	16	2	18
4.	Pangkalan Banteng	16	1	17
5.	Pangkalan Lada	1	-	1
6.	Arut Utara	2	-	2
	Jumlah	60	9	69



Grafik 4.4. Grafik Jumlah Kematian Balita dan Ibu Saat Melahirkan per Kecamatan

4.4. Strategi Peningkatan Pemanfaatan Pangan

Strategi Untuk Memperbaiki Status Gizi dan Kesehatan Kelompok Rentan

Dalam RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 Strategi untuk memperbaiki status gizi dan kesehatan masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat, adalah sebagai berikut :

- Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP
- Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
- Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
- Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah
- Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten
- Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM
- Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan

Masalah gizi kronis (stunting) masih tetap tinggi di Kabupaten Kotawaringin Barat, masalah gizi kronis merupakan akibat kurang optimalnya pertumbuhan janin dan bayi di usia dua tahun pertama kehidupannya, terutama gabungan dari kurangnya asupan gizi, paparan terhadap penyakit yang tinggi serta pola pengasuhan yang kurang tepat. Semua faktor ini dapat menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki, yang akhirnya dapat menyebabkan meningkatnya beban penyakit dan kematian pada balita.

Kurang gizi pada usia dini, terutama stunting dapat menghambat perkembangan fisik dan mental yang akhirnya mempengaruhi prestasi dan tingkat kehadiran di sekolah. Anak yang kurang gizi lebih cenderung untuk masuk sekolah lebih lambat dan lebih cepat putus sekolah. Dampak ke masa depannya adalah mempengaruhi potensi kemampuan mencari nafkah, sehingga sulit keluar dari lingkaran kemiskinan. Anak yang menderita kurang berat badan menurut umur (kurang gizi) dan secara cepat berat badannya meningkat, maka pada saat dewasa cenderung untuk menderita penyakit kronik yang terkait gizi (kencing manis, tekanan darah tinggi dan penyakit jantung koroner). Dampak jangka panjang, oleh kurang gizi pada masa anak-anak juga menyebabkan rendahnya tinggi badan dan pada ibu-ibu dapat melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR), yang akhirnya menyebabkan terulangnya lingkaran masalah ini pada generasi selanjutnya.

Untuk menurunkan prevalensi stunting, maka intervensi gizi harus segera direncanakan dan dilakukan secara efektif pada semua tingkatan, mulai dari rumah tangga sampai tingkat nasional. Untuk mencegah dan mengatasi masalah kekurangan gizi secara efektif, perlu prioritas untuk kelompokrentan gizi, memahami penyebab kurang gizi adalah multidimensi, intervensi yang tepat dan efektif untuk mengatasi penyebabnya, dan meningkatkan komitmen serta investasi dalam bidang gizi. Berikut ini adalah rekomendasi untuk mengatasi masalah gizi:

1. Fokus pada kelompok rentan gizi, termasuk :

- a. Anak usia di bawah dua tahun. Usia dua tahun pertama di dalam kehidupan adalah usia yang paling kritis sehingga disebut "jendela peluang (*window of opportunity*)" karena mencegah kurang gizi pada usia ini akan sangat berarti untuk kelompok ini pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Meskipun kerusakan sudah terjadi dan seharusnya dihindari sejak dari usia 9 bulan sampai usia 24 bulan, kerentanan anak terhadap penyakit dan resiko kematian masih tinggi di usia lima tahun pertama. Itulah sebabnya banyak intervensi kesehatan dan gizi yang difokuskan pad anak di bawah lima

tahun. Intervensi kesehatan dan gizi harus difokuskan pada anak di bawah dua tahun, akan tetapi apabila anggaran memadai maka perlu dilakukan juga untuk anak di bawah lima tahun.

- b. Anak-anak kurang gizi ringan. Kelompok ini memiliki resiko lebih tinggi untuk meninggal karena meningkatnya kerentanan terhadap infeksi. Anak yang terdeteksi kurang gizi seharusnya di rawat dengan tepat untuk mencegah mereka menjadi gizi buruk.
- c. Ibu hamil dan menyusui, karena kelompok ini memerlukan kecukupan gizi bagi pertumbuhan dan perkembangan janin, dan untuk menghasilkan ASI (Air Susu Ibu) untuk bayi mereka.
- d. Kurang gizi mikro untuk semua kelompok umur, terutama pada anak-anak, ibu hamil dan menyusui. Kekurangan gizi mikro pada semua kelompok umur cukup tinggi disebabkan karena asupan karbohidrat yang tinggi, rendahnya asupan protein (hewani) sayur dan buah serta makanan yang berfortifikasi. Pada kondisi ini biasanya prevalensi stunting pada balita juga cukup tinggi.

2. Perencanaan dan penerapan intervensi multi-sektoral untuk mengatasi TIGA penyebab dasar kekurangan gizi (pangan, kesehatan dan pengasuhan).

Satu sektor saja (sektor kesehatan atau pendidikan atau pertanian) tidak dapat mengatasi masalah gizi secara efektif karena masalah tersebut adalah multi sektor.

- a. Intervensi langsung dengan manfaat langsung terhadap gizi (terutama melalui Sektor Kesehatan):
 - Memperbaiki gizi dan pelayanan ibu hamil, terutama selama 2 trimester pertama usia kehamilan: makan lebih sering, beraneka ragam, dan bergizi; minum pil besi atau menggunakan suplemen gizi mikro tabor (Sprinkle) setiap hari; memeriksakan kehamilan sekurangnya 4 kali selama periode kehamilan.
 - Promosi menyusui ASI selama 0-24 bulan: inisial menyusui dini segera sesudah bayi lahir; menyusui ASI eksklusif sampai 6 bulan pertama, melanjutkan pemberian ASI sampai 24 bulan; melanjutkan menyusui walaupun anak sakit.
 - Meningkatkan pola pemberian makanan tambahan untuk anak usia 6-24 bulan; mulai pemberian makanan tambahan sejak anak berusia 7 bulan; pemberian makanan lebih sering, jumlah sedikit, beraneka ragam dan bergizi (pangan hewani, telur, kacang-kacangan, polong-polongan, kacang tanah, sayur, buah dan minyak); hindari pemberian jajan yang tidak sehat.
 - Pemantauan berat dan tinggi badan bayi 0-24 bulan atau jika sumber daya memungkinkan, untuk anak 0-59 bulan secara teratur, untuk mendeteksi kurang gizi secara dini sehingga bias dilakukan intervensi sedini mungkin. Meningkatkan komunikasi mengenai berat badan anak, cara mencegah dan memperbaiki kegagalan berat dan tinggi anak dengan keluarga.
 - Mengatasi masalah kurang gizi akut pada balita dengan menyediakan fasilitas dan manajemen berbasis masyarakat berdasarkan pedoman dari WHO/UNICEF dan Departemen Kesehatan.
 - Memperbaiki asupan gizi mikro: promosi garam beryodium; penganekaragaman asupan makanan; fortifikasi makanan; pemberian pil besi untuk ibu hamil; pemberian vitamin A setiap 6 bulan sekali untuk anak 6-24 bulan (atau anak 6-59 bulan jika alokasi anggaran mencukupi), serta ibu menyusui dalam jangka waktu 1 bulan setelah melahirkan atau masa nifas; pemberian obat cacing.
- b. Intervensi tidak langsung dengan manfaat tidak langsung terhadap gizi (terutama melalui sektor di luar kesehatan)

3. Prioritas dan peningkatan investasi serta komitmen dalam hal gizi untuk mengatasi masalah gizi.

Dampak ekonomi akibat kekurangan gizi pada anak-anak adalah sangat tinggi. Kekurangan gizi pada anak akan menyebabkan hilangnya produktivitas pada masa dewasa, dan tingginya biaya pelayanan kesehatan dan pendidikan. Ada beberapa macam bentuk dari malnutrisi pada masa anak-anak yang dapat menyebabkan hilangnya produktivitas mereka pada masa dewasa yang berkaitan dengan rendahnya kemampuan kognitif. Kekurangan energi-protein berkontribusi sebesar 10% dari hilangnya produktivitas pada masa dewasa, kekurangan zat besi (anemia) berkontribusi sebesar 4% dan kekurangan zat yodium sebesar 10%. Malnutrisi pada masa anak-anak juga berpotensi menyebabkan hilangnya produktivitas tenaga kerja kasar.

BAB 5

KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KOMPOSIT

Sebagaimana disebutkan di dalam Bab 1, bahwa kondisi kerentanan terhadap kerawanan pangan kronis secara komposit ditentukan berdasarkan 6 indikator yang berhubungan dengan ketersediaan pangan, akses pangan dan penghidupan, serta pemanfaatan pangan dan gizi, yang dijelaskan secara rinci pada Bab Dua, Tiga dan Empat. Peta kerentanan terhadap kerawanan pangan komposit (Peta 5.1) ditetapkan melalui Analisis Pembobotan.

5.1. KONDISI KETAHANAN PANGAN

Peta komposit menjelaskan kondisi kerentanan terhadap kerawanan pangan suatu wilayah (kecamatan) yang disebabkan oleh kombinasi dari berbagai dimensi kerawanan pangan. Berdasarkan hasil pembobotan, desa-desa dikelompokkan ke dalam 6 prioritas. Prioritas 1 merupakan prioritas utama yang menggambarkan tingkat kerentanan yang paling tinggi, sedangkan prioritas 6 merupakan prioritas yang relatif lebih tahan pangan. Dengan kata lain, wilayah (desa) prioritas 1 memiliki tingkat resiko kerentanan terhadap kerawanan pangan yang lebih besar dibandingkan wilayah (desa) lainnya sehingga memerlukan perhatian segera. Meskipun demikian, wilayah (desa) yang berada pada prioritas 1 tidak berarti semua penduduknya berada dalam kondisi rawan pangan, juga sebaliknya wilayah (desa) pada prioritas 6 tidak berarti semua penduduknya tahan pangan.

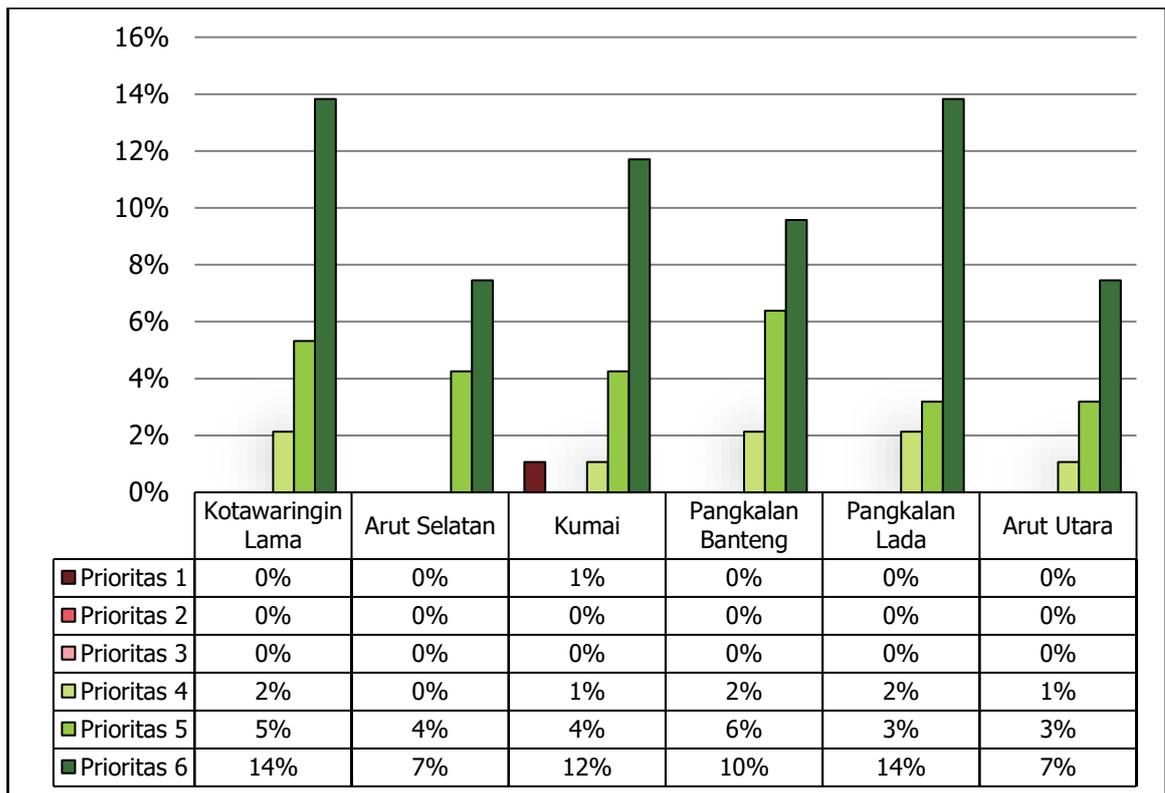
Berdasarkan hasil analisis tersebut, dari 13 kelurahan 81 desa dengan total 94 kelurahan/desa yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat maka didapatkan 1 desa (Prioritas 1), 0 desa (Prioritas 2), 0 desa (Prioritas 3), 8 desa (Prioritas 4), 26 desa (Prioritas 5) dan 59 desa (Prioritas 6).

Tabel 5.1. Sebaran Jumlah dan Persentase Desa berdasarkan Prioritas

Prioritas	Jumlah Desa	Persentase
1	1	1%
2	-	0%
3	-	0%
4	8	9%
5	26	28%
6	59	63%

Desa rentan terhadap kerawanan pangan prioritas 1 terdapat di wilayah **Kecamatan Kumai** yaitu **desa Sungai Cabang**.

Desa rentan terhadap kerawanan pangan prioritas 2 dan prioritas 3, pada analisis tidak ada kelurahan/desa masuk dalam prioritas 2 dan prioritas 3. Berikut pada grafik 5.2 dan tabel 5.2 sebaran jumlah dan persentase desa Prioritas Per Kecamatan tahun 2023.



Grafik 5.1. Sebaran Jumlah Persentase Desa Prioritas Komposit Per Kecamatan tahun 2023.

Tabel.5.2. Sebaran Kelurahan/Desa Dengan Berdasarkan Skala Prioritas per Kecamatan

No.	Kecamatan	Prioritas						Jumlah Desa/ Kelurahan
		1	2	3	4	5	6	
1.	Arut Selatan	-	-	-	2	5	13	20
2.	Arut Utara	-	-	-	-	4	7	11
3.	Kotawaringin Lama	1	-	-	1	4	11	17
4.	Kumai	-	-	-	2	6	9	17
5.	Pangkalan Banteng	-	-	-	2	3	13	18
6.	Pangkalan Lada	-	-	-	1	3	7	11
Jumlah		1	-	-	8	25	60	94

Uraian Kelurahan/desa rentan terhadap kerawanan pangan berdasarkan skala prioritas :

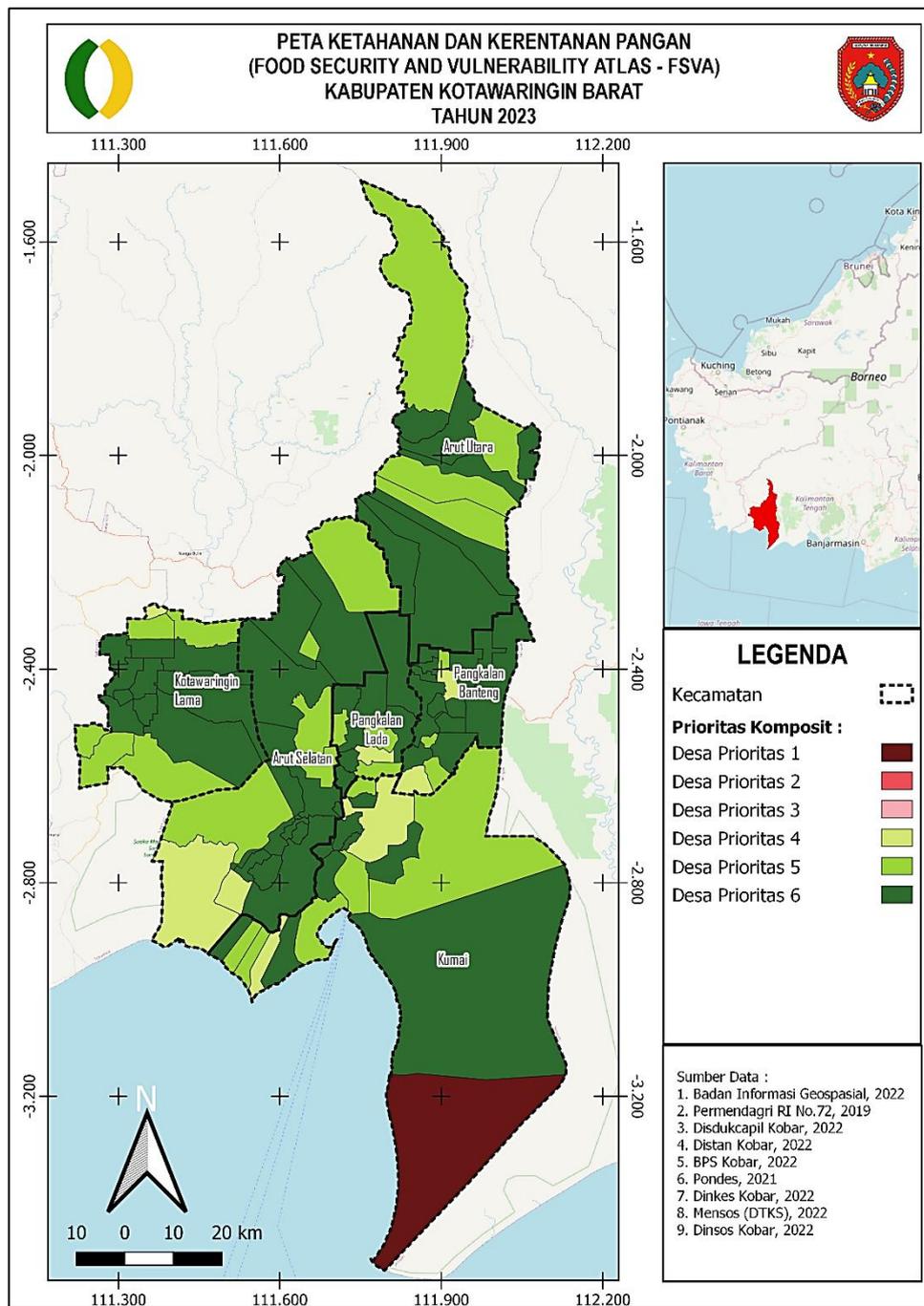
1. **Prioritas 1** terdapat di wilayah
 - a) Kecamatan Kumai, yaitu Desa Sungai Cabang.
2. **Prioritas 2** terdapat di wilayah tidak ada.
3. **Prioritas 3** terdapat di wilayah tidak ada.
4. **Prioritas 4** terdapat di wilayah
 - a) Kecamatan Arut Selatan, yaitu : Desa Tanjung Putri dan Desa Tanjung Terantang.
 - b) Kecamatan Kotawaringin Lama, yaitu : Desa Palih Baru.
 - c) Kecamatan Kumai, yaitu : Kelurahan Kumai Hulu dan Desa Teluk Bogam.
 - d) Kecamatan Pangkalan Banteng, yaitu : Desa Sungai Hijau dan Desa Sungai Pulau.
 - e) Kecamatan Pangkalan Lada, yaitu : Desa Sungai Rangit Jaya.

5. **Prioritas 5** terdapat di wilayah

- a) Kecamatan Arut Selatan, yaitu : Kelurahan Mendawai Seberang, Desa Kenambui, Desa Medang Sari, Desa Natai Baru dan Desa Umpang.
- b) Kecamatan Arut Utara, yaitu : Desa Gandis, Desa Kerabu, Desa Panahan, dan Desa Sambi.
- c) Kecamatan Kotawaringin Lama, yaitu : Desa Babual Baboti, Desa Ipuh Bangun Jaya, Desa Kondang, Desa Sumber Mukti, dan Desa Tempayung.
- d) Kecamatan Kumai, yaitu : Desa Bumi Harjo, Desa Kelurahan Kumai Hilir, Desa Keraya, Desa Kubu, Desa Sebuai Timur, dan Desa Sungai Sekonyer.
- e) Kecamatan Pangkalan Banteng, yaitu : Desa Berambai Makmur, Desa Karang Sari, dan Desa Kebun Agung.
- f) Kecamatan Pangkalan Lada, yaitu : Desa Kadipi Atas, Desa Lada Mandala Jaya, dan Desa Pangkalan Durin.

6. **Prioritas 6** terdapat di wilayah

- a) Kecamatan Arut Selatan, yaitu : Kelurahan Baru, Kelurahan Madurejo, Kelurahan Mendawai, Kelurahan Raja, Kelurahan Raja Seberang, Kelurahan Sidorejo, Kumpai Batu Atas, Kumpai Batu Bawah, Desa Natai Raya, Desa Pasir Panjang, Desa Rangda, Desa Runtu, dan Desa Sulung.
- b) Kecamatan Arut Utara, yaitu : Kelurahan Pangkut, Desa Nanga Mua, Desa Pandau, Desa Penyombean, Desa Riam, Desa Sukarami, dan Desa Sungai Dau.
- c) Kecamatan Kotawaringin Lama, yaitu : Desa Dawak, Kelurahan Kotawaringin Hilir, Kelurahan Kotawaringin Hulu, Desa Kinjil, Desa Lalang, Desa Riam Durian, Desa Rungun, Desa Sagu Suka Mulya, Desa Sakabulin, Desa Suka Jaya, dan Desa Suka Makmur.
- d) Kecamatan Kumai, yaitu : Desa Batu Belaman, Kelurahan Candi, Desa Pangkalan Satu, Desa Sabuai, Desa Sungai Bakau, Desa Sungai Bedaun, Desa Sungai Kapitan, Desa Sungai Tendang, dan Desa Teluk Pulau.
- e) Kecamatan Pangkalan Banteng, yaitu : Desa Amin Jaya, Desa Arga Mulya, Desa Karang Mulya, Desa Marga Mulya, Desa Mulya Jadi, Desa Natai Kerbau, Desa Pangkalan Banteng, Desa Sido Mulyo, Desa Simpang Berambai, Desa Sungai Bengkuang, Desa Sungai Kuning, dan Desa Sungai Pakit.
- f) Kecamatan Pangkalan Lada, yaitu : Desa Makarti Jaya, Desa Pandu Sanjaya, Desa Pangkalan Dewa, Desa Pangkalan Tiga, Desa Purbasari, Desa Sumber Agung, dan Desa Sungai Melawen.



Peta 5.1. Peta Komposit Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas-FSVA*) Kabupaten Kotawaringin Barat 2023

5.2. FAKTOR PENYEBAB KERENTANAN PANGAN

Dari 94 kelurahan dan desa yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat, terdapat 93 (99%) kelurahan/desa yang tahan pangan (prioritas 4-6) dan sejumlah 1 desa (1%) dalam kondisi rentan pangan (prioritas 1-3). Desa rentan terhadap kerawanan pangan secara umum disebabkan oleh:

- 1) Lahan pertanian yang masih kurang produktif dan tidak optimal,
- 2) Tingginya jumlah penduduk yang tidak sejahtera,
- 3) Banyaknya rumah tangga tanpa akses air bersih,
- 4) Kurangnya tenaga kesehatan, dan
- 5) Jumlah sarana penyedia pangan yang kurang mencukupi.

Perbedaan prioritas pada daerah rawan pangan di sebabkan adanya perbedaan rasio hasil analisis indikator penyebab kerawanan pangan.

Tabel 5.3. Faktor yang mempengaruhi di daerah rentan pangan berdasarkan bobot.

PRIORITAS KOMPOSIT	Prioritas 1
1. Bobot Rasio Lahan	3
2. Bobot Rasio Sarana	1
3. Bobot Rasio Penduduk Tidak Sejahtera	3
4. Bobot Akses Jalan	0
5. Bobot Rasio Tanpa Air Bersih	3
6. Bobot Rasio Penduduk per Tenaga kesehatan per Density	2

Berdasarkan hasil analisis, maka **aspek pemanfaatan pangan** yaitu **indikator rasio jumlah tenaga kesehatan per kepadatan penduduk** dan **rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih** memiliki sumbangan terbesar dalam menyebabkan terjadinya kerentanan pangan. Rata-rata skor Indikator Individu, Indeks Ketersediaan, Indeks Akses, Indeks Pemanfaatan dan Indeks Komposit di **Prioritas Rentan (1 - 3)** dan **Prioritas tahan pangan (prioritas 4–6)** adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4. Rata-Rata Skor dan indeks Indikator Ketahanan dan Kerentanan Pangan Pada Desa Rentan Pangan (Prioritas 1 - 3)

Jenis Indikator	Nilai Rata-Rata
Skor Rasio Lahan Pertanian terhadap luas wilayah desa	-
Skor Rasio Sarana dan Prasarana Penyedia Pangan	9,81
Skor Rasio Penduduk Tidak Sejahtera	12,66
Skor desa yg tidak memiliki Akses Penghubung	100,00
Skor Rasio Rumah Tangga Tanpa Akses Air Bersih	9,85
Skor Rasio Jumlah Tenaga Kesehatan	100,00
INDEKS KETERSEDIAAN	4,91
INDEKS AKSES	56,33
INDEKS PEMANFAATAN	54,92
INDEKS KOMPOSIT	38,72

Tabel 5.5. Rata-Rata Skor dan indeks Indikator Ketahanan dan Kerentanan Pangan Pada Desa tahan pangan (Prioritas 4 - 6)

Jenis Indikator	Nilai Rata-Rata
Skor Rasio Lahan Pertanian terhadap luas wilayah desa	4,37
Skor Rasio Sarana dan Prasarana Penyedia Pangan	7,81
Skor Rasio Penduduk Tidak Sejahtera	75,98
Skor desa yg tidak memiliki Akses Penghubung	100,00
Skor Rasio Rumah Tangga Tanpa Akses Air Bersih	93,48
Skor Rasio Jumlah Tenaga Kesehatan	100,00
INDEKS KETERSEDIAAN	6,09
INDEKS AKSES	87,99
INDEKS PEMANFAATAN	96,74
INDEKS KOMPOSIT	63,61

BAB 6 REKOMENDASI KEBIJAKAN

Penyebab kerentanan terhadap kerawanan pangan pada suatu wilayah berbeda dengan wilayah lainnya, dengan demikian cara penyelesaiannya juga berbeda. Peta ini membantu memahami keadaan diantara wilayah (desa), dan dengan demikian akan membantu para pengambil kebijakan untuk dapat menentukan langkah-langkah yang tepat dalam menangani isu-isu ketahanan pangan yang relevan di wilayahnya.

Fokus lokasi penanganan kerentanan pangan di wilayah desa diprioritaskan pada:

- Desa-desanya prioritas 1-3 yang tersebar di Kecamatan Kumai
- Desa-desanya yang lokasinya jauh dari ibu kota kabupaten atau di wilayah yang berbatasan dengan kabupaten lain
- Desa-desanya di Kepulauan yang menghadapi kendala akses fisik terhadap sumber pangan.
- Desa-desanya pemekaran yang fasilitas, infrastruktur dan kapasitas SDMnya masih terbatas.

Upaya-upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan ditekankan pada penyebab utama kerentanan pangan di desa seperti digambarkan pada diagram di bawah ini.

Gambar 6.1. Kerangka Intervensi untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan



Program-program peningkatan ketahanan pangan dan menangani kerentanan pangan desa diarahkan pada kegiatan:

- a. Pengembangan lahan sawah, optimalisasi penggunaan lahan, mengimbangi alih fungsi lahan, pengembangan dan rehabilitasi Jaringan Irigasi, peningkatan produktivitas, pengolahan/perbaikan tanah, Memperkuat pengawasan peningkatan produktivitas pertanian, Penguatan kelembagaan petani, dan Pengurangan dampak iklim dan Organisme Pengganggu Tumbuhan.
- b. Penanganan kemiskinan melalui penyediaan lapangan kerja, padat karya, redistribusi lahan; pembangunan infrastruktur dasar (jalan, listrik, rumah sakit), dan pemberian bantuan sosial; serta pembangunan usaha produktif/UMKM/padat karya untuk menggerakkan ekonomi wilayah.
- c. Peningkatan akses air bersih melalui penyediaan fasilitas dan layanan air bersih; sosialisasi, penyuluhan dan pembangunan fasilitas air bersih.
- d. Penyediaan tenaga kesehatan dan fasilitas tenaga Kesehatan.
- e. Pengembangan dan pembangunan sarana perekonomian berupa fasilitas pasar dan pertokoan di tingkat desa/kelurahan, serta penyediaan fasilitas pasokan bahan pangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kab.Kotawaringin Barat, 2019. *Kotawaringin Barat Dalam Angka 2019*. Kab.Kotawaringin Barat : Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Kab.Kotawaringin Barat, 2020. *Kotawaringin Barat Dalam Angka 2020*. Kab.Kotawaringin Barat : Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Kab.Kotawaringin Barat, 2021. *Kotawaringin Barat Dalam Angka 2021*. Kab.Kotawaringin Barat : Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Kab.Kotawaringin Barat, 2022. *Kotawaringin Barat Dalam Angka 2022*. Kab.Kotawaringin Barat : Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Kab.Kotawaringin Barat, 2023. *Kotawaringin Barat Dalam Angka 2023*. Kab.Kotawaringin Barat : Badan Pusat Statistik.
- Badan Pangan Nasional Republik Indonesia, 2023. *Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia No.164.4/KG.01.01/K6/2023 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Peta Ketahanan Dan Kerentanan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023*. Jakarta : Badan Pangan Nasional Republik Indonesia.
- Committee On World Food Security (CFS), 2012. *36th sessions of 15-22 October 2012 Final Report*. Rome-Italia.
- Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kab.Kotawaringin Barat, 2020. *Database Statistik Pertanian Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019*. Kab.Kotawaringin Barat : Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan.
- Menteri Kesehatan, 1990. *Peraturan Menteri Kesehatan No. 416 Tahun 1990 Tentang : Syarat-syarat Dan Pengawasan Kualitas Air*. Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- Muhamad Dika Yudhistira, 2013. *Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Ketahanan Pangan Di Kabupaten Bekasi Jawa Barat (Studi Kasus Desa Sriamur Kecamatan Tambun Utara)*. Bogor. Departemen Ekonomi Sumberdaya Dan Lingkungan Fakultas Ekonomi Dan Manajemen Institut Pertanian Bogor.
- PEMKAB Kotawaringin Barat, 2022. *Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 – 2026 Kabupaten Kotawaringin Barat*. Pangkalan Bun : PEMKAB Kab. Kotawaringin Barat.
- PEMKAB Kotawaringin Barat, 2022. *PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 63 TAHUN 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022*. Pangkalan Bun : PEMKAB Kab. Kotawaringin Barat.
- UNSCN (UN System Standing Committee on Nutrition), 2013. *Meeting Of The Minds And Nutrition Impact Of Food Systems, 25-28 March 2013*. New York. Funded by the Flemish International Cooperation Agency (FICA).

LAMPIRAN

Lampiran 1. Tabel Sebaran Prioritas Desa Berdasarkan Indikator Aspek Ketersediaan Pangan Rasio Luas Lahan Pertanian Terhadap Jumlah Penduduk.

No.	Nama Kec	Kode Kec	Kode Desa	Nama Desa	1. P.Lahan
1	Arut Selatan	6201021	6201021009	Kelurahan Baru	1
2	Arut Selatan	6201021	6201021005	Kelurahan Madurejo	4
3	Arut Selatan	6201021	6201021003	Kelurahan Mendawai	4
4	Arut Selatan	6201021	6201021002	Kelurahan Mendawai Seberang	1
5	Arut Selatan	6201021	6201021007	Kelurahan Raja	1
6	Arut Selatan	6201021	6201021008	Kelurahan Raja Seberang	5
7	Arut Selatan	6201021	6201021006	Kelurahan Sidorejo	1
8	Arut Selatan	6201022	6201022011	Kenambui	1
9	Arut Selatan	6201022	6201022015	Kumpai Batu Atas	6
10	Arut Selatan	6201022	6201022014	Kumpai Batu Bawah	6
11	Arut Selatan	6201022	6201022017	Medang Sari	1
12	Arut Selatan	6201022	6201022018	Natai Baru	6
13	Arut Selatan	6201022	6201022016	Natai Raya	5
14	Arut Selatan	6201022	6201022004	Pasir Panjang	1
15	Arut Selatan	6201022	6201022010	Rangda	4
16	Arut Selatan	6201022	6201022012	Runtu	5
17	Arut Selatan	6201022	6201022020	Sulung	5
18	Arut Selatan	6201022	6201022001	Tanjung Putri	6
19	Arut Selatan	6201022	6201022019	Tanjung Terantang	6
20	Arut Selatan	6201022	6201022013	Umpang	1
21	Arut Utara	6201042	6201042004	Gandis	1
22	Arut Utara	6201041	6201041002	Kelurahan Pangkut	4
23	Arut Utara	6201042	6201042005	Kerabu	1
24	Arut Utara	6201042	6201042001	Nanga Mua	1
25	Arut Utara	6201042	6201042010	Panahan	1
26	Arut Utara	6201042	6201042008	Pandau	4
27	Arut Utara	6201042	6201042007	Penyombaan	6
28	Arut Utara	6201042	6201042009	Riam	1
29	Arut Utara	6201042	6201042006	Sambi	5
30	Arut Utara	6201042	6201042003	Sukarami	6
31	Arut Utara	6201042	6201042011	Sungai Dau	1
32	Kotawaringin Lama	6201032	6201032001	Babul Baboti	6
33	Kotawaringin Lama	6201032	6201032005	Dawak	1
34	Kotawaringin Lama	6201032	6201032016	Ipuh Bangun Jaya	1
35	Kotawaringin Lama	6201031	6201031008	Kelurahan Kotawaringin Hilir	4
36	Kotawaringin Lama	6201031	6201031007	Kelurahan Kotawaringin Hulu	5
37	Kotawaringin Lama	6201032	6201032004	Kinjil	1
38	Kotawaringin Lama	6201032	6201032011	Kondang	1
39	Kotawaringin Lama	6201032	6201032009	Lalang	6
40	Kotawaringin Lama	6201032	6201032015	Palih Baru	5
41	Kotawaringin Lama	6201032	6201032006	Riam Durian	1
42	Kotawaringin Lama	6201032	6201032010	Rungun	5
43	Kotawaringin Lama	6201032	6201032017	Sagu Suka Mulya	1
44	Kotawaringin Lama	6201032	6201032003	Sakabulin	1
45	Kotawaringin Lama	6201032	6201032012	Suka Jaya	1
46	Kotawaringin Lama	6201032	6201032013	Suka Makmur	1
47	Kotawaringin Lama	6201032	6201032014	Sumber Mukti	6
48	Kotawaringin Lama	6201032	6201032002	Tempayang	1
49	Kumai	6201012	6201012009	Batu Belaman	1
50	Kumai	6201012	6201012017	Bumi Harjo	4
51	Kumai	6201011	6201011011	Kelurahan Candi	1
52	Kumai	6201011	6201011013	Kelurahan Kumai Hilir	5
53	Kumai	6201011	6201011012	Kelurahan Kumai Hulu	1
54	Kumai	6201012	6201012004	Keraya	1
55	Kumai	6201012	6201012007	Kubu	5
56	Kumai	6201012	6201012032	Pangkalan Satu	4
57	Kumai	6201012	6201012003	Sabuai	6
58	Kumai	6201012	6201012034	Sebuai Timur	1

59	Kumai	6201012	6201012006	Sungai Bakau	6
60	Kumai	6201012	6201012015	Sungai Bedaun	1
61	Kumai	6201012	6201012001	Sungai Cabang	1
62	Kumai	6201012	6201012008	Sungai Kapitan	4
63	Kumai	6201012	6201012014	Sungai Sekonyer	6
64	Kumai	6201012	6201012010	Sungai Tendang	1
65	Kumai	6201012	6201012005	Teluk Bogam	1
66	Kumai	6201012	6201012002	Teluk Pulai	6
67	Pangkalan Banteng	6201062	6201062007	Amin Jaya	1
68	Pangkalan Banteng	6201062	6201062008	Arga Mulya	5
69	Pangkalan Banteng	6201062	6201062013	Berambai Makmur	6
70	Pangkalan Banteng	6201062	6201062003	Karang Mulya	1
71	Pangkalan Banteng	6201062	6201062014	Karang Sari	6
72	Pangkalan Banteng	6201062	6201062004	Kebun Agung	1
73	Pangkalan Banteng	6201062	6201062006	Marga Mulya	1
74	Pangkalan Banteng	6201062	6201062002	Mulya Jadi	4
75	Pangkalan Banteng	6201062	6201062009	Natai Kerbau	4
76	Pangkalan Banteng	6201062	6201062001	Pangkalan Banteng	5
77	Pangkalan Banteng	6201062	6201062005	Sido Mulyo	1
78	Pangkalan Banteng	6201062	6201062010	Simpang Berambai	1
79	Pangkalan Banteng	6201062	6201062016	Sungai Bengkuang	1
80	Pangkalan Banteng	6201062	6201062011	Sungai Hijau	1
81	Pangkalan Banteng	6201062	6201062017	Sungai Kuning	1
82	Pangkalan Banteng	6201062	6201062012	Sungai Pakit	1
83	Pangkalan Banteng	6201062	6201062015	Sungai Pulau	1
84	Pangkalan Lada	6201052	6201052009	Kadipi Atas	1
85	Pangkalan Lada	6201052	6201052003	Lada Mandala Jaya	1
86	Pangkalan Lada	6201052	6201052004	Makarti Jaya	5
87	Pangkalan Lada	6201052	6201052002	Pandu Sanjaya	1
88	Pangkalan Lada	6201052	6201052008	Pangkalan Dewa	4
89	Pangkalan Lada	6201052	6201052011	Pangkalan Durin	1
90	Pangkalan Lada	6201052	6201052001	Pangkalan Tiga	1
91	Pangkalan Lada	6201052	6201052006	Purbasari	5
92	Pangkalan Lada	6201052	6201052005	Sumber Agung	1
93	Pangkalan Lada	6201052	6201052010	Sungai Melawen	1
94	Pangkalan Lada	6201052	6201052007	Sungai Rangit Jaya	1

Lampiran 2. Tabel Sebaran Prioritas Desa Berdasarkan Indikator Aspek Ketersediaan Pangan Rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga.

No.	Nama Kec	Kode Kec	Kode Desa	Nama Desa	2. P.Sarana
1	Arut Selatan	6201021	6201021009	Kelurahan Baru	4
2	Arut Selatan	6201021	6201021005	Kelurahan Madurejo	4
3	Arut Selatan	6201021	6201021003	Kelurahan Mendawai	6
4	Arut Selatan	6201021	6201021002	Kelurahan Mendawai Seberang	2
5	Arut Selatan	6201021	6201021007	Kelurahan Raja	6
6	Arut Selatan	6201021	6201021008	Kelurahan Raja Seberang	2
7	Arut Selatan	6201021	6201021006	Kelurahan Sidorejo	2
8	Arut Selatan	6201022	6201022011	Kenambui	2
9	Arut Selatan	6201022	6201022015	Kumpai Batu Atas	3
10	Arut Selatan	6201022	6201022014	Kumpai Batu Bawah	4
11	Arut Selatan	6201022	6201022017	Medang Sari	4
12	Arut Selatan	6201022	6201022018	Natai Baru	2
13	Arut Selatan	6201022	6201022016	Natai Raya	3
14	Arut Selatan	6201022	6201022004	Pasir Panjang	3
15	Arut Selatan	6201022	6201022010	Rangda	3
16	Arut Selatan	6201022	6201022012	Runtu	3
17	Arut Selatan	6201022	6201022020	Sulung	3
18	Arut Selatan	6201022	6201022001	Tanjung Putri	3
19	Arut Selatan	6201022	6201022019	Tanjung Terantang	2
20	Arut Selatan	6201022	6201022013	Umpang	3
21	Arut Utara	6201042	6201042004	Gandis	3
22	Arut Utara	6201041	6201041002	Kelurahan Pangkut	1
23	Arut Utara	6201042	6201042005	Kerabu	3
24	Arut Utara	6201042	6201042001	Nanga Mua	1
25	Arut Utara	6201042	6201042010	Panahan	2
26	Arut Utara	6201042	6201042008	Pandau	4
27	Arut Utara	6201042	6201042007	Penyombaan	2
28	Arut Utara	6201042	6201042009	Riam	3
29	Arut Utara	6201042	6201042006	Sambi	2
30	Arut Utara	6201042	6201042003	Sukarami	2
31	Arut Utara	6201042	6201042011	Sungai Dau	5
32	Kotawaringin Lama	6201032	6201032001	Babual Baboti	1
33	Kotawaringin Lama	6201032	6201032005	Dawak	3
34	Kotawaringin Lama	6201032	6201032016	Ipuh Bangun Jaya	3
35	Kotawaringin Lama	6201031	6201031008	Kelurahan Kotawaringin Hilir	1
36	Kotawaringin Lama	6201031	6201031007	Kelurahan Kotawaringin Hulu	4
37	Kotawaringin Lama	6201032	6201032004	Kinjil	3
38	Kotawaringin Lama	6201032	6201032011	Kondang	3
39	Kotawaringin Lama	6201032	6201032009	Lalang	1
40	Kotawaringin Lama	6201032	6201032015	Palih Baru	4
41	Kotawaringin Lama	6201032	6201032006	Riam Durian	6
42	Kotawaringin Lama	6201032	6201032010	Rungun	1
43	Kotawaringin Lama	6201032	6201032017	Sagu Suka Mulya	2
44	Kotawaringin Lama	6201032	6201032003	Sakabulin	3
45	Kotawaringin Lama	6201032	6201032012	Suka Jaya	3
46	Kotawaringin Lama	6201032	6201032013	Suka Makmur	3
47	Kotawaringin Lama	6201032	6201032014	Sumber Mukti	3
48	Kotawaringin Lama	6201032	6201032002	Tempayang	1
49	Kumai	6201012	6201012009	Batu Belaman	3
50	Kumai	6201012	6201012017	Bumi Harjo	3
51	Kumai	6201011	6201011011	Kelurahan Candi	2
52	Kumai	6201011	6201011013	Kelurahan Kumai Hilir	1
53	Kumai	6201011	6201011012	Kelurahan Kumai Hulu	2
54	Kumai	6201012	6201012004	Keraya	6
55	Kumai	6201012	6201012007	Kubu	3
56	Kumai	6201012	6201012032	Pangkalan Satu	3
57	Kumai	6201012	6201012003	Sabuai	3
58	Kumai	6201012	6201012034	Sebuai Timur	6

59	Kumai	6201012	6201012006	Sungai Bakau	3
60	Kumai	6201012	6201012015	Sungai Bedaun	2
61	Kumai	6201012	6201012001	Sungai Cabang	3
62	Kumai	6201012	6201012008	Sungai Kapitan	3
63	Kumai	6201012	6201012014	Sungai Sekonyer	3
64	Kumai	6201012	6201012010	Sungai Tendang	2
65	Kumai	6201012	6201012005	Teluk Bogam	3
66	Kumai	6201012	6201012002	Teluk Pulai	4
67	Pangkalan Banteng	6201062	6201062007	Amin Jaya	3
68	Pangkalan Banteng	6201062	6201062008	Arga Mulya	1
69	Pangkalan Banteng	6201062	6201062013	Berambai Makmur	2
70	Pangkalan Banteng	6201062	6201062003	Karang Mulya	4
71	Pangkalan Banteng	6201062	6201062014	Karang Sari	4
72	Pangkalan Banteng	6201062	6201062004	Kebun Agung	1
73	Pangkalan Banteng	6201062	6201062006	Marga Mulya	1
74	Pangkalan Banteng	6201062	6201062002	Mulya Jadi	1
75	Pangkalan Banteng	6201062	6201062009	Natai Kerbau	2
76	Pangkalan Banteng	6201062	6201062001	Pangkalan Banteng	2
77	Pangkalan Banteng	6201062	6201062005	Sido Mulyo	3
78	Pangkalan Banteng	6201062	6201062010	Simpang Berambai	3
79	Pangkalan Banteng	6201062	6201062016	Sungai Bengkuang	1
80	Pangkalan Banteng	6201062	6201062011	Sungai Hijau	1
81	Pangkalan Banteng	6201062	6201062017	Sungai Kuning	1
82	Pangkalan Banteng	6201062	6201062012	Sungai Pakit	3
83	Pangkalan Banteng	6201062	6201062015	Sungai Pulau	3
84	Pangkalan Lada	6201052	6201052009	Kadipi Atas	3
85	Pangkalan Lada	6201052	6201052003	Lada Mandala Jaya	2
86	Pangkalan Lada	6201052	6201052004	Makarti Jaya	1
87	Pangkalan Lada	6201052	6201052002	Pandu Sanjaya	2
88	Pangkalan Lada	6201052	6201052008	Pangkalan Dewa	3
89	Pangkalan Lada	6201052	6201052011	Pangkalan Durin	3
90	Pangkalan Lada	6201052	6201052001	Pangkalan Tiga	1
91	Pangkalan Lada	6201052	6201052006	Purbasari	2
92	Pangkalan Lada	6201052	6201052005	Sumber Agung	5
93	Pangkalan Lada	6201052	6201052010	Sungai Melawen	4
94	Pangkalan Lada	6201052	6201052007	Sungai Rangit Jaya	3

Lampiran 3. Sebaran Prioritas Desa Berdasarkan Indikator Aspek Akses terhadap Pangan Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk.

No.	Nama Kec	Kode Kec	Kode Desa	Nama Desa	3. P.Tdk Sejah
1	Arut Selatan	6201021	6201021009	Kelurahan Baru	5
2	Arut Selatan	6201021	6201021005	Kelurahan Madurejo	6
3	Arut Selatan	6201021	6201021003	Kelurahan Mendawai	2
4	Arut Selatan	6201021	6201021002	Kelurahan Mendawai Seberang	1
5	Arut Selatan	6201021	6201021007	Kelurahan Raja	5
6	Arut Selatan	6201021	6201021008	Kelurahan Raja Seberang	3
7	Arut Selatan	6201021	6201021006	Kelurahan Sidorejo	6
8	Arut Selatan	6201022	6201022011	Kenambui	3
9	Arut Selatan	6201022	6201022015	Kumpai Batu Atas	2
10	Arut Selatan	6201022	6201022014	Kumpai Batu Bawah	3
11	Arut Selatan	6201022	6201022017	Medang Sari	1
12	Arut Selatan	6201022	6201022018	Natai Baru	2
13	Arut Selatan	6201022	6201022016	Natai Raya	4
14	Arut Selatan	6201022	6201022004	Pasir Panjang	6
15	Arut Selatan	6201022	6201022010	Rangda	5
16	Arut Selatan	6201022	6201022012	Runtu	5
17	Arut Selatan	6201022	6201022020	Sulung	6
18	Arut Selatan	6201022	6201022001	Tanjung Putri	1
19	Arut Selatan	6201022	6201022019	Tanjung Terantang	1
20	Arut Selatan	6201022	6201022013	Umpang	2
21	Arut Utara	6201042	6201042004	Gandis	1
22	Arut Utara	6201041	6201041002	Kelurahan Pangkut	6
23	Arut Utara	6201042	6201042005	Kerabu	3
24	Arut Utara	6201042	6201042001	Nanga Mua	6
25	Arut Utara	6201042	6201042010	Panahan	2
26	Arut Utara	6201042	6201042008	Pandau	6
27	Arut Utara	6201042	6201042007	Penyombaan	2
28	Arut Utara	6201042	6201042009	Riam	4
29	Arut Utara	6201042	6201042006	Sambi	3
30	Arut Utara	6201042	6201042003	Sukarami	5
31	Arut Utara	6201042	6201042011	Sungai Dau	4
32	Kotawaringin Lama	6201032	6201032001	Babual Baboti	3
33	Kotawaringin Lama	6201032	6201032005	Dawak	6
34	Kotawaringin Lama	6201032	6201032016	Ipuh Bangun Jaya	2
35	Kotawaringin Lama	6201031	6201031008	Kelurahan Kotawaringin Hilir	5
36	Kotawaringin Lama	6201031	6201031007	Kelurahan Kotawaringin Hulu	5
37	Kotawaringin Lama	6201032	6201032004	Kinjil	6
38	Kotawaringin Lama	6201032	6201032011	Kondang	1
39	Kotawaringin Lama	6201032	6201032009	Lalang	4
40	Kotawaringin Lama	6201032	6201032015	Palih Baru	1
41	Kotawaringin Lama	6201032	6201032006	Riam Durian	5
42	Kotawaringin Lama	6201032	6201032010	Rungun	4
43	Kotawaringin Lama	6201032	6201032017	Sagu Suka Mulya	6
44	Kotawaringin Lama	6201032	6201032003	Sakabulin	6
45	Kotawaringin Lama	6201032	6201032012	Suka Jaya	5
46	Kotawaringin Lama	6201032	6201032013	Suka Makmur	4
47	Kotawaringin Lama	6201032	6201032014	Sumber Mukti	4
48	Kotawaringin Lama	6201032	6201032002	Tempayung	5
49	Kumai	6201012	6201012009	Batu Belaman	3
50	Kumai	6201012	6201012017	Bumi Harjo	3
51	Kumai	6201011	6201011011	Kelurahan Candi	4
52	Kumai	6201011	6201011013	Kelurahan Kumai Hilir	2
53	Kumai	6201011	6201011012	Kelurahan Kumai Hulu	1
54	Kumai	6201012	6201012004	Keraya	1
55	Kumai	6201012	6201012007	Kubu	1
56	Kumai	6201012	6201012032	Pangkalan Satu	3
57	Kumai	6201012	6201012003	Sabuai	1

58	Kumai	6201012	6201012034	Sebuai Timur	2
59	Kumai	6201012	6201012006	Sungai Bakau	3
60	Kumai	6201012	6201012015	Sungai Bedaun	6
61	Kumai	6201012	6201012001	Sungai Cabang	1
62	Kumai	6201012	6201012008	Sungai Kapitan	4
63	Kumai	6201012	6201012014	Sungai Sekonyer	3
64	Kumai	6201012	6201012010	Sungai Tendang	4
65	Kumai	6201012	6201012005	Teluk Bogam	1
66	Kumai	6201012	6201012002	Teluk Pulai	3
67	Pangkalan Banteng	6201062	6201062007	Amin Jaya	6
68	Pangkalan Banteng	6201062	6201062008	Arga Mulya	3
69	Pangkalan Banteng	6201062	6201062013	Berambai Makmur	3
70	Pangkalan Banteng	6201062	6201062003	Karang Mulya	6
71	Pangkalan Banteng	6201062	6201062014	Karang Sari	2
72	Pangkalan Banteng	6201062	6201062004	Kebun Agung	4
73	Pangkalan Banteng	6201062	6201062006	Marga Mulya	6
74	Pangkalan Banteng	6201062	6201062002	Mulya Jadi	4
75	Pangkalan Banteng	6201062	6201062009	Natai Kerbau	5
76	Pangkalan Banteng	6201062	6201062001	Pangkalan Banteng	6
77	Pangkalan Banteng	6201062	6201062005	Sido Mulyo	4
78	Pangkalan Banteng	6201062	6201062010	Simpang Berambai	6
79	Pangkalan Banteng	6201062	6201062016	Sungai Bengkuang	4
80	Pangkalan Banteng	6201062	6201062011	Sungai Hijau	2
81	Pangkalan Banteng	6201062	6201062017	Sungai Kuning	4
82	Pangkalan Banteng	6201062	6201062012	Sungai Pakit	6
83	Pangkalan Banteng	6201062	6201062015	Sungai Pulau	1
84	Pangkalan Lada	6201052	6201052009	Kadipi Atas	3
85	Pangkalan Lada	6201052	6201052003	Lada Mandala Jaya	3
86	Pangkalan Lada	6201052	6201052004	Makarti Jaya	6
87	Pangkalan Lada	6201052	6201052002	Pandu Sanjaya	5
88	Pangkalan Lada	6201052	6201052008	Pangkalan Dewa	4
89	Pangkalan Lada	6201052	6201052011	Pangkalan Durin	3
90	Pangkalan Lada	6201052	6201052001	Pangkalan Tiga	4
91	Pangkalan Lada	6201052	6201052006	Purbasari	4
92	Pangkalan Lada	6201052	6201052005	Sumber Agung	3
93	Pangkalan Lada	6201052	6201052010	Sungai Melawen	4
94	Pangkalan Lada	6201052	6201052007	Sungai Rangit Jaya	1

Lampiran 4. Sebaran Prioritas Desa Berdasarkan Indikator Aspek Akses terhadap Pangan Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat.

No.	Nama Kec	Kode Kec	Kode Desa	Nama Desa	4. P.Jalan
1	Arut Selatan	6201021	6201021009	Kelurahan Baru	4
2	Arut Selatan	6201021	6201021005	Kelurahan Madurejo	4
3	Arut Selatan	6201021	6201021003	Kelurahan Mendawai	4
4	Arut Selatan	6201021	6201021002	Kelurahan Mendawai Seberang	4
5	Arut Selatan	6201021	6201021007	Kelurahan Raja	4
6	Arut Selatan	6201021	6201021008	Kelurahan Raja Seberang	4
7	Arut Selatan	6201021	6201021006	Kelurahan Sidorejo	4
8	Arut Selatan	6201022	6201022011	Kenambui	4
9	Arut Selatan	6201022	6201022015	Kumpai Batu Atas	4
10	Arut Selatan	6201022	6201022014	Kumpai Batu Bawah	4
11	Arut Selatan	6201022	6201022017	Medang Sari	4
12	Arut Selatan	6201022	6201022018	Natai Baru	4
13	Arut Selatan	6201022	6201022016	Natai Raya	4
14	Arut Selatan	6201022	6201022004	Pasir Panjang	4
15	Arut Selatan	6201022	6201022010	Rangda	4
16	Arut Selatan	6201022	6201022012	Runtu	4
17	Arut Selatan	6201022	6201022020	Sulung	4
18	Arut Selatan	6201022	6201022001	Tanjung Putri	4
19	Arut Selatan	6201022	6201022019	Tanjung Terantang	4
20	Arut Selatan	6201022	6201022013	Umpang	4
21	Arut Utara	6201042	6201042004	Gandis	3
22	Arut Utara	6201041	6201041002	Kelurahan Pangkut	4
23	Arut Utara	6201042	6201042005	Kerabu	3
24	Arut Utara	6201042	6201042001	Nanga Mua	4
25	Arut Utara	6201042	6201042010	Panahan	4
26	Arut Utara	6201042	6201042008	Pandau	4
27	Arut Utara	6201042	6201042007	Penyombaan	3
28	Arut Utara	6201042	6201042009	Riam	4
29	Arut Utara	6201042	6201042006	Sambi	3
30	Arut Utara	6201042	6201042003	Sukarami	3
31	Arut Utara	6201042	6201042011	Sungai Dau	3
32	Kotawaringin Lama	6201032	6201032001	Babual Baboti	4
33	Kotawaringin Lama	6201032	6201032005	Dawak	4
34	Kotawaringin Lama	6201032	6201032016	Ipuh Bangun Jaya	4
35	Kotawaringin Lama	6201031	6201031008	Kelurahan Kotawaringin Hilir	4
36	Kotawaringin Lama	6201031	6201031007	Kelurahan Kotawaringin Hulu	4
37	Kotawaringin Lama	6201032	6201032004	Kinjil	4
38	Kotawaringin Lama	6201032	6201032011	Kondang	3
39	Kotawaringin Lama	6201032	6201032009	Lalang	3
40	Kotawaringin Lama	6201032	6201032015	Palih Baru	4
41	Kotawaringin Lama	6201032	6201032006	Riam Durian	4
42	Kotawaringin Lama	6201032	6201032010	Rungun	3
43	Kotawaringin Lama	6201032	6201032017	Sagu Suka Mulya	4
44	Kotawaringin Lama	6201032	6201032003	Sakabulin	4
45	Kotawaringin Lama	6201032	6201032012	Suka Jaya	4
46	Kotawaringin Lama	6201032	6201032013	Suka Makmur	4
47	Kotawaringin Lama	6201032	6201032014	Sumber Mukti	3
48	Kotawaringin Lama	6201032	6201032002	Tempayang	4
49	Kumai	6201012	6201012009	Batu Belaman	4
50	Kumai	6201012	6201012017	Bumi Harjo	4
51	Kumai	6201011	6201011011	Kelurahan Candi	4
52	Kumai	6201011	6201011013	Kelurahan Kumai Hilir	4
53	Kumai	6201011	6201011012	Kelurahan Kumai Hulu	4
54	Kumai	6201012	6201012004	Keraya	4
55	Kumai	6201012	6201012007	Kubu	4
56	Kumai	6201012	6201012032	Pangkalan Satu	4
57	Kumai	6201012	6201012003	Sabuai	4
58	Kumai	6201012	6201012034	Sebuai Timur	4

59	Kumai	6201012	6201012006	Sungai Bakau	4
60	Kumai	6201012	6201012015	Sungai Bedaun	4
61	Kumai	6201012	6201012001	Sungai Cabang	4
62	Kumai	6201012	6201012008	Sungai Kapitan	4
63	Kumai	6201012	6201012014	Sungai Sekonyer	3
64	Kumai	6201012	6201012010	Sungai Tendang	4
65	Kumai	6201012	6201012005	Teluk Bogam	4
66	Kumai	6201012	6201012002	Teluk Pulau	4
67	Pangkalan Banteng	6201062	6201062007	Amin Jaya	4
68	Pangkalan Banteng	6201062	6201062008	Arga Mulya	4
69	Pangkalan Banteng	6201062	6201062013	Berambai Makmur	4
70	Pangkalan Banteng	6201062	6201062003	Karang Mulya	4
71	Pangkalan Banteng	6201062	6201062014	Karang Sari	4
72	Pangkalan Banteng	6201062	6201062004	Kebun Agung	4
73	Pangkalan Banteng	6201062	6201062006	Marga Mulya	4
74	Pangkalan Banteng	6201062	6201062002	Mulya Jadi	4
75	Pangkalan Banteng	6201062	6201062009	Natai Kerbau	4
76	Pangkalan Banteng	6201062	6201062001	Pangkalan Banteng	4
77	Pangkalan Banteng	6201062	6201062005	Sido Mulyo	4
78	Pangkalan Banteng	6201062	6201062010	Simpang Berambai	4
79	Pangkalan Banteng	6201062	6201062016	Sungai Bengkuang	4
80	Pangkalan Banteng	6201062	6201062011	Sungai Hijau	4
81	Pangkalan Banteng	6201062	6201062017	Sungai Kuning	4
82	Pangkalan Banteng	6201062	6201062012	Sungai Pakit	4
83	Pangkalan Banteng	6201062	6201062015	Sungai Pulau	4
84	Pangkalan Lada	6201052	6201052009	Kadipi Atas	4
85	Pangkalan Lada	6201052	6201052003	Lada Mandala Jaya	4
86	Pangkalan Lada	6201052	6201052004	Makarti Jaya	4
87	Pangkalan Lada	6201052	6201052002	Pandu Sanjaya	4
88	Pangkalan Lada	6201052	6201052008	Pangkalan Dewa	4
89	Pangkalan Lada	6201052	6201052011	Pangkalan Durin	4
90	Pangkalan Lada	6201052	6201052001	Pangkalan Tiga	4
91	Pangkalan Lada	6201052	6201052006	Purbasari	4
92	Pangkalan Lada	6201052	6201052005	Sumber Agung	4
93	Pangkalan Lada	6201052	6201052010	Sungai Melawen	4
94	Pangkalan Lada	6201052	6201052007	Sungai Rangit Jaya	4

Lampiran 5. Sebaran Prioritas Desa Berdasarkan Indikator Aspek Pemanfaatan Pangan Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga.

No.	Nama Kec	Kode Kec	Kode Desa	Nama Desa	5. P.NoWater
1	Arut Selatan	6201021	6201021009	Kelurahan Baru	5
2	Arut Selatan	6201021	6201021005	Kelurahan Madurejo	5
3	Arut Selatan	6201021	6201021003	Kelurahan Mendawai	5
4	Arut Selatan	6201021	6201021002	Kelurahan Mendawai Seberang	6
5	Arut Selatan	6201021	6201021007	Kelurahan Raja	5
6	Arut Selatan	6201021	6201021008	Kelurahan Raja Seberang	3
7	Arut Selatan	6201021	6201021006	Kelurahan Sidorejo	6
8	Arut Selatan	6201022	6201022011	Kenambui	2
9	Arut Selatan	6201022	6201022015	Kumpai Batu Atas	3
10	Arut Selatan	6201022	6201022014	Kumpai Batu Bawah	4
11	Arut Selatan	6201022	6201022017	Medang Sari	3
12	Arut Selatan	6201022	6201022018	Natai Baru	3
13	Arut Selatan	6201022	6201022016	Natai Raya	3
14	Arut Selatan	6201022	6201022004	Pasir Panjang	5
15	Arut Selatan	6201022	6201022010	Rangda	3
16	Arut Selatan	6201022	6201022012	Runtu	4
17	Arut Selatan	6201022	6201022020	Sulung	4
18	Arut Selatan	6201022	6201022001	Tanjung Putri	2
19	Arut Selatan	6201022	6201022019	Tanjung Terantang	3
20	Arut Selatan	6201022	6201022013	Umpang	4
21	Arut Utara	6201042	6201042004	Gandis	6
22	Arut Utara	6201041	6201041002	Kelurahan Pangkut	4
23	Arut Utara	6201042	6201042005	Kerabu	2
24	Arut Utara	6201042	6201042001	Nanga Mua	6
25	Arut Utara	6201042	6201042010	Panahan	6
26	Arut Utara	6201042	6201042008	Pandau	2
27	Arut Utara	6201042	6201042007	Penyombaan	6
28	Arut Utara	6201042	6201042009	Riam	6
29	Arut Utara	6201042	6201042006	Sambi	2
30	Arut Utara	6201042	6201042003	Sukarami	6
31	Arut Utara	6201042	6201042011	Sungai Dau	2
32	Kotawaringin Lama	6201032	6201032001	Babual Baboti	2
33	Kotawaringin Lama	6201032	6201032005	Dawak	4
34	Kotawaringin Lama	6201032	6201032016	Ipuh Bangun Jaya	2
35	Kotawaringin Lama	6201031	6201031008	Kelurahan Kotawaringin Hilir	4
36	Kotawaringin Lama	6201031	6201031007	Kelurahan Kotawaringin Hulu	4
37	Kotawaringin Lama	6201032	6201032004	Kinjil	3
38	Kotawaringin Lama	6201032	6201032011	Kondang	6
39	Kotawaringin Lama	6201032	6201032009	Lalang	6
40	Kotawaringin Lama	6201032	6201032015	Palih Baru	1
41	Kotawaringin Lama	6201032	6201032006	Riam Durian	6
42	Kotawaringin Lama	6201032	6201032010	Rungun	4
43	Kotawaringin Lama	6201032	6201032017	Sagu Suka Mulya	6
44	Kotawaringin Lama	6201032	6201032003	Sakabulin	4
45	Kotawaringin Lama	6201032	6201032012	Suka Jaya	6
46	Kotawaringin Lama	6201032	6201032013	Suka Makmur	6
47	Kotawaringin Lama	6201032	6201032014	Sumber Mukti	1
48	Kotawaringin Lama	6201032	6201032002	Tempayang	2
49	Kumai	6201012	6201012009	Batu Belaman	4
50	Kumai	6201012	6201012017	Bumi Harjo	3
51	Kumai	6201011	6201011011	Kelurahan Candi	4
52	Kumai	6201011	6201011013	Kelurahan Kumai Hilir	4
53	Kumai	6201011	6201011012	Kelurahan Kumai Hulu	5
54	Kumai	6201012	6201012004	Keraya	6
55	Kumai	6201012	6201012007	Kubu	4
56	Kumai	6201012	6201012032	Pangkalan Satu	4
57	Kumai	6201012	6201012003	Sabuai	1
58	Kumai	6201012	6201012034	Sebuai Timur	2

59	Kumai	6201012	6201012006	Sungai Bakau	3
60	Kumai	6201012	6201012015	Sungai Bedaun	3
61	Kumai	6201012	6201012001	Sungai Cabang	1
62	Kumai	6201012	6201012008	Sungai Kapitan	5
63	Kumai	6201012	6201012014	Sungai Sekonyer	1
64	Kumai	6201012	6201012010	Sungai Tendang	5
65	Kumai	6201012	6201012005	Teluk Bogam	3
66	Kumai	6201012	6201012002	Teluk Pulau	1
67	Pangkalan Banteng	6201062	6201062007	Amin Jaya	6
68	Pangkalan Banteng	6201062	6201062008	Arga Mulya	6
69	Pangkalan Banteng	6201062	6201062013	Berambai Makmur	1
70	Pangkalan Banteng	6201062	6201062003	Karang Mulya	6
71	Pangkalan Banteng	6201062	6201062014	Karang Sari	3
72	Pangkalan Banteng	6201062	6201062004	Kebun Agung	3
73	Pangkalan Banteng	6201062	6201062006	Marga Mulya	3
74	Pangkalan Banteng	6201062	6201062002	Mulya Jadi	4
75	Pangkalan Banteng	6201062	6201062009	Natai Kerbau	2
76	Pangkalan Banteng	6201062	6201062001	Pangkalan Banteng	3
77	Pangkalan Banteng	6201062	6201062005	Sido Mulyo	6
78	Pangkalan Banteng	6201062	6201062010	Simpang Berambai	3
79	Pangkalan Banteng	6201062	6201062016	Sungai Bengkuang	6
80	Pangkalan Banteng	6201062	6201062011	Sungai Hijau	1
81	Pangkalan Banteng	6201062	6201062017	Sungai Kuning	3
82	Pangkalan Banteng	6201062	6201062012	Sungai Pakit	4
83	Pangkalan Banteng	6201062	6201062015	Sungai Pulau	6
84	Pangkalan Lada	6201052	6201052009	Kadipi Atas	2
85	Pangkalan Lada	6201052	6201052003	Lada Mandala Jaya	2
86	Pangkalan Lada	6201052	6201052004	Makarti Jaya	4
87	Pangkalan Lada	6201052	6201052002	Pandu Sanjaya	4
88	Pangkalan Lada	6201052	6201052008	Pangkalan Dewa	3
89	Pangkalan Lada	6201052	6201052011	Pangkalan Durin	3
90	Pangkalan Lada	6201052	6201052001	Pangkalan Tiga	5
91	Pangkalan Lada	6201052	6201052006	Purbasari	4
92	Pangkalan Lada	6201052	6201052005	Sumber Agung	3
93	Pangkalan Lada	6201052	6201052010	Sungai Melawen	3
94	Pangkalan Lada	6201052	6201052007	Sungai Rangit Jaya	3

Lampiran 6. Sebaran Prioritas Desa Berdasarkan Indikator Aspek Pemanfaatan Pangan Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk.

No.	Nama Kec	Kode Kec	Kode Desa	Nama Desa	6. P.Tenkes
1	Arut Selatan	6201021	6201021009	Kelurahan Baru	5
2	Arut Selatan	6201021	6201021005	Kelurahan Madurejo	6
3	Arut Selatan	6201021	6201021003	Kelurahan Mendawai	6
4	Arut Selatan	6201021	6201021002	Kelurahan Mendawai Seberang	4
5	Arut Selatan	6201021	6201021007	Kelurahan Raja	6
6	Arut Selatan	6201021	6201021008	Kelurahan Raja Seberang	2
7	Arut Selatan	6201021	6201021006	Kelurahan Sidorejo	4
8	Arut Selatan	6201022	6201022011	Kenambui	2
9	Arut Selatan	6201022	6201022015	Kumpai Batu Atas	6
10	Arut Selatan	6201022	6201022014	Kumpai Batu Bawah	4
11	Arut Selatan	6201022	6201022017	Medang Sari	5
12	Arut Selatan	6201022	6201022018	Natai Baru	5
13	Arut Selatan	6201022	6201022016	Natai Raya	5
14	Arut Selatan	6201022	6201022004	Pasir Panjang	2
15	Arut Selatan	6201022	6201022010	Rangda	2
16	Arut Selatan	6201022	6201022012	Runtu	3
17	Arut Selatan	6201022	6201022020	Sulung	2
18	Arut Selatan	6201022	6201022001	Tanjung Putri	4
19	Arut Selatan	6201022	6201022019	Tanjung Terantang	5
20	Arut Selatan	6201022	6201022013	Umpang	2
21	Arut Utara	6201042	6201042004	Gandis	2
22	Arut Utara	6201041	6201041002	Kelurahan Pangkut	4
23	Arut Utara	6201042	6201042005	Kerabu	2
24	Arut Utara	6201042	6201042001	Nanga Mua	2
25	Arut Utara	6201042	6201042010	Panahan	2
26	Arut Utara	6201042	6201042008	Pandau	2
27	Arut Utara	6201042	6201042007	Penyombaan	2
28	Arut Utara	6201042	6201042009	Riam	2
29	Arut Utara	6201042	6201042006	Sambi	4
30	Arut Utara	6201042	6201042003	Sukarami	2
31	Arut Utara	6201042	6201042011	Sungai Dau	3
32	Kotawaringin Lama	6201032	6201032001	Babual Baboti	2
33	Kotawaringin Lama	6201032	6201032005	Dawak	2
34	Kotawaringin Lama	6201032	6201032016	Ipuh Bangun Jaya	6
35	Kotawaringin Lama	6201031	6201031008	Kelurahan Kotawaringin Hilir	3
36	Kotawaringin Lama	6201031	6201031007	Kelurahan Kotawaringin Hulu	4
37	Kotawaringin Lama	6201032	6201032004	Kinjil	2
38	Kotawaringin Lama	6201032	6201032011	Kondang	2
39	Kotawaringin Lama	6201032	6201032009	Lalang	2
40	Kotawaringin Lama	6201032	6201032015	Palih Baru	6
41	Kotawaringin Lama	6201032	6201032006	Riam Durian	6
42	Kotawaringin Lama	6201032	6201032010	Rungun	3
43	Kotawaringin Lama	6201032	6201032017	Sagu Suka Mulya	5
44	Kotawaringin Lama	6201032	6201032003	Sakabulin	3
45	Kotawaringin Lama	6201032	6201032012	Suka Jaya	5
46	Kotawaringin Lama	6201032	6201032013	Suka Makmur	4
47	Kotawaringin Lama	6201032	6201032014	Sumber Mukti	6
48	Kotawaringin Lama	6201032	6201032002	Tempayang	3
49	Kumai	6201012	6201012009	Batu Belaman	3
50	Kumai	6201012	6201012017	Bumi Harjo	6
51	Kumai	6201011	6201011011	Kelurahan Candi	2
52	Kumai	6201011	6201011013	Kelurahan Kumai Hilir	2
53	Kumai	6201011	6201011012	Kelurahan Kumai Hulu	3
54	Kumai	6201012	6201012004	Keraya	2
55	Kumai	6201012	6201012007	Kubu	3
56	Kumai	6201012	6201012032	Pangkalan Satu	4
57	Kumai	6201012	6201012003	Sabuai	3
58	Kumai	6201012	6201012034	Sebuai Timur	3

59	Kumai	6201012	6201012006	Sungai Bakau	2
60	Kumai	6201012	6201012015	Sungai Bedaun	2
61	Kumai	6201012	6201012001	Sungai Cabang	2
62	Kumai	6201012	6201012008	Sungai Kapitan	3
63	Kumai	6201012	6201012014	Sungai Sekonyer	2
64	Kumai	6201012	6201012010	Sungai Tendang	3
65	Kumai	6201012	6201012005	Teluk Bogam	5
66	Kumai	6201012	6201012002	Teluk Pulau	2
67	Pangkalan Banteng	6201062	6201062007	Amin Jaya	3
68	Pangkalan Banteng	6201062	6201062008	Arga Mulya	2
69	Pangkalan Banteng	6201062	6201062013	Berambai Makmur	6
70	Pangkalan Banteng	6201062	6201062003	Karang Mulya	6
71	Pangkalan Banteng	6201062	6201062014	Karang Sari	4
72	Pangkalan Banteng	6201062	6201062004	Kebun Agung	5
73	Pangkalan Banteng	6201062	6201062006	Marga Mulya	4
74	Pangkalan Banteng	6201062	6201062002	Mulya Jadi	4
75	Pangkalan Banteng	6201062	6201062009	Natai Kerbau	3
76	Pangkalan Banteng	6201062	6201062001	Pangkalan Banteng	2
77	Pangkalan Banteng	6201062	6201062005	Sido Mulyo	3
78	Pangkalan Banteng	6201062	6201062010	Simpang Berambai	5
79	Pangkalan Banteng	6201062	6201062016	Sungai Bengkuang	4
80	Pangkalan Banteng	6201062	6201062011	Sungai Hijau	5
81	Pangkalan Banteng	6201062	6201062017	Sungai Kuning	5
82	Pangkalan Banteng	6201062	6201062012	Sungai Pakit	4
83	Pangkalan Banteng	6201062	6201062015	Sungai Pulau	5
84	Pangkalan Lada	6201052	6201052009	Kadipi Atas	4
85	Pangkalan Lada	6201052	6201052003	Lada Mandala Jaya	4
86	Pangkalan Lada	6201052	6201052004	Makarti Jaya	5
87	Pangkalan Lada	6201052	6201052002	Pandu Sanjaya	6
88	Pangkalan Lada	6201052	6201052008	Pangkalan Dewa	6
89	Pangkalan Lada	6201052	6201052011	Pangkalan Durin	4
90	Pangkalan Lada	6201052	6201052001	Pangkalan Tiga	4
91	Pangkalan Lada	6201052	6201052006	Purbasari	4
92	Pangkalan Lada	6201052	6201052005	Sumber Agung	3
93	Pangkalan Lada	6201052	6201052010	Sungai Melawen	4
94	Pangkalan Lada	6201052	6201052007	Sungai Rangit Jaya	3

Lampiran 7. Sebaran Desa berdasarkan Prioritas Komposit.

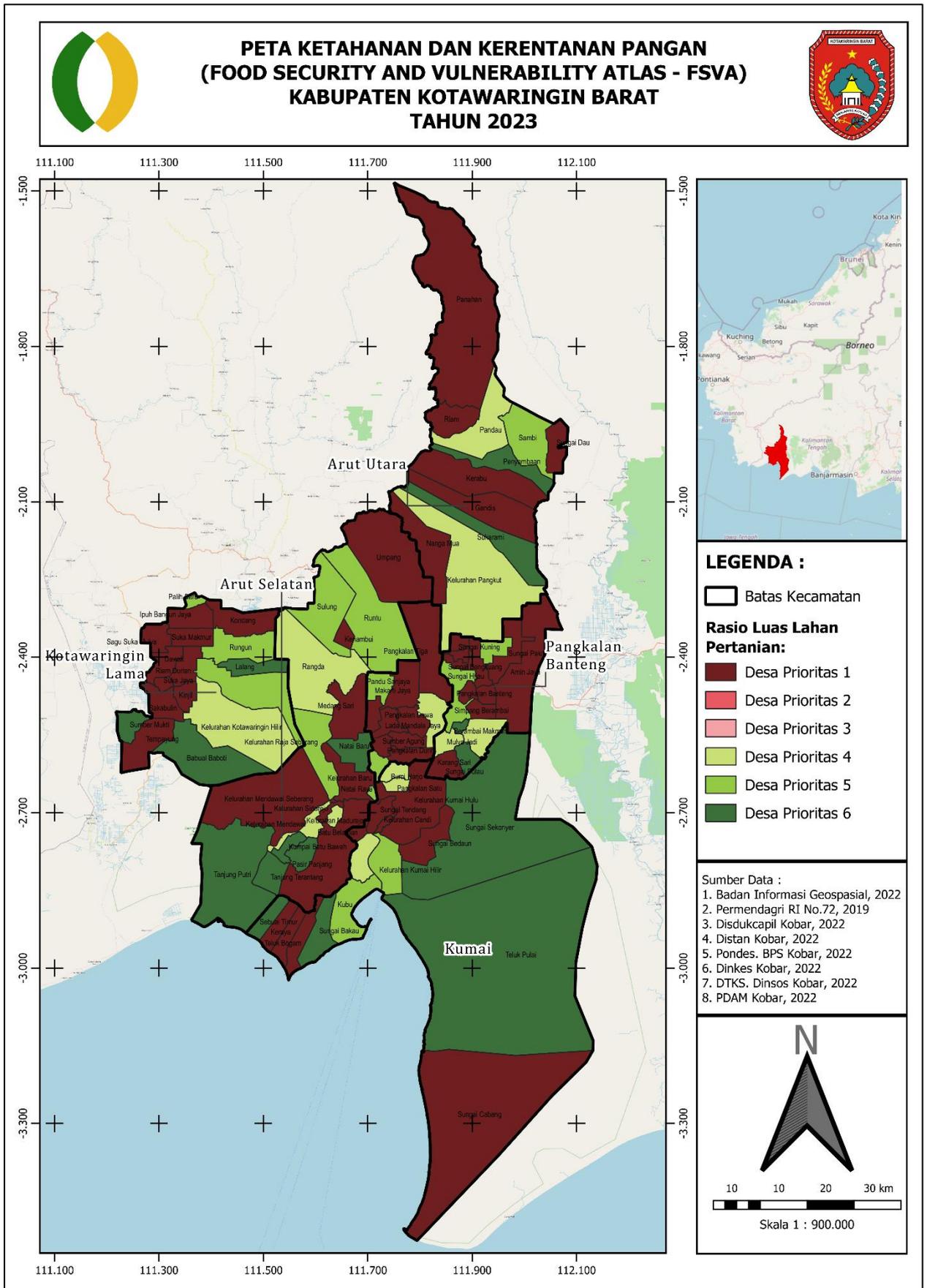
No.	Nama Kec	Kode Kec	Kode Desa	Nama Desa	PRIO KOMP
1	Arut Selatan	6201021	6201021009	Kelurahan Baru	6
2	Arut Selatan	6201021	6201021005	Kelurahan Madurejo	6
3	Arut Selatan	6201021	6201021003	Kelurahan Mendawai	6
4	Arut Selatan	6201021	6201021002	Kelurahan Mendawai Seberang	5
5	Arut Selatan	6201021	6201021007	Kelurahan Raja	6
6	Arut Selatan	6201021	6201021008	Kelurahan Raja Seberang	6
7	Arut Selatan	6201021	6201021006	Kelurahan Sidorejo	6
8	Arut Selatan	6201022	6201022011	Kenambui	5
9	Arut Selatan	6201022	6201022015	Kumpai Batu Atas	6
10	Arut Selatan	6201022	6201022014	Kumpai Batu Bawah	6
11	Arut Selatan	6201022	6201022017	Medang Sari	5
12	Arut Selatan	6201022	6201022018	Natai Baru	5
13	Arut Selatan	6201022	6201022016	Natai Raya	6
14	Arut Selatan	6201022	6201022004	Pasir Panjang	6
15	Arut Selatan	6201022	6201022010	Rangda	6
16	Arut Selatan	6201022	6201022012	Runtu	6
17	Arut Selatan	6201022	6201022020	Sulung	6
18	Arut Selatan	6201022	6201022001	Tanjung Putri	4
19	Arut Selatan	6201022	6201022019	Tanjung Terantang	4
20	Arut Selatan	6201022	6201022013	Umpang	5
21	Arut Utara	6201042	6201042004	Gandis	5
22	Arut Utara	6201041	6201041002	Kelurahan Pangkut	6
23	Arut Utara	6201042	6201042005	Kerabu	5
24	Arut Utara	6201042	6201042001	Nanga Mua	6
25	Arut Utara	6201042	6201042010	Panahan	5
26	Arut Utara	6201042	6201042008	Pandau	6
27	Arut Utara	6201042	6201042007	Penyombaan	6
28	Arut Utara	6201042	6201042009	Riam	6
29	Arut Utara	6201042	6201042006	Sambi	5
30	Arut Utara	6201042	6201042003	Sukarami	6
31	Arut Utara	6201042	6201042011	Sungai Dau	6
32	Kotawaringin Lama	6201032	6201032001	Babual Baboti	5
33	Kotawaringin Lama	6201032	6201032005	Dawak	6
34	Kotawaringin Lama	6201032	6201032016	Ipuh Bangun Jaya	5
35	Kotawaringin Lama	6201031	6201031008	Kelurahan Kotawaringin Hilir	6
36	Kotawaringin Lama	6201031	6201031007	Kelurahan Kotawaringin Hulu	6
37	Kotawaringin Lama	6201032	6201032004	Kinjil	6
38	Kotawaringin Lama	6201032	6201032011	Kondang	5
39	Kotawaringin Lama	6201032	6201032009	Lalang	6
40	Kotawaringin Lama	6201032	6201032015	Palih Baru	4
41	Kotawaringin Lama	6201032	6201032006	Riam Durian	6
42	Kotawaringin Lama	6201032	6201032010	Rungun	6
43	Kotawaringin Lama	6201032	6201032017	Sagu Suka Mulya	6
44	Kotawaringin Lama	6201032	6201032003	Sakabulin	6
45	Kotawaringin Lama	6201032	6201032012	Suka Jaya	6
46	Kotawaringin Lama	6201032	6201032013	Suka Makmur	6
47	Kotawaringin Lama	6201032	6201032014	Sumber Mukti	5
48	Kotawaringin Lama	6201032	6201032002	Tempayang	5
49	Kumai	6201012	6201012009	Batu Belaman	6
50	Kumai	6201012	6201012017	Bumi Harjo	5
51	Kumai	6201011	6201011011	Kelurahan Candi	6
52	Kumai	6201011	6201011013	Kelurahan Kumai Hilir	5
53	Kumai	6201011	6201011012	Kelurahan Kumai Hulu	4
54	Kumai	6201012	6201012004	Keraya	5
55	Kumai	6201012	6201012007	Kubu	5
56	Kumai	6201012	6201012032	Pangkalan Satu	6
57	Kumai	6201012	6201012003	Sabuai	6
58	Kumai	6201012	6201012034	Sebuai Timur	5
59	Kumai	6201012	6201012006	Sungai Bakau	6

60	Kumai	6201012	6201012015	Sungai Bedaun	6
61	Kumai	6201012	6201012001	Sungai Cabang	1
62	Kumai	6201012	6201012008	Sungai Kapitan	6
63	Kumai	6201012	6201012014	Sungai Sekonyer	5
64	Kumai	6201012	6201012010	Sungai Tendang	6
65	Kumai	6201012	6201012005	Teluk Bogam	4
66	Kumai	6201012	6201012002	Teluk Pulau	6
67	Pangkalan Banteng	6201062	6201062007	Amin Jaya	6
68	Pangkalan Banteng	6201062	6201062008	Arga Mulya	6
69	Pangkalan Banteng	6201062	6201062013	Berambai Makmur	5
70	Pangkalan Banteng	6201062	6201062003	Karang Mulya	6
71	Pangkalan Banteng	6201062	6201062014	Karang Sari	5
72	Pangkalan Banteng	6201062	6201062004	Kebun Agung	5
73	Pangkalan Banteng	6201062	6201062006	Marga Mulya	6
74	Pangkalan Banteng	6201062	6201062002	Mulya Jadi	6
75	Pangkalan Banteng	6201062	6201062009	Natai Kerbau	6
76	Pangkalan Banteng	6201062	6201062001	Pangkalan Banteng	6
77	Pangkalan Banteng	6201062	6201062005	Sido Mulyo	6
78	Pangkalan Banteng	6201062	6201062010	Simpang Berambai	6
79	Pangkalan Banteng	6201062	6201062016	Sungai Bengkuang	6
80	Pangkalan Banteng	6201062	6201062011	Sungai Hijau	4
81	Pangkalan Banteng	6201062	6201062017	Sungai Kuning	6
82	Pangkalan Banteng	6201062	6201062012	Sungai Pakit	6
83	Pangkalan Banteng	6201062	6201062015	Sungai Pulau	4
84	Pangkalan Lada	6201052	6201052009	Kadipi Atas	5
85	Pangkalan Lada	6201052	6201052003	Lada Mandala Jaya	5
86	Pangkalan Lada	6201052	6201052004	Makarti Jaya	6
87	Pangkalan Lada	6201052	6201052002	Pandu Sanjaya	6
88	Pangkalan Lada	6201052	6201052008	Pangkalan Dewa	6
89	Pangkalan Lada	6201052	6201052011	Pangkalan Durin	5
90	Pangkalan Lada	6201052	6201052001	Pangkalan Tiga	6
91	Pangkalan Lada	6201052	6201052006	Purbasari	6
92	Pangkalan Lada	6201052	6201052005	Sumber Agung	6
93	Pangkalan Lada	6201052	6201052010	Sungai Melawen	6
94	Pangkalan Lada	6201052	6201052007	Sungai Rangit Jaya	4

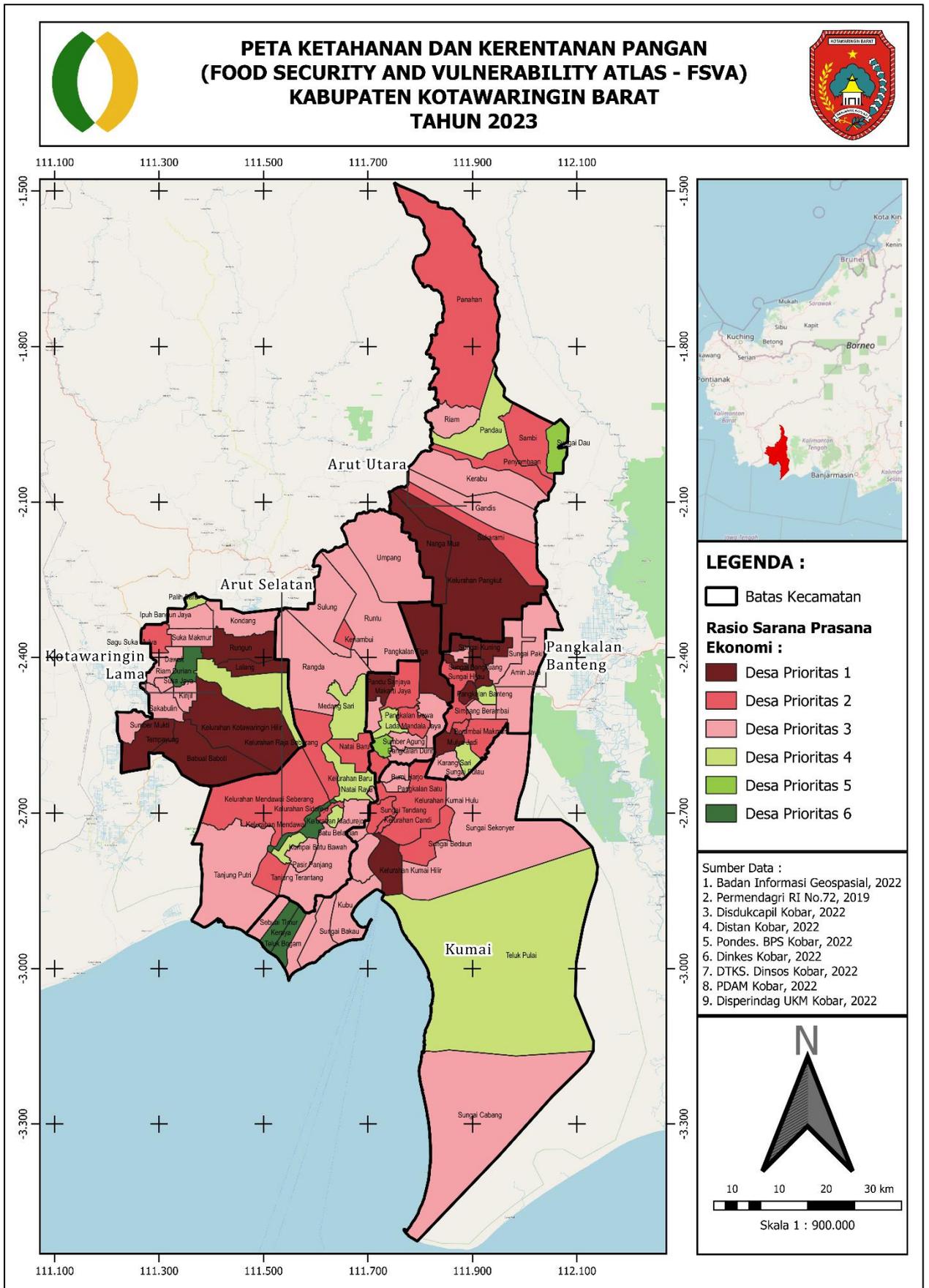
Keterangan :

1. **P.Lahan** (Rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk) : Dinas Pertanian, BPS, Disdukcapil.
2. **P.Sarana** (Rasio Jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga) : BPS, Disperindag, Disdukcapil.
3. **P.Tdk Sejahtera** (Rasio Jmlh Pddk tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk) : BPS, Dinsos, Disdukcapil.
4. **P.Jalan** (Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat) : BPS, Disdukcapil, PUPR.
5. **P.NoWater** (Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga) : BPS, Dinkes, PDAM, Disdukcapil.
6. **P.Tenkes** (Rasio Jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk) : BPS, Dinkes, Disdukcapil

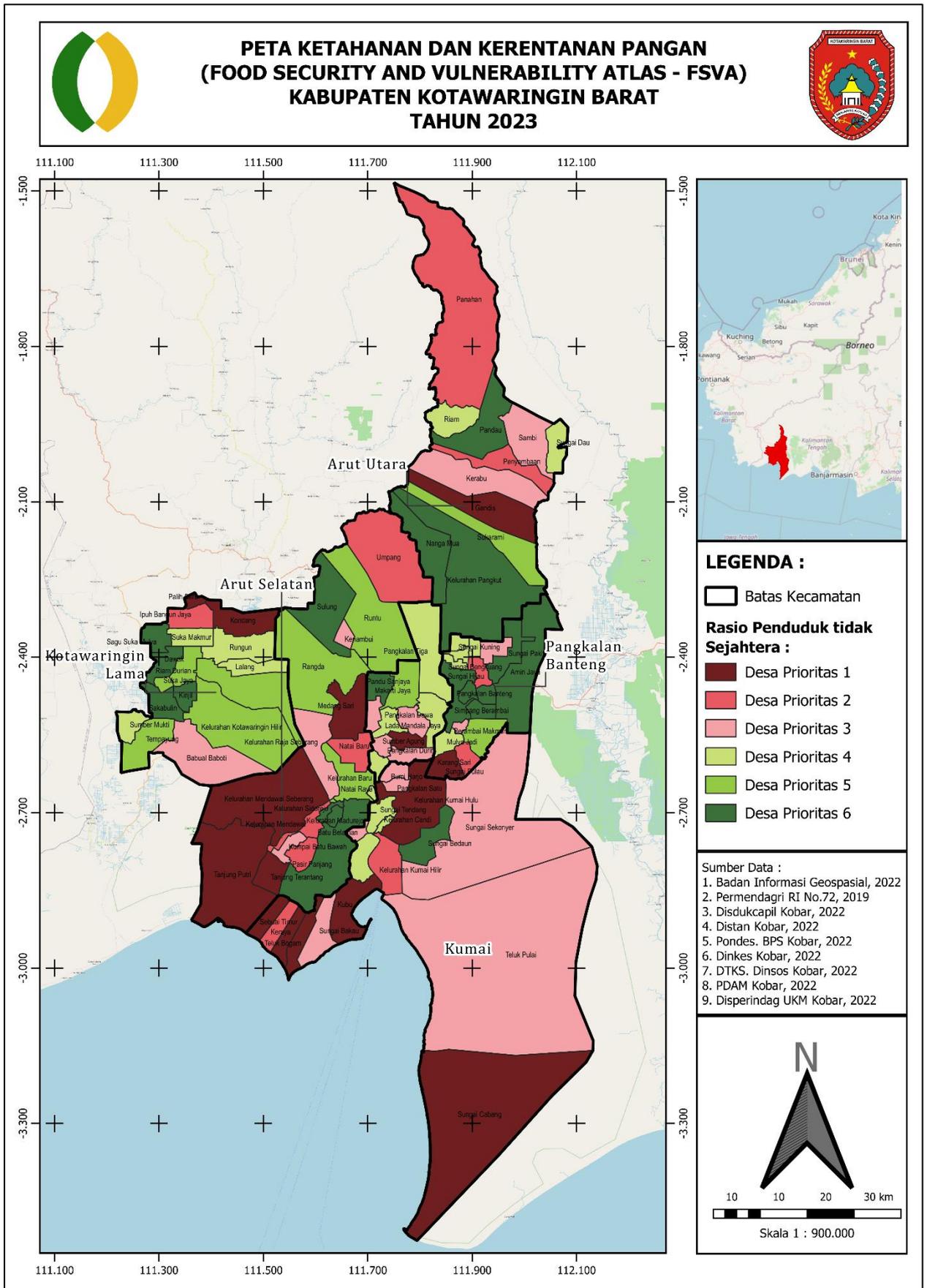
Lampiran 8. Sebaran rasio luas baku lahan sawah terhadap total lahan berdasarkan prioritas per desa.



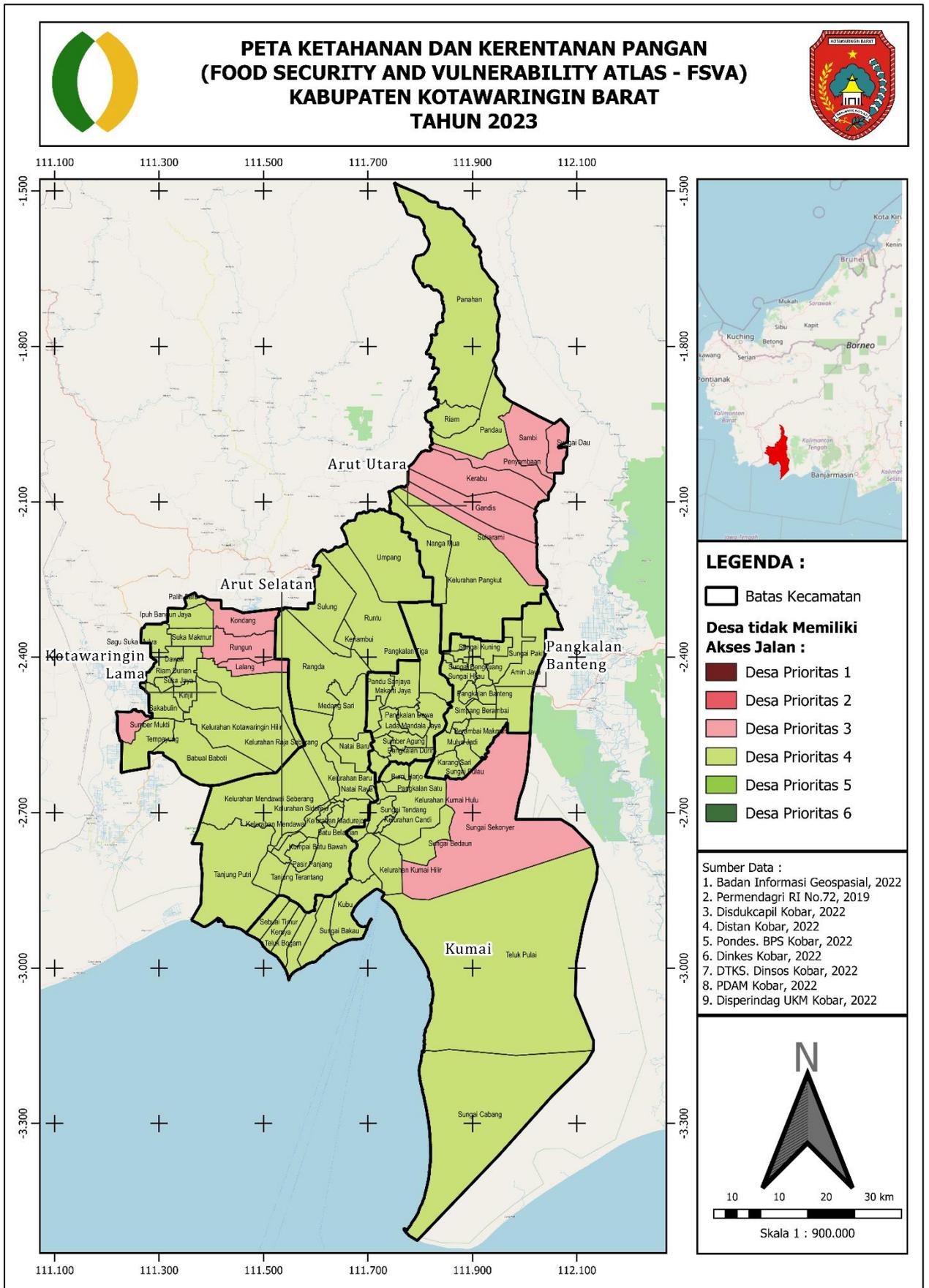
Lampiran 9. Sebaran rasio sarana prasarana ekonomi terhadap jumlah rumah tangga berdasarkan prioritas per desa.



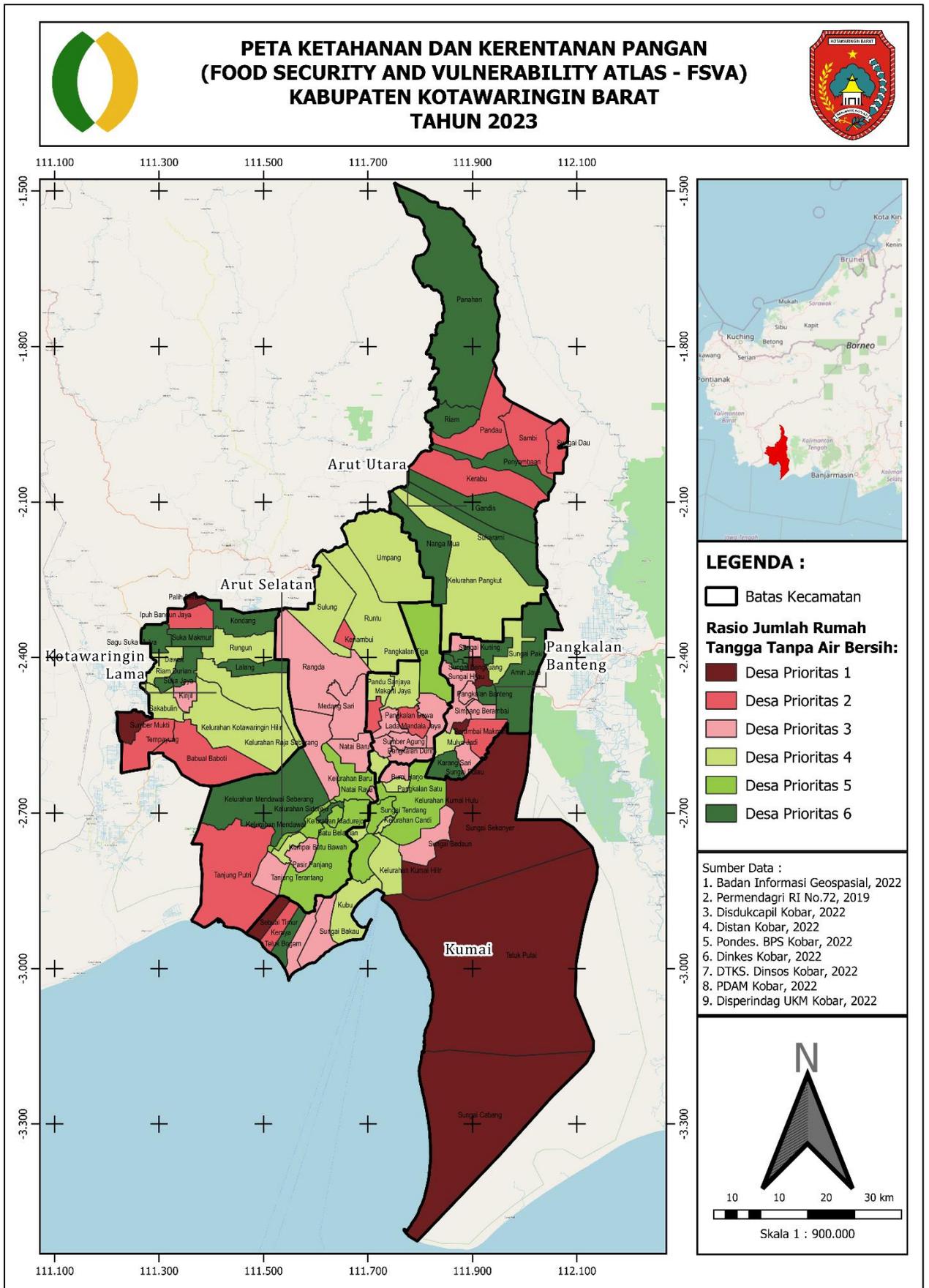
Lampiran 10. Sebaran desa dengan tingkat kesejahteraan terendah berdasarkan skala prioritas per desa.



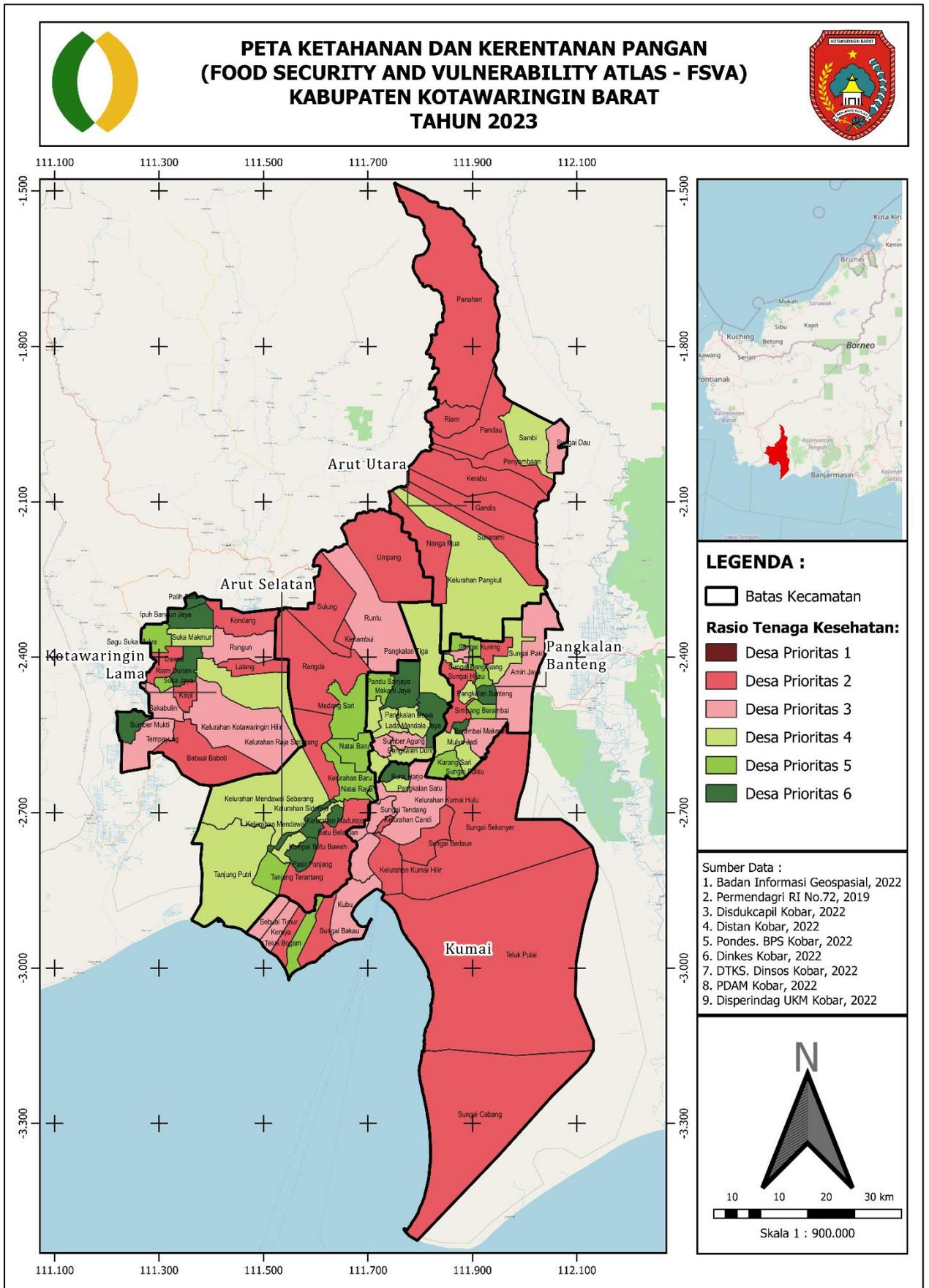
Lampiran 11. Sebaran desa dengan kategori/Kriteria akses transportasi per desa.



Lampiran 12. Sebaran desa berdasarkan rumah tangga tanpa akses air bersih berdasarkan skala prioritas per desa.



Lampiran 13. Sebaran rasio tenaga kesehatan di desa berdasarkan skala prioritas per desa.



Lampiran 14. Peta per desa Komposit Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas-FSVA) Kabupaten Kotawaringin Barat 2023.

